
BEST PRACTICE TOLERANCE



DUSKI SAMAD

Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag

BEST PRACTICE
TOLERANSI

Penerbit PAB Publishing



Dicetak Duskisamad Institute



Best Practice Toleransi

Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag

Hak Cipta 2020, Juni 2020,
Isi di luar tanggung jawab percetakan

copyright@2020,
by pabpublishing All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, menfotocopy atau memperbanyak
sebahagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit pab publishing

Jl. Kuini No. 79 B Padang

Website: www.pabpublishing.co.id

e-mail: pab@kemenag.go.id

Penerbit PAB Publishing



Best Practice Toleransi

Penulis : Duski Samad
Setting layout : Aulia Uzzaki Duski
Penerbit : Penerbit pab publishing
Jl. Kuini No. 79 B Padang
Website: www.pabpublishing.co.id
e-mail: pab@kemenag.go.id
Dicetak oleh : Duskisamad Institut Publishing
Jln. Ambon I No.4 Wisma Indah Siteba
Nanggalo Padang Kode Pos 25146

Pustaka Nasional, Katalog Dalam Terbitan

Cet. I, Juli 2020.

ix+190 halaman

ISBN: 978-623-92096-9-8



PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur disampaikan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* dan shalawat salam diunjuk kan bagi Rasul Muhammad *Sallahualai'hi wasalam*, untuk selalu membawa kesejahteraan untuk semua makhluk, amin.

Kesadaran untuk terus mengembangkan kehidupan tolerans, damai, rukun dan sejahtera adalah kewajiban dan kebutuhan anak bangsa. Terganggunya kerukunan, sekecil apapun, mengurangi kenyamanan hidup dan membuat Indonesia lambat mencapai tujuannya. Kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah menjadi wadah kolektif pemuka agama guna untuk ciptakan dan menjaga kerukunan semua elemen bangsa.

Keterlibatan penulis sebagai bahagian dari Pengurus FKUB Sumatera Barat priode 2007-2012 sebagai seorang ketua bidang dan Wakil Ketua Priode 2012-2017 menjadikan penulis mendapatkan kesempatan untuk berbagi ilmu, pengalaman dan terpanggil berkontribusi memberikan pikiran untuk mewujudkan kerukunan, dan toleransi baik langsung dalam rapat-rapat, seminar, kordanasi dan pertemuan lainnya, maupun dalam kesempatan yang sengaja dilakukan melalui opini di media cetak dan elektronik. Untuk merekam dan mengetahui dinamika gerak organisasi FKUB dan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, maka buku *SUMATERA BARAT BEST PRACTICE TOLERANSI* ditulis dan dipublikasikan secara luas.

Bahan dasar buku ini diangkat dari kumpulan pikiran, pendapat, gagasan yang ditulis pada makalah seminar, workshop, rapat kordinasi, atrikel di media massa dan dalam berbagai kesempatan yang terkait dengan kerukunan umat beragama, toleransi dan kehidupan bangsa yang damai. Buku

ini memuat 26 topik yang beragam, namun dalam satu aras pemikiran yaitu tentang toleransi dan kerukunan. Tulisan ini tentu diharapkan membawa informasi dan wawasan bagi pegiat, tokoh dan anak bangsa yang cinta rukun, damai dan toleran.

Sebagai pikiran dan cetusan pendapat disadari bahwa di dalam buku ini terdapat pengulangan, kesalahan, dan kekeliruan yang dapat berpotensi mengganggu toleransi dan kerukunan penulis mohon maaf dan kiranya berkenan memperbaiki sebagaimana mestinya. Semoga kiranya karya ini menjadi ibadah dan membawa manfaat untuk kebaikan yang lebih luas, amin. *Wassalam.*

Padang, 20 Maret 2017

Penulis,

Duski Samad

SAMBUTAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT



Kerukunan beragama adalah kebutuhan strategis dalam membangun stabilitas nasional. Bangsa Indonesia yang realitasnya memang beragam agama, keyakinan, budaya dan prilaku disadari berpotensi untuk munculnya gesekan yang bukan tidak mungkin agama dijadikan alasannya.

Kementerian agama sejak awal berdirinya telah menjadikan kerukunan umat beragama sebagai tugas utama. Kerukunan interen umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah adalah kondisi yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjembati hubungan antar tokoh umat beragama telah menunjukkan hasil yg mengembirakan. Dalam kerangka memberikan pemahaman yang komperhensif dari tokoh agama terhadap arti, fungsi kerukunan dan toleransi maka kehadiran buku *Best Practice Toleransi* yang ditulis oleh Saudara Duski Samad menjadi penting adanya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat menyambut gembira hadirnya buku kumpulan tulisan tokoh pemerhati dan praktisi Kerukunan di Sumatera Barat. Penulis buku ini terlibat aktif berkontribusi dalam pengembangan dan pemeliharaan kerukunan di Sumatera Barat dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama Islam, cendikiawan dan pengurus FKUB dua priode 2007-2012 dan 2015-2017. Tulisan yang ada dalam buku ini merupakan pemikiran dan pandangan tentang penting dan berharganya kerukunan hidup beragama. Artikel dalam buku ini sebagaiannya ng

sudah dipublikasi di media cetak lokal dan nasional, yang lain ada pula materi ajar pada pelatihan yang disampaikan pada rapat kordinasi Kerukunan Umat Beragama di tingka Propinsi, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Kami yakin kerukunan hidup beragama di Sumatera Barat yang diwujudkan dalam toleransi akan semakin menjadi nyata dan akan selalu kondusif di saat tokoh agama dan cendikiawan ikut secara aktif terlibat untuk mewujudkannya. Atas kerja keras dan sumbangan keilmuan yang diberikan penulis, begitu juga semua pihak yang peduli pada kerukunan dan toleransi kami ucapkan terima kasih. wassalam.

30 Maret 2017
Kepala,

H. Salman

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iv
SAMBUTAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA	vi
DAFTAR ISI	vii
A. Sumatra Barat <i>Best Practice</i> Toleransi	01.
B. Sinkil, Mengawal rukun.	10.
C. Toleransi Sehat	17.
D. Toleransi Menyesatkan	22.
E. <i>Informal Leader</i> dan Kerukunan	27.
F. Kerukunan Dinamis	32.
G. Sinergi Untuk Kerukunan	38.
H. Kerukunan Mencegah Bahaya Kemanusiaan	47.
I. Laboratorium Kerukunan dan Multikultural.	52.
J. Mencegah Sesat, Merawat Umat.	58.
K. Kerukunan dan Gerakan Bela Negara	67.
L. Peran Fkub Menfasilitasi Ahmadiyah.	72.
M. “Meliana”, Bencana Kerukunan.	80.
N. Pengembangan Kearifan Llokal.	85.
O. Indonesia Beragama dan Beragam, Yes!.	95.
P. Keragaman, <i>Kalimatun Sawa'</i> dan Toleransi	102.
Q. Tolikara, Rawat Rukun dan Cegah Rawan	113.
R. Meningkatkan Kualitas Kerukunan	121.
S. Maaf dan Rekonsiliasi	128.
T. Masyarakat Belum Butuh FKUB, Apa iya?	134.
U. Umat Pilihan itu menyatu	138.
V. Memaafkan	147.
W. Anti Kebhinikaan?	153.
X. Membangun Jaringan Komunikasi Umat	157.
Y. Pesantren dan ISIS?	166.
Z. <i>Tadbir al Khafi</i> , dan Kuasa <i>Clear and Clean</i>	172.
Rumusan Rakor FKUB 2015	179.
Daftar Bacaan	181.

SUMATRA BARAT

BEST PRACTICE TOLERANSI¹

Kemajemukan Sebagai Realitas

Keragaman (pluralistik) adalah keniscayaan yang melekatkan dalam komunitas. Memaksakan keragaman (pluralisme) adalah ancaman laten yang akan mendatangkan kebinasaan. Keseragaman, tanpa menghargai adanya perbedaan adalah pertanda kematian budaya. Manusia hidup bukan dalam ruang hampa budaya. Agama dan budaya apapun diyakini mewariskan keberagaman dalam nafas kerukunan.

Pengalaman mengajarkan bahwa peran adat dan budaya dalam merekat kerukunan cukup efektif. Adat dan budaya yang sudah luhur dalam kehidupan bersama dinamakan kearifan lokal. Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Secara etimologis, kearifan (*wisdom*) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam

¹Makalah Rapat Kerja Daerah FKUB se Sumatera Barat, 28 Desember 2015.

bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007).

Kearifan lokal bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah (Gobyah, 2003). Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

Norma dan Etika Toleransi

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
 كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
 عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
 لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.. Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam [Yang

dimaksud dengan dekat Masjidilharam Ialah: Al-Hudaibiyah, suatu tempat yang terletak dekat Makkah di jalan ke Madinah. pada tempat itu Nabi Muhammad SAW Mengadakan Perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin dalam masa 10 tahun.].? Maka selama mereka Berlaku Lurus terhadapmu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Taubah, 6-7).

Norma ayat di atas cukup kuat memberikan dukungan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi umat non Islam yang sudah terikat dalam perjanjian dengan mereka. Akhlak mulia yang diajarkan Rasul terhadap non Islam adalah memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang meminta perlindungan, malah lebih jauh diperintahkan agar mengantarkan mereka ke tempat di mana mereka mendapat rasa aman. Perlakuan santun dan melindungi terhadap non Islam dipercayai akan membawa keuntungan bagi Islam karena mereka non Islam itu dapat menimba ilmu dari Islam.

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa soal keberimanan adalah soal hidayah dan pengetahuan yang mereka punyai. Pada ayat ke 7 di pertegas bahwa siapapun yang sudah terikat dalam perjanjian harus selama mereka berlaku lurus meneguhi perjanjian maka umat Islam harus menyikapinya dengan baik dan teguh pula. Artinya tidak boleh mengkhiasi janji dalam bidang aqidah sekalipun.

Kearifan Lokal Perangkat Toleransi.

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok

masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Kearifan lokal atau local wisdom adalah istilah yang mengacu kepada nilai kearifan yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Wacana ini muncul sebagai reaksi atas konsep rasionalisasi di bawah payung modernisasi yang mencoba mengeliminir peran kearifan lokal ini dalam sistem kosmologi masyarakat dengan lembaga-lembaga formal yang dianggap lebih rasional. Kearifan lokal adalah produk budaya (*cultural product*).

Membangkitkan kembali kearifan lokal ini adalah buah dari wacana multikulturalisme. Bagi sebagian orang, konsep ini diharapkan menjadi *oase* di tengah hubungan antar komponen masyarakat Indonesia yang kurang harmonis. Gagasan ini awalnya muncul pada negara-negara yang berpenduduk majemuk dari segi etnis, budaya dan agama, seperti misalnya di Amerika Serikat dan Eropa. Sebelum muncul multikulturalisme, di Amerika Serikat pernah dikembangkan teori “*melting-pot*” (“tempat melebur”) dan teori “*salad-bowl*” (tempat salad). Tapi, kedua-duanya mempunyai kelemahan dan mengalami kegagalan.

Teori *melting-pot* diupayakan untuk menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya asal masing-masing. Teori *salad bowl*, masing-masing budaya asal tidak dihilangkan melainkan diakomodir dan memberikan kontribusi bagi budaya bangsa, namun interaksi kultural belum berkembang dengan baik. Karena semua gagasan di atas tidak berjalan optimal, maka muncullah kemudian multikulturalisme untuk memperbaiki kelemahan gagasan-gagasan sebelumnya. Multikulturalisme muncul sebagai sebuah gerakan dimulai dengan gerakan menuntut hak-hak sipil dari masyarakat kulit hitam Amerika tahun 1960, hak-hak perempuan masyarakat Meksiko, Hispanik dan masyarakat asli Amerika tahun 1970, dan gerakan multikultur

untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan tahun 1980.

Indonesia termasuk negara yang mencoba memperbaiki konsepnya dalam menghadapi keragaman agama dan budayanya. Jika sebelumnya, konsep *homogeneisasi* (penyeragaman) yang mirip dengan *melting pot*-nya Amerika Serikat diutamakan, maka Indonesia saat ini menghormati semua agama sesuai porsinya. Dengan memperhatikan pokok-pokok tentang multi kulturalisme dan dihubungkan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, kiranya menjadi jelas bahwa multikulturalisme perlu dikembangkan di Indonesia, karena justru dengan gagasan inilah kita dapat memaknai keragaman agama di Indonesia. Konsep ini dapat memperkaya konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional.

Satu hal yang harus diamalkan bahwa gagasan multikulturalisme menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas. Tapi, sikap ini tetap memperhatikan hubungan antara posisi negara Indonesia sebagai negara religius yang berdasarkan Pancasila. Negara Indonesia tidak membenarkan dan tidak mentolerir adanya pemahaman yang anti Tuhan (*atheism*). Negara Indonesia juga tidak mentolerir berbagai upaya yang ingin memisahkan agama dari negara (sekularisme). Mungkin kedua hal ini menjadi ciri khas multikulturalisme di negara asalnya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Tapi, ketika konsep ini diterapkan di Indonesia, harus disesuaikan dengan konsep negara dan karakteristik masyarakat Indonesia yang religius. Singkatnya, multikulturalisme yang diterapkan di Indonesia adalah multikulturalisme religius, dalam satu bingkai saling menghargai secara proporsional.

Dalam konteks Minangkabau kearifan lokal implementasinya ada pada nagari. Nagari adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan basis kehidupan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.

Penerapan UU No.5/1979, yang mengubah Nagari menjadi desa, dianggap sebagai bentuk Jawanisasi yang telah mematisurikan hubungan sosial, identitas dan kepemimpinan lokal Nagari. Setelah reformasi, konsep Nagari bangkit dan semakin membunyah dengan slogan “kembali ke Nagari”.

Nagari mempunyai seperangkat mekanisme adat untuk mengatur segala bentuk hubungan sosial, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Nagari diatur dengan prinsip tali tigo sapilin: yaitu pertautan antara hukum adat, syari’at Islam dan hukum negara (atau Undang-Undang). Khusus hubungan antara adat dan Islam, orang Minang berpegang pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (atau disingkat ABS dan SBK), untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia, alam, dan Tuhan.

Pemerintahan Nagari yang otonom dipegang secara kolektif dengan prinsip tigo tungku sajarangan (ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai), dan pengambilan keputusan dilakukan melalui permusyawaratan antara pemimpin dan kaumnya di Nagari. Saat ini, Nagari tumbuh menjadi unit pemerintahan lokal yang menggabungkan antara prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat lokal. Para golongan tua di Nagari cenderung menggunakan referensi masa lalu untuk menata kembali Nagari. Misalnya, kembali ke Nagari berarti kembali ke adat dan kembali ke surau. Semua hal yang terkait dengan Nagari harus diatur dengan adat. Ninik mamak, misalnya, harus difungsikan kembali tanggung-jawabnya kepada kemenakan dalam kerangka keluarga besar (*extended family*).

Dalam konteks kerukunan hidup antar umat beragama di Sumatera Barat sudah berjalan sejak awal pembentukan masyarakat moderen, khususnya zaman pemerintah Hindia Belanda, walaupun dalam skala tertentu ada pasang naik dan

surut. Prinsip yang diwariskan oleh generasi pendahulu Minangkabau adalah kesediaan menerima pihak lain, agama lain, warga lain, sepanjang mereka memasuki nagari dan kehidupan sesuai adat dan kebiasaan lokal. Budaya merantau ciri khas etnis Minangkabau yang menjadikan anak nagari Minangkabau di terima oleh etnis, suku dan negara, daerah dan kampung mana saja di dunia adalah karena kehebatan kearifan lokal, adat dan syarak, yang melekat pada diri perantau tersebut.

Masyarakat Minangkabau yang teguh memegang adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABSSBK) tetap saja dapat rukun dengan etnis, agama dan keyakinan berbeda. Majunya Sekolah Non Islam di Kota Padang, Kota Bukittinggi, Padang Panjang dan daerah lainnya adalah realitas kehidupan yang dapat dijadikan *best practise* terjaminnya kerukunan di Sumatera Barat. Tidak terjadinya gesekan sosial, atau konflik berarti, di Tanjung Basung Pasar Usang Padang Pariaman yang dihuni oleh pemeluk agama non Islam adalah fakta efektifnya hubungan adat dan budaya dalam merekat kerukunan. Tradisi *malakok*, mengaku bermamak kepada pemangku adat, dan ikut terlibat dalam sistem sosial kemasyarakatan adalah ikatan batin yang menjadi pengikat kerukunan.

Hal yang patut juga dihargai adalah terpelihara hubungan sosial dan ekonomi beberapa etnis, Nias, dan Tiongha di Pondok Padang adalah indikasi kuatnya jalinan kerukunan di Sumatera Barat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama di Sumatera Barat sudah mantap dan diyakini tetap akan baik, selama budaya, adat dan kepatutan sosial tidak diusik. Terganggunya kerukunan akhir-akhir ini lebih disebabkan adanya pihak yang tidak mengetuk pintu budaya.

Kehadiran transmigrasi di Kinali Pasaman Barat, di Sitiung Darmas Raya sebagai proyek negara yang kurang menyiapkan sisi budayanya menimbulkan efek terganggunya kerukunan. Dalam

batas-batas tertentu kearifan lokal dan kejujuran semua pihak adalah cara terbaik untuk merekat kerukunan yang tentunya untuk kemanfaatan semua pihak.

Akhirnya, patutlah semua berkaca diri, melakukan intropeksi dan mengawasi berbagai kemungkinan yang akan mengganggu kerukunan. Era keterbukaan informasi dan memang harus dijaga, jangan sampai kerukunan dirusak oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Menempatkan adat, budaya dan kearifan lokal sebagai tali penyambung kebersamaan diyakini dapat mencegah rusaknya kerukunan. Aturan hukum sebagai rambu-rambu kehidupan bersama mesti ditaati. Adat dan kearifan lokal sebagai realitas budaya haruslah dihargai. Insya Allah, kerukunan akan tetap terjamin. (DS.27122015.)



Penyerahan Sumbangan Pikiran FKUB Propinsi Sumatera Barat
Tentang Ahmadiyah kepada Kepala Kesbangpol 2016



Rapat Kordinasi FKUB Sumatera Barat bersama Kesbangpol
Propinsi Sumatera Barat 2016

SINKIL, MENGAWAL RUKUN

Nama Sinkel atau Sinkil sudah terkenal luas dalam khazanah sejarah Islam di Nusantara sejak abad ke 17 Masehi, melalui kiprah tokoh penting ulama nusantara Abd Al Rauf al-Sinkili, guru Syekh Burhanuddin Ulakan Pariaman, kini 13 Oktober 2015 lalu, nama Kota Sinkel menjadi populer di ruang media dan mendapat perhatian serius aparat negara, karena kasus yang membuat umat beragama prihatin berupa kerusuhan yang berkaitan dengan masalah pendirian rumah ibadah.

Terusiknya kerukunan hidup umat beragama di tanah air adalah ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI. Belum habis ketidaknyaman hati umat Islam dan perasaan sedih akibat kasus Tolikara di Papua pada tanggal 1 Syawal tepatnya saat umat Islam merayakan idul fitri 1436 H/17 Juli 2015, kini datang lagi masalah, satu hari jelang tahun baru hijriah, 30 Zulhijjah 1436H/13 Oktober 2015 timbul kasus yang mirip dengan Tolikara berupa pembakaran rumah ibadah dan kerusuhan antar umat beragama di bumi Serambi Mekah, tepatnya di Kabupaten Sinkil Propinsi Nanggro Aceh Darus Salam.

Keterangan resmi pemerintah dan aparat keamanan menyebutkan bahwa kasus Sinkil terjadi karena kesalahpahaman dan adanya kelompok yang tidak sabar menunggu penyelesaian Pemerintah Daerah. Apapun alasan dan faktor pemicu kasus Sinkel tersebut, yang pasti umat beragama tidak boleh terpancing dan termakan oleh provokasi dan informasi yang tidak jelas sumbernya. Mempercayakan penanganan dan penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku kepada pihak berwenang, pemerintah dan aparat penegak hukum adalah kewajiban yang harus dipatuhi umat beragama dan semua pihak. Aparat yang tegas dan hukum yang adil adalah cara terbaik untuk

menjamin keamanan dan kenyamanan umat beragama dan warga bangsa.

HARGAI KEMAJEMUKAN

Realitas kehidupan bahwa manusia hidup dalam satu dunia yang beragam adalah fakta yang tak mungkin dipungkiri. Kesiapan menerima adanya pluralistik, dalam makna kemajemukan, adalah bentuk pemuliaan terhadap sunnah kehidupan. Penyamaan pengertian pada konsep dasar pluralistik atau kemajemukan mesti terus disosialisasikan secara lebih luas, dewasa dan tegas. Pluralistik arti aslinya adalah mengakui, menerima dan menyambut dengan hati terbuka akan adanya keragaman. Beragam suku, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, budaya dan sosial kemasyarakatan adalah kenyataan hidup.

Setidaknya ada empat agama, - Islam, Yahudi, Nasrani, Shabiin dan Majusi, - yang disebut al-Qur'an sebagai bukti bahwa ada kemajemukan. Kemajemukan itu dimaksudkan untuk diajak, didakwahi dan dihibau agar memenuhi tuntutan iman dan amal saleh. (QS. al-Baqarah,62, Al-Maidaah,69, Al-Hajji, 17) Pemaknaan bahwa pluralistik secara jujur, adil dan realistis dapat mengeser pengertian pluralistik yang sengaja dikaburkan. Pengaburan pluralistik dalam artian kesamaan Tuhan, kesamaan keyakinan atau kesamaan agama adalah bentuk penyimpangan yang harus diluruskan dan itu sangat berbahaya jika tidak diluruskan.

Setiap umat beragama dalam hubungan sosial kemasyarakatan wajib menerapkan pluralistik atau kemajemukan, karena pluralistik adalah keharusan kehidupan. Sedangkan berhubungan dengan teologi, iman, ibadah dan keyakinan agama tidak dikenal istilah pluralistik atau kemajemukan, ia harus tunggal, utuh, mono dan setiap pemeluk agama wajib hukum meyakini sepenuh hati akan kebenaran dan kebaikan agamanya. Tidak boleh ada

sedikit jua keraguan akan kebenaran agama yang dianut. Meragukan iman sama dengan tidak beriman.

Kepastian pengertian pluralistik hanya pada aspek hubungan antar manusia adalah pemikiran yang akan memudahkan penerimaan tentang keragaman. Sedangkan pengertian pluralistik yang dipukul rata dalam semua sisi kehidupan, termasuk pada segi keyakinan, ibadah dan hubungan dengan Tuhan adalah penyesatan yang berdampak serius bagi pengikisan nilai dan pengaburan kesucian agama. Penghargaan pada kemajemukan hanya dapat berlangsung bila setiap individu pemeluk agama cerdas, jujur dan terbuka dalam memaknai konsep pluralistik atau majemuk itu sendiri. Pengaburan istilah pluralistik, ataupun pluralisme pada bidang *core* agama, yaitu iman, ibadah dan ajaran mutlak lainnya adalah bahaya yang merusak setiap agama. *Nauzubillahi minzalik.*

SENSITIVITAS KEAGAMAAN

Kehidupan rukun, damai dan toleransi akan dapat berjalan bila umat yang plural atau majemuk tadi dapat menempatkan diri secara bijak dan proporsional. Agama atau keyakinan apapun yang dianut oleh individu adalah perkara yang sensitif. Mudah-mudahan meledak emosi dan sifat anarkis yang melekat dalam diri pemeluk agama, satu di antara pemicunya adalah disaat bahagian sensitif, yaitu iman dan keyakinannya yang terganggu.

Sensitivitas iman atau keyakinan adalah mutlak adanya dalam beragama. Mereka yang tidak memiliki sifat sensitif dalam beragama, itu artinya mereka *dayus* atau lemah dalam beragama. Sifat mudah terpancing, tersinggung ataupun terprovokasi bila berkaitan dengan gangguan tentang iman atau agama adalah wajar dan malah suatu keharusan, karena itu menunjukkan kuatnya nilai iman mereka.

Masalah yang harus menjadi perhatian umat beragama adalah bagaimana menempatkan sifat dan perilaku sensitivitas beragama itu secara benar, tepat dan pada proporsi yang sesungguhnya. Dalam kearifan adat Minangkabau disebutkan dalam mewujudkan sifat sensitivitas keagamaan itu perlu diperhatikan, *raso jo pareso. Raso di baok naik, pareso di baok turun*. Artinya ada kearifan dan kesantunan sosial yang harus diperhatikan saat emosi keagamaan tersentuh. Saling mengerti antara satu pemeluk agama dengan penganut agama lain, tidak mesti dibahasakan juga. Bahasa tubuh, pola pikir, gerakan dan aktivitas keseharian dapat menjadi penunjuk kearifan budaya atau *raso jo pareso* itu.

Sejarah membuktikan bahwa teguhnya kebersamaan dan tidak adanya konflik yang berarti dalam komunitas yang majemuk pada dasarnya karena kuatnya jalinan sosial antar elemen yang beragam itu. Penghargaan pada ikatan budaya, kepatuhan pada kearifan lokal, adat dan sistem sosial adalah katup pengaman dan pengendali ledakan yang berasal dari terganggunya sensitivitas keagamaan. Menyiarkan agama, dan mendirikan rumah ibadah yang diawali dengan mematuhi ketentuan norma, adat dan sopan santun sosial diyakini dapat mencegah konflik.

ETIKA PENGEMBALAN

Agama Islam adalah agama dakwah. Setiap individu umat Islam berkewajiban menyampaikan kebenaran agamanya kepada semua orang yang belum mentaati atau masih berada di luar Islam. Kewajiban mendakwahi umat lain adalah tugas keagamaan yang melekat dalam setiap diri muslim. Hal yang sama juga berlaku pada agama misionaris. Setiap individu penganut agama misionaris berkewajiban membawa domba yang tersesat ke kandangnya kembali.

Dalam Islam dan Kristen dikenal istilah penggembala. Hadis Rasul mengajar, setiap kamu adalah penggembala (*ra'in*) yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap gembalaannya. Begitu

juga halnya dalam agama Kristen yang mewajibkan umatnya untuk mengembalikan domba-domba tersesat ke kandangnya. Artinya tuntutan agama masing-masing untuk berdakwah, menyiarkan, mengajarkan dan mempublikasikan ajaran agama mereka adalah kewajiban yang tugas hidup yang harus dimuliakan.

Dalam upaya pengawalan terhadap kerukunan, kewajiban dakwah atau misionaris harus tunduk pada hukum, norma, etika dan kepatutan sosial. Setiap agama sebagai pengusung moral pasti memberikan bimbingan tentang etika, tata cara dan sopan santun dalam berdakwah atau misionaris. Mematuhi hukum, moral, etika, ada istiadat dan kepatutan lingkungan dalam menjalankan misi dakwah atau misionaris dipastikan dapat menjamin nyaman dan toleransi yang produktif.

Kasus atau konflik yang berlatar agama di Indonesia hampir semua bermula ketika etika sebagai pengembala diabaikan. Tindakan melawan hukum, pembiaraan, pemaksaan kehendak, tidak mengindahkan norma, adat dan budaya lokal dalam menyiarkan agama atau menjalan misi iman atau mendirikan rumah ibadah adalah faktor-faktor pemicu timbulnya rusuh, konflik dan terganggunya kerukunan beragama. Sejarah kerukunan di Indonesia menunjukkan, konflik, rusuh dan disharmoni bermula ketika adat, norma dan sopan santun sosial dilanggar.

MULIAKAN KENYAMAAN

Tugas utama pemerintah adalah menjaga ketertiban, keamanan dan nyaman masyarakat. Tugas berat tersebut sulit terlaksana dengan baik, tanpa keterlibatan semua pihak, tak terkecuali umat beragama. Era reformasi yang baru berlangsung 15 tahun terakhir ini, telah menyisakan luka-luka sosial, yang oleh pengamat atau media dikatakan berlatar agama. Konflik di Ambon, kerusuhan di Tolikara, dan kasus yang tidak mendapat

ulasan berita luas, namun diduga dipicu soal agama, terakhir kasus di Sinkil, adalah pelajaran berharga tentang mahalnnya kenyamanan.

Umat beragama di Indonesia, adalah laksana satu jaringan langsung yang saling tersambung, penderitaan yang dihadapi satu daerah akan terasa pedihnya oleh saudara mereka di tempat lain. Keadaan seperti ini, berpotensi menimbulkan terganggunya kenyamanan bagi daerah yang sudah kuat kerukunannya. Terbuka dan transparannya komunikasi media cetak, audio dan televisi telah menjadi pupuk dan sekaligus racun bagi kerukunan.

Sungguh terasa mulia, mahal dan bernilainya kerukunan disaat ada gangguan atau konflik yang secara langsung mencabut rasa aman dan nyaman. Lebih-lebih lagi jika konflik, rusuh dan keributan itu berkaitan dengan agama atau simbol-simbol agama. Kenyamanan itu terasa mulia, mahal dan bernilai disaat ia tergeser oleh konflik. Sekali lagi, tidaklah patut agama yang mestinya mendorong manusia untuk damai, rukun dan hidup berdampingan, lalu oleh karena kesalahpahaman atau ada tujuan lain menjadi sumber kecemasan.

Akhirnya dapat dikatakan pengawalan kerukunan umat beragama dapat berlangsung dengan baik, jika umat beragama bisa memahami dengan baik dan benar akan makna sesungguhnya dari kemajemukan. Mengontrol secara tepat sensitivitas keagamaan, mematuhi etika pengembalaan (dakwah dan misionaris), dan menyadari mahalnnya kenyamanan adalah bahagian penting untuk memastikan terjaganya kerukunan hidup. Semoga semua pihak dapat mengarifinya untuk kerukunan yang langgeng dan dinamis. Amin. Ds. 01 Muharram 1437H/14 Oktober 2015.



Silaturahmi Kapolri Dengan Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat Sumatera Barat

TOLERANSI SEHAT

Minggu terakhir bulan Desember dan awal Januari setiap tahunnya menjadi event social penting dan strategis. Pada minggu terakhir Desember ada perayaan natal dan awal Januari ada pula penyambutan tahun baru masehi. Dua waktu penting ini memerlukan kedewasaan, toleransi dan kearifan semua pihak. Tema toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan secara arif terus disuarakan demi keutuhan bangsa, menjaga stabilitas dan kenyamanan public.

Menyadari kemajemukan dan keragaman bangsa adalah nilai positif yang diharapkan dapat berkontribusi bagi penciptaan suasana yang damai dan saling menghargai. Bersamaan dengan itu menegaskan identitas diri, dan keyakinan iman adalah unsure pokok yang harus dijaga dengan baik dan benar. Memelihara ajaran iman dan moral agama sesuai makna, tujuan dan pesan sucinya adalah bahagian utama untuk menciptakan kelurusan pemahaman dan kebenaran suatu keyakinan. Memahami, mengerti dan menjelaskan secara lugas apa artinya toleransi, adalah wujud dari toleransi yang sehat, dinamis dan konstruktif. Penjelasan yang kabur, mengambang atau dibelokkan adalah potensi terselubung yang akan merusakkan hidup saling memuliakan, dan toleransi yang positif. .

MENCEGAH KONFLIK & TOLERANSI SEHAT.

Erich Fromm² dalam bukunya, *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, menuliskan bahwa konflik dan kekerasan muncul akibat terhalangnya seluruh kehidupan, terhambatnya spontanitas, tersumbatnya pertumbuhan dan

² Lihat Erich Fromm, *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta, Januari 2000

ungkapan kemampuan-kemampuan inderawi emosional dan intelektual manusia. Ketika sebagian orang dilarang untuk mengeluarkan pendapat mereka, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan, pemenuhan kehidupan sehari-hari seperti makanan, pendidikan dan kesehatan, dari sinilah akan muncul kekerasan yang acapkali berujung pada perkelahian dan kematian. Dengan demikian, menurutnya, karakter-karakter individu seperti sifat agresif, egois, individualis yang merupakan pemicu timbulnya kekerasan sangat ditentukan oleh lingkungan pembentuk serta pengalaman hidup. Lebih jauh, Erich Fromm berpendapat, akar konflik dan kekerasan, tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Ia justru dibiarkan tumbuh dan meluas di masyarakat, sehingga makin sulit diselesaikan. kekerasan kini telah menjadi modus yang jitu untuk memecahkan masalah. Tidak saja pada tingkatan akar rumput (*grassroot*), tetapi juga pada elit-elit politik.

Tentang arti penting mencegah konflik, lewat pemaknaan yang tepat dan lurus terhadap toleransi adalah kebutuhan mendesak. Sejarah mencatat bahwa sejak awal toleransi sehat itu sudah dipraktek pendiri bangsa (*founding father*) seperti yang ditemukan dalam document pendirian negara. Dalam konstitusi, para pendiri bangsa sesungguhnya telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dan teguh, tidak saja terkait sistem bernegara, tetapi juga terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berbhinneka tunggal ika. Adapun prinsip dasar yang diletakkan adalah negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang ditetapkan dalam rumusan UUD 1945 dan Pancasila. Hal itu berarti hakekat kebangsaan Indonesia adalah memberikan ruang dan kesempatan kewilayahan, kedaerahan, golongan, keagamaan yang semakin dewasa dan mandiri dan harus bertolak dari fakta bahwa memang wilayah negara ini sangat luas, yang di dalamnya hidup masyarakat yang terdiri berbagai suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya.

Penerimaan satu kelompok, etnis, agama dan suku atas kelompok lain adalah fakta dan realitas yang sudah menyejarah. Keikhlasan dan kearifan pendahulu dalam memberikan ruang bagi perbedaan dan keragaman dimulai dengan penerapan toleransi yang sehat, dinamis dan konstruktif.

TOLERANSI MERAWAT SIMBOL KEAGAMAAN

Secara bahasa, toleransi bermakna sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi berasal dari bahasa *tolerance* (Inggris) atau *tolerantia* (Latin) berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama.³

Secara mendasar, prinsip-prinsip toleransi tersebut merupakan “turunan” dari prinsip dan pandangan tentang multikulturalisme. Multikulturalisme diartikan sebagai pemikiran yang merujuk pada pemahaman bahwa masyarakat (Indonesia) tidak hidup dalam satu macam budaya saja. Prinsip ini tidak sekedar memahami bahwa setiap masyarakat pada hakekatnya adalah beragam, tetapi juga prinsip ini memaknai bahwa dalam setiap keberagaman masyarakat (Indonesia) ada sebuah kesetaraan, dan karenanya diperlukan sebuah kesadaran penuh masyarakat untuk bisa mencapainya. Jika pemahaman multikulturalisme dapat tersosialisasikan dengan baik, maka sebagai hasilnya akan tercipta suatu peradaban yang juga melahirkan toleransi, demokrasi, kebajikan, tolong menolong, tenggang rasa, keadilan, keindahan, keharmonisan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Sebaliknya, tanpa pemahaman multikulturalisme, konflik sosial yang

³ Binsar A. Hutabarat, ”Kebebasan Beragama VS Toleransi Beragama”, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/25/opi05.html>

destruktif akan terus menjadi suatu ancaman serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa.

Secara normative Islam mengajarkan bahwa kemajemukan, keanekaragaman etnis, ras, warna kulit, bahasa, adat istiadat, paham, kepercayaan dan penganut agama, adalah suatu kenyataan, menjadi *sunatullah*, yang tidak seorang pun dapat menghapuskannya. Sebagaimana juga tertuang dalam Al -Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah memberi kebebasan untuk menganut suatu kepercayaan atau agama tertentu dan melarang memaksa orang lain untuk menganut suatu kepercayaan atau agama tertentu serta melarang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam.

Dalam sejarah Islam, toleransi dan kerukunan hidup umat beragama bahkan telah dipraktekkan Rasulullah SAW melalui kepemimpinan beliau terhadap masyarakat yang majemuk dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Piagam Madinah memuat pokok-pokok kesepakatan antara lain (1) Semua umat Islam, walaupun berasal dari banyak suku, merupakan satu komunitas, (2) Hubungan antar komunitas Islam dengan non Islam didasarkan atas prinsip-prinsip: bertetangga baik, saling membantu dan saling menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama.

Kehebatan ajaran dan sejarah toleransi itu, kemudian sering diciderai oleh kesalah pengertian dalam memosisikan toleransi. Potensi laten yang menyebabkan terganggunya toleransi dan mengundang hadirnya konflik, serta keresahan antar agama adalah ketika identitas dan symbol religiusitas tidak ditempatkan secara wajar dalam bertoleransi. Penghargaan dan pemuliaan pada identitas dan symbol keagamaan adalah cara tepat untuk menimbulkan toleransi yang sehat. Ketika identitas keagamaan dan symbol-simbol keagamaan dibiarkan tidak terurus apalagi

kalau salah dalam menggunakannya, itu berpotensi mengundang konflik. Bagi umat beragama ketegasan dan kejelasan pemihakan terhadap identitas dan symbol keagamaanya, tidak dapat ditawarkan. Pedoman tegas Rasul tentang larangan *tasyabbuh* (menyerupai, identik, mirip) terhadap budaya dan pola hidup adalah harga mati yang harusnya dihormati oleh umat lainnya.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dikatakan *man tasyabbaha bi qaumin fabuwa minhumi*, siapa saya menyerupai atau meniru gaya hidup, pakaian dan symbol kaum atau kelompok tertentu, maka ia adalah bahagian dari kelompok atau agama itu. Dalam konteks ini maka untuk mengembangkan toleransi yang sehat diperlukan kesadaran semua pihak untuk tidak memaksakan symbol agama pada yang beda iman. Dalam makna ini pula dapat dikatakan bahwa menjaga identitas masing-masing agama adalah cara tepat untuk menerapkan toleransi sehat.

Akhirnya patut disarankan, khususnya umat beragama yang akan menghadapi perayaan natal dan tahun baru, untuk mensosialisasikan toleransi sehat. Toleransi saling menghargai, seperti halnya hidup bertetangga yang sehat. Saling tegur sapa, saling menjaga keamanan, tidak perlu memasuki rumah tetangga, tidak elok pula meminjam pakaian, symbol-simbol social dan ritual tetangga, karena ia butuh saat itu, lagi pula kita punya identitas, pakaian dan corak tersendiri. Toleransi sehat adalah hidup dalam satu rumah besar, dalam kamar khusus masing-masing, dengan kebiasaan, adat, iman dan corak hidup berbeda. Semoga diarifi adanya. Tks. Ds.18122014.

TOLERANSI MENYESATKAN

Gila!!!! Ini bukan kali pertama Islam dilecehkan dengan dalil budaya. Setelah sandal dicetak dengan lafazdh Allah...kemudian terompet dengan kerta al-Qur'an bahkan di Glodok terompet langsung dicetak ayat al-Qur'an.. kemudian adzan lagi geraja dalam acara Natal di Kupang. Terjadi pada tanggal 3 Januari 2016 tari Bali di atas sajadah ... apa ngak bisa digunakan alas lain selain sajadah... gunakan karpet biasa saja apa ngak bisa..Ini terjadi di Kemenag Kanwil DKI Jakarta pada HAB ke 70.. ini bukan hoax, ini bukan provokatif, tetapi adalah nyata...

Pernyataan di atas adalah salah satu WA yang disampaikan ke penulis terkait dengan berbagai kejadian yang meresahkan, mengerahkan dan bisa jadi memisahkan antar elemen umat, yang sesungguhnya berasal ketidakarifan tokoh atau penentu kebijakan pemuka agama, bisa jadi karena kesembronoan pihak-pihak yang punya maksud tidak baik bagi keharmonisan bangsa. Siapapun dan apapun iman anak bangsa ini hendaknya mengerti dan paham betul apa itu makna dari toleransi.

Dalam bangsa yang majemuk atau beragama ini semua orang, seluruh pihak, pemuka dan penganut agama hendaknya sadar dan memprilaku dalam hidupnya bahwa toleransi adalah saling menghargai bukan dalam makna harus mengakui kebenaran agama yang berbeda. Toleransi adalah menerima perbedaan bukan menyamaratakan agama, keyakinan dan simbol-simbol suci antar agama yang diciptakan punya dan pesan yang berbeda. Toleransi sejatinya adalah memurnikan hubungan antara agama yang berbeda bukan justru mencampuradukan iman, simbol dan nilai antar agama .

Tumbuhnya kehidupan yang tolerans pastilah bermula kesediaan menerima adanya keragaman. Keragaman, dalam bahasa populer disebut *plural*, *pluralitas* dan *pluralistik* adalah keniscayaan yang melekatkan dalam komunitas umat mana saja. Memaksakan dan atau mengubah keragaman dalam bentuk keseragaman, atau *pluralisme*, adalah ancaman laten yang akan mendatangkan kebinasaan dan kehancuran bangsa. Keseragaman, tanpa menghargai adanya perbedaan adalah pertanda kematian budaya. Manusia hidup bukan dalam ruang hampa budaya. Agama dan budaya apapun diyakini mewariskan keberagaman dalam nafas kerukunan.

Pentingnya kerukunan begitu terasa ketika kemajuan teknologi, informasi, transportasi dan mobilisasi manusia begitu cepat, perasaan nyaman dan tenang tidak akan terusik bila kerukunan dapat dipastikan adanya. Perlu disadari semua pihak bahwa tercapai kenyamanan hidup berbangsa bila kerukunan tertanam kuat dalam diri setiap diri anak bangsa. Bangsa besar seperti Indonesia menyadari bahwa tanpa kerukunan kesatuan wilayah, kesatuan bahasa dan semua sendi-sendi kehidupan akan goyah dan bukan tidak mungkin akan tercabik dan robek. Konflik dan permusuhan antar kelompok, agama, dan aliran paham yang terjadi belakangan ini adalah guru berharga untuk merajut benang kokoh kerukunan.

Dalam halnya di daerah yang cukup kuat kerukunan dan toleransi tumbuh dan menjadi nafas kehidupan pada umumnya ketika budaya dihargai sebagaimana mestinya. Realitas sejarah membuktikan bahwa efektif dan konstruktifnya kerukunan beragama di Sumatera Barat adalah didasarkan pada masih kuatnya pengaruh norma kearifan lokal suku bangsa Minangkabau yang dirumuskan dalam adigium *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK). Filosofi dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau – baca Sumatera Barat - ini oleh pemerintah daerah telah dijadikan sebagai

landasan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang pada RPJMD Sumatera Barat. Disamping itu, secara cultural di Sumatera Barat keberadaan agama lain sudah lama diakui dan bahkan sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kerukunan hidup umat beragama bagi orang Minang itu riil dan sudah menyejarah adanya, misalnya dapat ditemukan dengan nama-nama daerah seperti, kampung pondok, kampung Cina, kampung Nias dan kampung etnis lainnya di berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat.

Umat beragama lain – umat Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha- tentu harus dapat menyadari dan memahami arti penting sejarah dan fakta kerukunan di Sumatra Barat. Realitas menunjukkan bahwa keberadaan umat minoritas tidak pernah dipersoalkan oleh umat Islam Minangkabau, bahkan dalam keseharian antar umat beragama itu telah hidup dengan rukun. Adanya gesekan dan konflik lokal antar penganut agama di tingkat masyarakat pada dasarnya tidaklah dipicu oleh masalah iman. Akan tetapi, lebih didasarkan pada penguasaan sumber daya ekonomi dan atau kecemburuan sosial yang oleh mereka yang memiliki kepentingan dijadikan pemicu konflik.

WASPADAI TOLERANSI MENYESATKAN

Dampak luas keterbukaan informasi, khususnya media sosial, seperti facebook, twitter, WA dan sejenisnya harus diakui telah menjadikan kasus-kasus lokal begitu cepat menyebar dan tidak jarang diberi pula bumbu-bumbu yang kebenarannya diragukan. Kekurangan cerdas menyikapi informasi atau ketersinggungan emosi yang tak terkontrol telah mendatangkan tanggapan yang tidak baik, marah, menyumpah dan kadang mendorong lahirnya pernyataan provaktif terutama bila berita atau gambar dalam bentuk audio yang ditampilkan berkaitan dengan agama atau iman agama tertentu.

Pencerdasan terhadap penggunaan media sosial dan disejalankan dengan kontrol dari pihak pemerintah adalah salah satu yang diharapkan dapat mengurangi penyesatan informasi yang berakibat terhadap pengrusakan keharmonisan dan lebih dari itu bisa menjadi ancaman laten hancurnya toleransi yang sehat di masyarakat beragama. Penyelewengan arti dan maksud toleransi pada penyamaan, pencampuradukan dan itu dilakukan dalam upacara ritual agama yang tidak sama, seperti mencampurkan adukan antara ritual nyanyian Natal dengan kumandangan suara azan adalah penyesatan dan penistaan kedua agama. Makna nyanyian Natal adalah ibadah (ritual) milik agama Kristen dan Katolik, sedangkan azan adalah panggilan ibadah shalat umat Islam.

Toleransi yang salah kaprah atau memang ada yang sengaja “menangguk di air keruh” memperburuk keadaan kerukunan antar umat beragama haruslah segera diwaspadai dan diambil tindakan nyata oleh pihak yang bertanggung jawab, seperti Kementrian Agama yang terus meneruskan melakukan komunikasi dan pembimbingan toleransi yang sehat, dinamis dan saling memahami substansi toleransi. Aparat keamanan diharapkan dapat melakukan pencegahan apapun bentuk aktivitas, atas nama seni dan budaya sekalipun, haruslah dalam batasan hukum, moral dan kepatutan sosial.

Tokoh agama, mubaligh, missonaris, pendidik dan siapapun pembimbing umat diminta benar-benar diharapkan mempunyai intelektual yang memadai, memiliki akal sehat, hati jernih dan jiwa besar dalam memberikan bimbingan, wejangan, nasehat dan khotbah agama masing-masing, sehingga wajah putih, jernih dan suci agama tidak membawa kekeruhan individu anak bangsa, yang dampaknya menjadikan bangsa ini akan mudah tercabik, *nauzubillahi minzalik*.

Umat yang memiliki semangat beragama yang baik, yang peduli dan memiliki rasa (*zouq*) beragama (sensitivitas batiniah) agama yang lurus diyakini akan terus menyuarakan kekeliruan, penyimpangan yang tak disengaja, apalagi yang memang disengaja untuk melecehkan amalan, ritual, simbol agama yang diyakini suci oleh pemeluknya. Semua hendaknya percaya pada hukum kehidupan, melecehkan dan meremehkan keyakinan orang lain, itu berarti justru kita sedang menghinakan iman kita sendiri, kita berlindung dari Allah SWT yang terjatuh kepada orang yang menghina agama.

Akhirnya semua pihak dihimbau untuk beragama dengan hati jernih, akal sehat dan ilmu yang memadai. Iman yang dikukuhkan dengan ilmu yang kuat, akal cerdas dan jiwa bersih dipercayai akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan bangsa ini. Semoga siapapun dengan apapun iman yang dimilikinya berhenti membuat agenda kerja yang meremehkan atau melecehkan iman, ritual dan simbol agama. Alasan ekonomi, politik kekuasaan atau apapun alasannya tidaklah bisa diterima akal sehat kalau itu akan menjadi sumber penyesatan makna toleransi. Sekali lagi, perlu ditegaskan toleransi adalah saling menghargai, bukan menyamaratakan, mencampuradukan atau menjadikan agama satu harus mengikuti budaya agama lain. Cerdaslah melihat dan memahamkan, menyamakan agama, itu berarti sama dengan tidak beragama. Mencampuradukkan (*sinkritisme*) agama adalah kemusrikan, yang tidak akan ada ampunan untuk perbuatan mencampuradukkan agama. Semoga kita semua menyadarinya, dan pemimpin agama, tokoh, pemuka, pengiat dan pemimpin bangsa ini lebih arif dan hati-hati. Amin. Ds. 06012016.

INFORMAL LEADER

DAN KERUKUNAN BANGSA⁴

Kerukunan adalah prasyarat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kerukunan adalah keniscayaan yang tak mungkin ditawar lagi bagi kebaikan hidup bersama. Bangsa Indonesia yang majemuk dan tersebar dalam ribuan pulau dengan ratusan suku bangsa, bahasa dan budaya lokal tidak akan bisa bersatu tanpa adanya kerukunan. Kerukunan adalah juga modal bangsa yang sangat mahal dan harus dapat dirawat oleh setiap komponen dan anak bangsa.

Pentingnya kerukunan begitu terasa ketika kemajuan teknologi, informasi, transportasi dan mobilisasi manusia begitu cepat, perasaan nyaman dan tenang tidak akan terusik bila kerukunan pasti adanya. Perlu disadari semua pihak bahwa tercapai kenyamanan hidup berbangsa bila kerukunan tertanam kuat dalam diri setiap diri anak bangsa. Bangsa besar seperti Indonesia menyadari bahwa tanpa kerukunan kesatuan wilayah, kesatuan bahasa dan semua sendi-sendi kehidupan akan goyah dan bukan tidak mungkin akan tercabik dan robek. Konflik dan permusuhan antar kelompok, agama, dan aliran paham yang terjadi belakangan ini adalah guru berharga untuk merajut benang kokoh kerukunan.

Menyadari strategisnya kerukunan berbasis ketahanan wilayah maka, Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) melalui pusat kajian strategis menggelar diskusi interaktif dengan tokoh-tokoh lintas agama, pemerintah daerah dan organisasi sosial

⁴ Rumusan Diskusi Pusat Kajian Strategis LEMHANAS dengan Tokoh Lintas Agama dan PEMDA Propinsi Sumatra Barat, Rabu, 15 Mei 2013 di Ruang Rapat SETDA Kantor Gubernur Sumatera Barat.

kemasyarakatan Sumatera Barat, pada hari Rabu, 15 Mei 2013 bertempat ruang SETDA Kantor Gubernur Sumatera Barat, dalam topic *Pemberdayaan Tokoh Informal Dalam Mewujudkan Kerukunan*. Diskusi yang dihadiri dan dipimpin oleh Deputi Pusat Kajian Strategis berjalan hangat, konstruktif dan sedikit disertai gesekan pemikiran antar tokoh lintas agama dan ormas Islam yang hadir pada saat itu.

Pokok pikiran yang cukup luas mendapat porsi pembahasan adalah isu tentang peran tokoh informal dalam menjaga kerukunan serta upaya bersama menjaga kerukunan yang sudah baik di Sumatra Barat selama ini. Pentingnya pemberdayaan tokoh informal dalam mewujudkan kerukunan bukanlah sekadar basa-basi, akan tetapi memang riil adanya. Tokoh informal yang hadir karena charisma dan kewibawaannya telah menunjukkan eksistensinya dalam menyampaikan, mendukung dan mensosialisasikan ide, gagasan dan program tokoh formal (Pejabat Pemerintah dalam semua tingkatannya). Point penting yang mengemuka dalam pemberdayaan tokoh informal ini adalah belum maksimalnya tokoh formal memberdayakan tokoh informal. Ungkapan yang dipakai adalah bahwa tokoh informal tak obahnya seperti pemadam kebakaran, yang dimanfaatkan ketika ada masalah.

Padahal pengalamanpun menunjukkan bahwa pada daerah konflik, tokoh informal adalah *key point* (pintu masuk) bagi tokoh formal dan aparat keamanan dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan berisiko tinggi itu. Kasus Poso, Mesuji di Lampung, pembangunan jembatan Suramadu adalah bukti nyata hadirnya dan perntingnya dukungan tokoh informal. Dalam kasus Sumatera Barat misalnya belum berhasilnya perluasan wilayah Kota Bukittinggi adalah karena hambatan belum satunya pendapat tokoh informal.

Sumatra Barat sebagai satu wilayah dari NKRI telah memberikan perhatian dan dukungan memadai pada masalah yang berkaitan dengan kerukunan. Pemerintah daerah propinsi, kabupaten kota telah menindaklanjuti berlakunya Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pengaturan kehidupan beragama dan pendirian rumah Ibadah. Bersamaan dengan itu pemerintah daerah juga aktif mendorong dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat propinsi dan kabupaten kota, meskipun 4 kabupaten belum lagi berdiri FKUB.

Fakta lain yang harus diakui adalah efektif dan konstruktifnya kerukunan beragama di Sumatera Barat didasarkan pada masih kuatnya pengaruh norma kearifan lokal suku bangsa Minangkabau yang dirumuskan dalam adigium *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS SBK). Filosofi dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau – baca Sumatera Barat - ini oleh pemerintah daerah telah dijadikan sebagai landasan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang pada RPJMD Sumatera Barat. Disamping itu, secara cultural di Sumatera Barat keberadaan agama lain sudah lama diakui dan bahkan sudah menjadi bahagian dari masyarakat itu sendiri. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kerukunan bagi orang Minang itu riil dan sudah menyejarah adanya, misalnya dapat ditemukan dengan nama-nama daerah seperti, kampung pondok, kampung cina, kampung nias dan kampung etnis lainnya di berbagai kota kabupaten di Sumatera Barat.

Islam sebagai identitas keagamaan, kebudayaan dan jati diri masyarakat Minang pada dasarnya mendorong umatnya untuk menjaga kerukunan. Keragaman hidup, jenis kelamin yang berbeda, suku bangsa yang tidak satu, bahasa yang tidak sama bukanlah hambatan untuk rukun, malah itu adalah modal kerukunan. (*QS. Al-Hujuraat, 13 dan al-Ruum,22.*) Islam dengan tegas dan jelas melarang umatnya untuk mencela, meremehkan dan melecehkan orang, kelompok dan agama lain. (*QS. Al-*

Hujuraat 11). Islam melarang umatnya untuk memaksa orang lain ataupun umat lain untuk menganut kepercayaannya. (*QS. Al-Baqarah, 256*). Secara tegas dapat dikatakan bahwa kerukunan adalah niscaya adanya dalam Islam.

Umat beragama lain – umat minoritas di Sumatera Barat Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha- tentu harus dapat menyadari dan memahami arti penting kerukunan di Sumatra Barat. Realitas menunjukkan bahwa keberadaan umat minoritas tidak pernah dipersoalkan oleh umat Islam Minangkabau, bahkan dalam keseharian antar umat beragama itu telah hidup dengan rukun. Adanya gesekan dan konflik lokal antar penganut agama di tingkat masyarakat pada dasarnya tidaklah dipicu oleh masalah iman. Akan tetapi, lebih didasarkan pada penguasaan sumber daya ekonomi dan atau kecemburuan sosial antar mereka.

Pada bahagian tanggapan diskusi tersebut muncul pemikiran cerdas yang menjelaskan bahwa berkenaan dengan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat sudah final dan diyakini akan tetap terjaga bila elit dan tokoh umatnya tetap konsisten pada negara bangsa (*nation building*) yang sudah diperjuangkan semua komponen umat beragama. Penelitian dan pengalaman menunjukkan adanya gesekan kecil antar umat beragama di daerah, khususnya wilayah perbatasan Sumatra Barat dengan Sumatra Utara dan Bengkulu adalah disebabkan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama kepada umat yang sudah beragama, bantuan sosial disertai misi iman dan beberapa modus operandi lainnya.

Kondisi kerawanan sosial yang mungkin terjadi pada daerah perbatasan Minangkabau, Pasaman Barat berbatasan dengan Sumatra Utara, Lunang Silaut berbatasan dengan Bengkulu, Darmasraya berbatasan dengan Propinsi Jambi, adalah potensi ancaman kerukunan yang harus diwaspadai oleh semua tokoh informal dan pemerintah daerah. Keterbukaan, kejujuran dan

kedewasaan tokoh lintas agama adalah modal sosial yang harus dibangun secara simultan dan berkesinambungan. Dialog terbuka, duduk semeja, saling memahami antar tokoh-tokoh lintas agama lewat jalur FKUB adalah cara bijak yang harus dikembangkan.

Upaya menegakkan hukum, aturan perundang-undangan, mentaati sistim budaya, adat lingkungan oleh tokoh dan pemuka agama adalah cara jitu untuk memastikan kerukunan. Menciderai hukum formal dan hukum adat adalah bahaya besar yang akan dapat mengancam kerukunan itu sendiri. Karena, siapapun yang datang ke Sumatra Barat akan mudah sosialisasinya dan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat bila agama, adat dan hukum budayanya dipatuhi. Meremehkan agama, adat dan tradisi masyarakat adalah menyalakan api permusuhan yang akan membakar jagat kerukunan.

Kerukunan di tingkat elit yang sudah baik dan aman ini tentu harus disampaikan ketingkat *grassroot* (umat). Kesulitan umat Kristiani dan umat lainnya mendirikan rumah ibadah, kuburan dan pelaksanaan tradisi keagamaannya, hendaknya harap juga dimaklumi, karena wajar dan lumrah siapapun ingin mempertahankan orisinilitas peradaban luhur yang diyakininya sejak awal kehidupan. Kearifan lokal mengajarkan jika orang masuk dengan tahu dan keluar dengan izin, maka konflik dan pertikaian tidak akan pernah ada. Singkat kata, mestinya jangan ada lagi tirani mayoritas dan dictator minoritas. Yang ada itu adalah mayoritas yang mengayomi dan melindungi minoritas, lalu minoritas yang menghargai mayoritas. Selamat hidup rukun dan harmoni dalam kebersamaan indah saling menghargai. Ds. 16052013.

KERUKUNAN DINAMIS⁵

Sejarah kerukunan telah ditorehkan di Sumatera Barat, baru pertama kali terjadi jalan pagi star dan kembali di halaman kantor gubernur Sumatera Barat, Sabtu, 21 Desember 2013 yang dikenal dengan jalan santai kerukunan yang jumlah peserta mencapai lebih 30 ribu orang. Jalan pagi yang mengusung tema Kerukunan dengan diikuti umat lintas agama, tokoh-tokoh agama, keluarga besar Kementrian Agama se Sumatera Barat, masyarakat Kota Padang, dengan dilepas Menteri Agama RI Suryadharma Ali, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Walikota Padang, Rektor IAIN Imam Bonjol, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kepala Kantor Kementrian Agama Propinsi dan kabupaten kota se Sumatera Barat adalah moment bersejarah bagi pengokohan kerukunan beragama di ranah Minangkabau, Sumatera Barat.

KERUKUNAN PILAR BANGSA

Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai sebuah bangsa yang multikultur memiliki kultur dan budaya yang berbeda, dan plural (*pluralistic society*) ini adalah sebagai bukti *sunnah kauniyah*, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta. Jika Allah SWT berkehendak untuk menjadikan umat manusia ini menjadi satu suku bangsa yang sama bahkan dengan bentuk yang seragam maka tentu tidaklah akan disaksikan keberagaman yang ada ini. Semua orang yang beragama disebut juga dengan umat beragama yang hidup di Negara Indonesia ini, sesuai Undang-

⁵ Refleksi dari sambutan Menag RI Suryadarma Ali, pada Acara *Silaturahmi Tokoh Agama dan Menag RI*, Jum'at, 20 Desember 2013 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat dan ditegasnya lagi pada Sambutan Melepas *Gerakan Jalan Kerukunan Umat Lintas Agama* dan keluarga besar Kementrian Agama Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu, 21 Desember 2013.

Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dan bersesuai pula dengan deklarasi hak asasi manusia internasional (*The Declaration of Human Rights*) adalah dijamin dalam kehidupan mereka untuk memeluk, menganut agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

Implementasi dari jaminan kebebasan beragama diperkuat dalam landasan yuridis terakhir tentang kerukunan umat beragama di Indonesia adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Spirit dari aturan hukum tersebut tidak lagi didasarkan atas kemauan untuk membangun harmoni hubungan antarumat beragama saja, tetapi lebih pada keinginan seluruh persoalan sosial, kebudayaan, pendidikan dan agama harus menghadirkan peran negara sebagai regulator, stabilikator bagi kerukunan.

Karakteristik bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, terdiri atas berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda, baik suku, agama, budaya maupun ras mengharuskan mereka bisa hidup berdampingan, rukun dan harmonis. Di sisi lain, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, dan hal ini masih tetap bertahan sampai kini, di tengah-tengah arus modernisasi dan globalisasi ini. Harus diakui, dalam sebuah masyarakat yang majemuk memang tidak mudah menjaga harmoni atau kerukunan tersebut, karena masing-masing kelompok memiliki keyakinan, pendapat dan aspirasi yang bervariasi, yang bisa menimbulkan konflik di antara mereka.

Sementara itu, hidup dalam suasana kerukunan adalah kebutuhan semua orang. Hidup rukun adalah dambaan dan harapan semua orang. hidup rukun adalah pertanda adanya kesejahteraan hidup. Hidup rukun adalah bahagian penting dari

peradaban modern. Rukun dan kerukunan adalah keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh semua elemen bangsa. Kerukunan adalah pilar pembangunan dan ketahanan bangsa. Tanpa kerukunan bangsa akan hancur berkeping-keping dan bukan tidak mungkin akan habis riwayatnya.

Ikhthiar dan kerja keras menghadirkan kerukunan dapat dimulai dari menghargai keragaman. Keragaman dan keberagaman adalah *sunatullah* kehidupan. Alam diciptakan Allah SWT dalam keragaman. Tak ada artinya kehidupan tanpa adanya keragaman. Ada siang, ada malam, ada laki-laki ada perempuan, ada susah ada senang, ada Islam ada non Islam, ada baik ada buruk, dan banyak lagi keragaman dan keberpasangan yang harus tunduk dalam hukum keragaman itu sendiri.

Takdir keragaman wilayah yang begitu luas dan bermacam ragam keadaannya lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil adalah kekuatan yang tentunya akan besar sumbangannya bagi kerukunan bangsa Indonesia. Penduduk yang berjumlah besar, bersuku-suku lebih dari 170 ribu suku, bahasa lebih dari 700 bahasa daerah dengan dialek lokal yang ribuan, keragaman warna kulit, budaya, seni adalah pupuk kerukunan bila dapat dijaga dalam bingkai kesatuan dan kebersamaan.

Penghargaan terhadap keragaman adalah syarat mutlak adanya kerukunan. Kerukunan akan dengan mudah tercederai bila penghargaan terhadap keragaman tidak muncul dalam sistim sosial kemasyarakatan. Disharmoni, konflik dan kisruh sosial akan mudah terjadi bila pemeliharaan terhadap keragaman tidak terjaga dengan baik. Api konflik tidak akan mudah membesar bila pemuliaan terhadap keragaman riil adanya dalam setiap sendi-sendi kehidupan komunitas.

Konflik adalah lawan dari rukun. Konflik tidak perlu dicemaskan, karena konflik pada dasarnya muncul ketika keragaman tidak lagi dihargai setulusnya. Penghargaan terhadap keragaman bukanlah

sesuatu yang dipaksakan dan diseragamkan. Keragaman hendaknya dihargai menurut apa adanya. Menghargai keragaman agama tertentu bukan berarti meyakini atau mengamalkan semua agama. Sesama pemeluk agama hendaknya menghargai pihak pemeluk agama lain, apa adanya menurut agama yang diyakininya. Menghargai keragaman bukanlah dimaksudkan penyeragaman.

Konflik tidak perlu ditakuti, yang harus dilakukan adalah mencegah timbulnya bara konflik. Konflik awalnya kecil, saat api konfil kecil segera padamkan, jangan biarkan ia merembes jauh ke lahan kehidupan lainnya. Konflik itu lazimnya berhadapan dengan kerukunan. Kerukunan yang lebih dewasa dan lebih lama bila ia dikelola dengan spirit dinamis. Dinamis dalam makna kerukunan adalah menempatkan konflik, disharmoni sebagai ancaman bersama yang harus dicegah secara bersama pula.

INDONESIA NEGARA PALING RUKUN.

Potensi dan realitas bahwa masyarakat dan negara Indonesia adalah bangsa yang paling di rukun di dunia, bukanlah isapan jempol dan pernyataan subyektif. Pencermatan yang adil, berimbang dan rasional terhadap kondisi sosial kehidupan bangsa yang serba multi, kemajemukan yang luas dan besar, keluasan wilayah dan keberagaman agama, ras, suku, bangsa, bahasa, budaya, seni yang terawat sedemikian lama adalah bukti bahwa kerukunan telah menjadi jati diri bangsa.

Kerukunan hidup interen umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah yang sudah berjalan selama ini adalah hasil perjuangan *founding father* dalam kurun waktu yang sudah berabad-abad lamanya. Terciptanya kerukunan seperti yang dirasakan sampai saat ini, bukanlah usaha sebentar dan mudah. Pemerintah, umat beragama, masyarakat bangsa telah sama-sama memberikan kontribusi yang tidak kecil. Saling memberi ruang dan mengalah selangkah untuk kepentingan

kerukunan dan kebersamaan adalah kunci sukses kerukunan di negeri ini, sebagai contoh baca kembali bagaimana ketulusan kerukunan yang dilakukan tokoh umat dan pimpinan bangsa dalam sejarah pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta.

Kerukunan dinamis yang terus diperjuangkan pada dasarnya adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, agama dan atau kelas sosial lainnya. Kerukunan dinamis bukanlah menyamaratakan hak dan kewajiban antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Begitu juga, tidak pula memberikan hak-hak khusus kepada satu kelompok dengan mengabaikan kelompok lain, akan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, adil dan proporsional. Kerukunan dinamis mengharamkan tirani minoritas dan dictator mayoritas.

Kerukunan dinamis adalah juga memberikan jaminan akan kebebasan melakukan aktifitas keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya satu kelompok tanpa mengganggu nilai, martabat dan harga diri kelompok lain yang berbeda. Kerukunan dinamis dapat dilakukan bila “wasit” (pemerintah, tokoh agama dan pengiat civil society) memiliki sikap jujur, ikhlas dan tidak menjadi sumber masalah.

Kekuatan utama yang dapat menciptakan dan melanggengkan kerukunan dinamis adalah negara dengan segala sistem yang dimilikinya. Penetapan hari libur nasional setiap tanggal dan hari-hari besar semua agama adalah modal kebijakan yang harus dapat dikawal secara produktif. Pengakuan dan jaminan negara terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan yang sudah ditetapkan sejak negara ini berdiri – seperti yang dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 dan undang-undang dasar 1945 – adalah konstitusi dasar yang harus dilaksanakan oleh aparat negara secara benar dan bertanggung jawab.

Symbol kerukunan dinamis yang diperlihatkan oleh symbol negara – Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Agama – menghadiri dan

memberikan sambutan pada setiap hari besar semua agama ada plus minus dan tentu juga bermakna positif dan negative bagi sebahagian umat beragama. Menjelaskan dengan bijak, symbol negara dapat menempatkan diri dengan arif dan tepat, adalah cara jitu yang harus dilakukan untuk menjadikan tradisi itu berkontribusi bagi kerukunan dinamis.

PENUTUP

Penutup kalam, patut untuk disyukuri bahwa jalan santai Kerukunan sebagai peristiwa penting dan bersejarah di akhir tahun 2013 ini membawa pesan dan makna bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang secara cultural dapat dijadikan *role model* bagi pengokohan kerukunan secara nasional. Kerukunan interen umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah sudah dibuktikan manfaatnya oleh masyarakat Sumatra Barat. Oleh karena, itu kepada semua elemen bangsa dan tokoh umat patut diingatkan bahwa Kerukunan adalah kekayaan yang sangat mahal dan jangan sampai dinodai oleh prilaku orang-orang yang tak bertanggung jawab. Selamat Hari Amal Bakti Kementrian Agama RI, 3 Januari 2013. Dirgahayu Kerukunan, untuk kesejahteraan dan kejayaan Indonesia. amin. Ds. 210122013.

SINERGI UNTUK KERUKUNAN⁶

MEMBACA REALITAS SOSIAL

Judul tulisan ini lahir sebagai rangkuman dari diskusi terhadap akumulasi ketidakpuasan tokoh masyarakat, pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan tokoh umat (*civil society* dan atau *masyarakat madani*) terhadap penanganan yang masih tambal sulam, - kalau tidak mau dikatakan sebagai ala kadarnya dan setengah hati- pada berbagai fenomena ketidakkonsistenan penegak hukum terhadap pelanggaran hukum dan penyimpangan sosial yang ada dalam kehidupan warga kota Padang saat ini. Akibatnya, kini mulai dirasakan kenyamanan, keramahan dan kerukunan hidup masyarakat mulai terganggu dan mengarah pada distabilitas sosial, berpotensi memicu konflik horizontal.

Siapa saja, yang berkunjung ke Kota Padang sepuluh tahun terakhir ini dengan amat mudah menemukan pelanggaran hak-hak warga oleh sebahagian warga lainnya dan atau oleh aparatur pemerintah sendiri, misalnyan jalan umum dijadikan tempat berdagang, pasar raya, pasar tradisional yang kumuh dan fasilitas menyedihkan, tempat wisata indah pantai Padang dijadikan tempat maksiat berupa tenda ceper yang menyediakan perempuan pemuas nafsu, parkir kendaraan yang harus bayar mahal karena ulah preman pemalak, kendaraan umum taksi dan mobil carteran yang dipakai untuk menjajakan wanita tunasila

⁶ Sumbangan Pikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Priode 2013-2018. Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini sebelumnya sudah disampaikan secara lisan pada acara Silaturahmi dan Buka Bersama Gerakan Pemuda Ka'bah dan Forum Peduli Sumatera Barat, dengan Ulama, Pemda, KNPI dan Aparat Kepolisian Kota Padang, Sabtu, 28 Juli 2013 di Museum Aditiawarman Padang.

dan sederatan masalah sosial yang merusak tatanan kehidupan yang beradat dan beradab.

Membandingkan keamanan, kenyamanan dan peradaban yang saat ini tumbuh dan berkembang di Kota Padang dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, apalagi kalau diukur dengan kota besar lainnya di Indonesia, terasa sekali Padang jauh tertinggal. Dulunya – tahun 1990 an - Padang adalah kota penerima piala Adipura, penghargaan terhadap K3 (kebersihan, keindahan dan ketertiban), dan adanya jaminan rasa aman masyarakat, kini di era reformasi sekalipun ada penghargaan dan prestasi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatn, sulit memverifikasinya dengan realitas di lapangan.

Begitu juga halnya dengan kohesi sosial dan *style* hidup masyarakat terus berubah deras menuju era kebebasan, dalam ukuran tertentu liar tanpa ada kekuatan pengendali, contoh kasat mata adalah tempat-tempat hiburan malam yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Ada laporan menyebutkan bahwa dari lebih 100 buah café, dan copyshop yang ada di Padang, yang punya izin tidak lebih 5 buah saja, selebihnya *illegal* dan secara terselubung menyediakan pemijat dan wanita penghibur⁷. Malah ada berita pertengahan tahun 2012 lalu ada pengerebekan wanita tari telanjang di sebuah café di Kota Padang ini. Ada bentrokan antara aparat dengan masyarakat yang menolak tempat maksiat di bukit lampu Bungus, dan berita kerusakan moral, budaya dan pelanggaran hukum lainnya.

Tanpa mengingkari pula ada upaya dan gerakan perbaikan dan pengembangan kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang kondusif di Kota Padang yang dilakukan era kepemimpinan walikota Fauzi Bahar, 200-2013. Pemberantasan judi toto gelap (Togel) yang sudah merusak tatanan sosial dan ekonomi

⁷ Sambutan Ketua Panitia Dialog dan Buka Bersama Gerakan Pemuda Ka'bah, 28 Juli 2013.

masyarakat dapat berjalan efektif, setidaknya-tidaknya sampai saat terakhir tidak ada lagi masyarakat yang berani secara terbuka melakukan transaksi togel tersebut. Gerakan Zakat melalui Badan Amil Zakat (Bazda) sebagai filantropi sosial keummatan yang sudah mendapat penghargaan nasional dan membawa dampak percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan intitusi keumatan di Kota Padang.

Program busana muslim bagi pelajar dan himbauan untuk masyarakat harus diakui sudah diterima masyarakat malah dalam ukuran tertentu sudah menjadi *trend* dan mentradisi. Kegiatan pesanteren ramadhan diakui telah membawa model pengembangan sipiritualitas dan karakter generasi muda yang bersinergi antara dunia pendidikan, masyarakat dan rumah ibadah, dalam skala tertentu telah jadi *role model* bagi daerah lain. Gerakan hafalan juz amma untuk murid sekolah dasar, lomba bacaan asmaul husna, pengajian kaum ibu majlis ta'lim, pemberantasan buta huruf al-qur'an lewat penguatan MDA, TPA, TPQ dan kegiatan sosial keagamaan lainnya adalah kinerja Walikota Padang bersama ormas keagamaan yang patut dihargai.

Sejalan dengan tuntutan dan keterbukaan yang menawarkan berbagai arus kehidupan, maka masyarakat kota Padang, pimpinan kota sebagai imamnya, tentu harus sigap membaca tanda-tanda zaman, untuk didialogkan, disinergikan dan dicarikan solusi jika benturan budaya ini akan mengilas anak zamannya. Siapapun yang akan memimpin Kota Padang harus dapat mengarahkan perubahan ini pada keadaan yang menguntungkan dan memperkuat jati diri warga. Kencangnya pengikisan budaya malu, pelanggaran moral, dan pengabaian peradaban harus segera diantisipasi dengan mendayagunakan seluruh potensi, modal sosial keagamaan dan sumber daya insani yang tersedia, lokal, nasional dan global.

MEMETAKAN AKAR MASALAH

Menyosong pemimpin baru Kota Padang – hasil Pilkada Oktober 2013- patut kiranya elemen masyarakat berkontribusi untuk mengembalikan *muruah* dan martabat kota ini. Tiga bidang tugas pemerintah secara umum, pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang paling sulit mengelolanya adalah kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurus pemerintahan sudah ada regulasi, hanya tinggal menjalankan dan menegakkan, untuk pembangunan ada APBN dan APBD berikut sistim dan mekanisme yang sudah standar. Sedangkan untuk sosial kemasyarakatan ini berdimensi luas dan melibatkan semua unsure serta memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*).

Kepala daerah, akan sulit menata pemerintah dan melaksanakan pembangunan bila sosial kemasyarakatan tidak dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai cita-cita bersama dari masyarakat yang dipimpinnya. Pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus diartikan dalam lingkup yang utuh dan manusiawi, bukan sekedar fisik, sarana, infra sturuktur dan sederatan program pembangunan lainnya. Manusia hendaknya dapat dimengerti sebagai insane yang utuh, lahiriah, batiniah, spiritual, budaya dan kelengkapan lainnya, serta harus menjangkau kehidupan masa datang (*futuristic*).

Era kebebasan, demokrasi dan kemudahan tranportasi, komunikasi dan informasi adalah masa-masa indah yang memudahkan kehidupan umat manusia. Namun, sekaligus menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan tata nilai, moral dan budaya satu komunitas yang tak siap menghadapinya, tak terkecuali masyarakat kota Padang. Adalah wajar sekali, benturan budaya akan menjadikan budaya lemah, dikalahkan atau terkalahkan oleh budaya yang kuat, bukan tidak mungkin budaya lemah akan habis ditelan perubahan. Diganti oleh budaya baru, yang sejatinya bertentangan dengan jati diri warganya.

Tanpa bisa menutup mata, siapapun kini dapat menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang tengah mengalami perubahan kearah budaya dan pandangan hidup baru. Perubahan yang melingkupi berbagai segi kehidupan, tak terkecuali sisi adat, agama, stely, gaya hidup, moralitas dan budaya. Kehidupan masyarakat perkotaan(*urban*) mulai mendapat tempat, dan dijadikan referensi dalam sistim dan tatanan sosial kemasyarakatan. Ekses kehidupan perkotaan yang individualis, materialitik, hedonis dan cendrung mengikuti *trend*, lemah mempertimbangkan adat, budaya dan agama sebagai panduan hidup tengah menghingapi sebahagian warga kota, terutama kaum mudanya, dan orang-orang dewasa yang tengah galau dan atau kegoncangan jiwa.

Tersedianya ruang dan tempat-tempat hiburan yang menjamur di sentero sudut-sudut kota, baik yang legal maupun illegal, telah dengan mudah memberikan kesempatan kaum muda dan orang dewasa yang rendah komitmen moralnya untuk memuaskan syahwat liar. Kafe, tempat hiburan malam, tenda ceper dan tempat-tempat pinggiran pantai dengan pencahayaan gelap adalah sarana yang memungkin hadirnya prilaku menyimpang. Aktivitas kehidupan malam yang tidak dikontrol dengan ketat dan pengaturan tempat wisata yang tidak baik, adalah sumber melapetaka krisis kepribadian, moral dan pergeseran nilai anak bangsa di Kota Tercinta ini.

Kota Padang sebagai pusat kota Propinsi Sumatera Barat yang sejak lama dikenal sebagai daerah yang sudah memiliki filosofi kehidupan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tengah dihadapkan pula pada ujian zaman dan perubahan deras. Komitmen moral, adat dan agama diusik atau setidak-tidaknya digoyahkan oleh arus modernisasi perkotaan dengan segala ikutannya. Kerukunan hidup bermasyarakat ada yang terganggu oleh prilaku sebahagian warga kota, khususnya kaum muda dan orang dewasa yang dibesarkan dalam kultur sekuler, yang

menunjukkan perilaku bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat dan kepatutan.

Belum maksimalnya peran pemerintah daerah dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negative kehidupan urban dapat dilihat dari bertambah menguatnya kebiasaan minuman keras, tertangkapnya pengedar dan pengguna narkoba, perilaku pacaran menyimpang dan tindakan kriminalitas di jalan raya. Kondisi yang mencemaskan yang merusak sistem nilai agama, adat dan moral yang sedang dan akan terus menimpa anak nagari ini harus segera disehatkan dan dibina menuju kearah yang lebih baik.

Kehidupan yang multi kompleks dan dinamika tinggi perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan multi disiplin. Kegelisahan sosial yang dipicu oleh merebaknya perbuatan amoral harus segera dicerahkan guna menjadikan kerukunan hidup bermasyarakat lebih baik dan berkualitas. Kesadaran kolektif elemen masyarakat, alim ulama, tokoh adat, generasi muda, bundo kandung, gerakan organisasi kemasyarakatan dan ormas kepemudaan adalah modal sosial untuk membangun sinergitas berbagai stakeholder.

Dalam lapangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kota Padang, tentu harus segera menjemput ketertinggalannya. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidaklah variable yang berdiri sendiri, ia memiliki titik singgung kesigapan kepemimpinan dalam membaca peluang investasi. Keniscayaan pluralitas dan hubungan lintas agama, ekonomi, sosial, budaya hendaknya dapat didayagunakan untuk kebaikan bersama. Penerimaan terhadap entitas lain adalah kewajiban, namun pemimpin harus mampu memprediksi dampak ikutan yang akan merugikan komunitas luas. Kasus penolakan ormas Islam terhadap investasi besar yang akan

mengeliatkan ekonomi dari Lippo Group, harus jadi pelajaran bagi pemimpin baru.

KESAMAAN STRATEGI SINERGI

Pemimpin baru kota Padang, ketika mendapat amanah nantinya, tentu harus segera membuat *site plan* yang utuh untuk merumuskan strategi, program dan agenda aksi apa yang harus dilakukan untuk mentrapi kondisi sosial yang tengah bergerak kearah penghancuran diri sendiri. Perbaikan sosial jelas tidak mudah, pasti memerlukan strategi sinergi yang kuat dan melibatkan semua unsure. Sikap optimis, kerja keras dan kesungguhan akan berbuah manis, bila ia didukung oleh setiap elemen masyarakat. Menghapus memori persaingan (kompetisi) dalam pemilihan adalah pintu masuk untuk kenyamanan kerja.

Mencermati kondisi sosial masyarakat era otonomi dan kebebasan saat ini, strategi penegakan hukum adalah pilihan pertama yang harus dilakukan. Ketegasan para penegakkan hukum terhadap pelanggaran adat, agama dan hukum positif adalah modal awal untuk kerukunan hidup masyarakat. Lewat kepastian penegakan hukum diyakini adanya rasa aman dan nyaman masyarakat. Penjamin yang jelas oleh aparat hukum terhadap sumber-sumber ekonomi dan status sosial orang atau komunitas adalah kekuatan efektif yang dapat didayagunakan untuk menegakkan sendi-sendi kehidupan moral bersama.

Dari sisi kemasyarakatan, pemimpin sebagai pemegang kendali diminta untuk menjalin hubungan batin yang erat dengan umat yang dipimpinnya. Melakukan kordinasi dan konsolidasi antar elemen masyarakat adalah kerja cerdas yang akan bermanfaat ganda untuk perbaikan kehidupan komunitas. Terjalinan hubungan yang kuat hubungan antara satu ormas dengan ormas lainnya adalah juga jembatan hati untuk mencegah keburukan yang akan terjadi.

Kesatuan pandangan dan arah program yang sama dan terukur antar ormas adalah cara lain yang dapat mencegah berkembang biaknya aktivitas tidak kondusif. Peran organisasi sosial keagamaan, sulit dapat berjalan tanpa dukungan dan keterlibatan pemerintah kota dan aparat keamanan. Bingkai kerja yang sedangkan dan akan terus diperjuangkan dan terus diperkokoh adalah sinergitas antara kelompok. Kesadaran akan pentingnya sinergitas sulit menumbuhkannya bila ego sektoral tidak dapat dikontrol sedemikian rupa. Peran pemimpin justru menjadi perekat antar komponen. Pemimpin baru kota Padang wajib memiliki visi pluralitas dalam bingkai local genius yang kreatif dan produktif. Pemimpin yang tetap loyal pada genuisitas, namun terus berwawasan global kompetitif.

Pemimpin yang berpihak pada kebenaran dan kejujuran adalah mereka yang siap menjadi *role model* dan atau panutan bagi masyarakatnya. Mereka yang secara pribadi, keluarga dan *time work* dapat menempatkan iman, moral, budaya, ilmu pengetahuan, dan kemoderenan dalam *performance* setiap saat. Satu kata dengan perbuatan adalah indicator awalnya. Ketulusan, siap berjuang dengan pengorbanan sepenuh hati dan jiwa, dan bertanggung jawab terhadap kerja anak buahnya adalah tanda-tanda pemimpin bijaksana. Kecemasan pada *lost generation* segera dapat dicegah, bila pemimpin tidak terkurung dalam *mindset* sempit, *instan* dan tergoda oleh kepuasan sesaat.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa masalah degradasi moral dan pergeseran nilai adalah tantangan dari keniscayaan benturan budaya di era keterbukaan ini, oleh karena itu perlu kesadaran kolektif untuk saling merasakan, menyadari dan mencari solusi bersama dan memastikan bahwa satu dengan yang lain adalah saling membutuhkan. Kerukunan hidup yang mulai terusik hendaknya segera dicegah agar jangan sampai menjadi sumber konflik yang akan merugikan semua pihak. Sinergi sebagai keniscayaan adalah wujud nya dari wawasan pluralis dan

kompetitif hendaknya dapat berkontribusi bagi kerukunan masyarakat. Semoga dimaklumi dan menjadi perhatian dalam membangun Padang Kota Tercinta. Selamat mengemban amanah. Semoga Allah Swt selalu mencurahkan hidayah-Nya untuk kita semua, amin. Ambon I/4. Ds. 04 Syawal 1434H/118072013.

KERUKUNAN

MENCEGAH BAHAYA KEMANUSIAAN⁸

RANAHERITA-Polisi Daerah (Polda) Sumatera Barat memusnahkan sebanyak 46 Kg ganja kering di depan Kantor Direktorat Reserse Narkoba, Polda Sumbar, Jum'at (5/12/2014). Kapolda Sumbar Brigadir Jendral Polisi Bambang Sri Herwanto mengatakan, barang bukti jenis ganja yang dimusnahkan sebanyak 46 kg. Barang bukti ini merupakan hasil tangkapan dari M Abu Bakar dan dua rekannya asal Loksmawe, Aceh pada akhir Oktober 2014 lalu. "Pemusnahan barang bukti ini merupakan perintah undang-undang," ujarnya. Bambang menambahkan, saat ini Indonesia secara nasional sudah tahap darurat dari penyalahgunaan narkoba. Ia menghimbau masyarakat dan semua lini pemerintahan dan instansi ikut serta memerangi narkoba. Saat ini semua lini kemasyarakatan sudah dimasuki oleh narkoba. "Kami mengharapkan semua pihak ikut serta dalam memerangi narkoba, karena polisi kemampuannya sangat terbatas," ujarnya. Pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BNNP dan lembaga terkait.

Berita sejenis di atas hampir tiap hari ditemukan dan dapat di akses di media cetak, elektronik dan media social. Sepanjang tahun 2007 – 2011 jumlah kasus Narkoba bukannya berkurang tapi terus meningkat tajam, baik jumlah tersangkanya maupun jenis barang yang dipakai. Narkoba dengan jenis sangat membahayakan sabu misalnya mencapai angka 1.610 begitu data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012. Poin pentingnya peningkatan kasus narkoba sudah pada tingkat darurat dan mencemaskan masa depan bangsa.

⁸ Makalah Dialog Akhir Tahun 2014 FKUB Sumatera Barat, 22 Desember 2014 di Kanwil Kemenag.

KEPENTINGAN KERUKUNAN

Kerukunan itu penting, harus dipentingkan dan itu mesti menjadi kepentingan bersama. Secara normative, semua orang setuju bahwa kerukunan adalah begitu penting dan kebutuhan semua orang. Dalam prakteknya, jelas tidak mudah untuk merawat bibit kerukunan, agar jangan dimakan ulat kebencian dan konflik yang akan merugikan semua pihak. Dalam konteks Sumatera Barat, masalah kerukunan tidak ada masalah yang berarti, kecuali masalah yang sengaja ditimbulkan oleh pembuat masalah.

Kondusifnya kehidupan beragama, dalam batas tertentu ada krikil kecil, yang harus dibicarakan dengan lapang dada oleh tokoh-tokoh lintas agama, adalah rahmat dari sang pencipta yang hendaknya dijaga dan dipagari secara bersama-sama. Bukti menunjukkan sekali saja terganggu kehidupan beragama, itu dipastikan mendatangkan mudarat besar bagi kehidupan semua, cost mahal dan kerugian social yang tinggi sekali. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan untuk hidup rukun, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Tidaklah benar jika ada pihak yang mengklaim bahwa agamanya mendorong munculnya kerusakan, kerusuhan dan ketidakbaikan.

Dalam pergaulan masyarakat Minangkabau sejak awal sejarah dikenal dengan masyarakat muslim begitu akomodatif dengan etnis, dan agama apa saja yang datang ke daerah ini. Sebagai bukti dapat ditunjukkan dengan penamaan kampung di pusat-pusat kota, seperti kampung Cina, dan Kampung Keling. Dalam culturalpun dikenal ada beberapa model negosiasi keragaman yang berujung pada terjalannya kerukunan. Ada model ambil mengambil, artinya antar etnis dan agama yang berbeda saling kawin mengawini. Ada juga model pencelupan, yaitu antar etnis dan agama yang berbeda dapat hidup begitu rukun dalam satu ikatan warga local. Dalam masyarakat asli Minangkabau dikenal tradisi malakok. Malakok yaitu kesedian pimpinan adat dan

masyarakat local menerima etnis dan agama berbeda, namun dalam hal-hal tertentu mereka harus melakukan dan menghentikannya⁹.

Norma, tradisi dan emosi keagamaan yang lurus, benar, jujur dan otentik adalah prasyarat untuk terwujudnya kerukunan yang lebih baik. Kecurigaan, saling tuding, tidak saling mempercayai, mengganggu tatanan budaya local dan perilaku yang mengabaikan kearifan local adalah pemantik timbul disharmoni. Siapapun, dalam kapasitas apapun, ketika kearifan local dan agamanya terusik dipastikan akan berontak. Hanya saja, bentuk ketidakpuasaan itu muncul dalam ekspresi yang berbeda. Ada yang lunak dan santun, tentu juga ada yang keras dan kasar. Peran tokoh agama mendidik umat untuk menjunjung tinggi moralitas adalah menjadi sangat menentukan.

MENGHADANG MUSUH BERSAMA.

Bahaya besar yang tengah melanda masyarakat Sumatera Barat adalah penyimpangan seksual dikalangan remaja dan juga orang dewasa, yang berakibat meningkatnya penyakit HIV dan AIDS. Coba simak salah satu informasi di media online. INILAHCOM, Padang - Maraknya perilaku seks bebas di Sumbar telah menyebabkan kasus HIV/AIDS di daerah ini meningkat. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, jumlah penderita tertinggi berada di Kota Padang diikuti Kota Bukittinggi. Kasus human immunodeficiency virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Sumbar tahun 2013 lalu, meningkat tajam. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan Sumbar, data kumulatif sampai tahun 2013 ini jumlah penderita HIV/AIDS mencapai 1.875 kasus, dengan rincian HIV 923 kasus, dan AIDS 952 kasus.

⁹ Lebih luas baca Makalah Sepriyono, *Malakok Model menegosiasikan Keragama bagi Etnis Nias-Kristen dengan Minangkabau-Islam di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.*

Bila dibandingkan dengan tahun 2012 lalu, kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2012 lalu, kasus HIV/AIDS hanya mencapai 814 kasus, dengan rincian HIV 73 kasus, dan AIDS 741 kasus. Tingginya kasus HIV/AIDS di Sumbar disebabkan oleh cairan kelamin atau yang lebih dikenal dengan seks bebas. Sedangkan penderita HIV/AIDS ini didominasi oleh kelompok umur rentang 20-29 tahun.

“Penyebab HIV/AIDS ada tiga macam, yakni penularan melalui darah, cairan kelamin, dan air susu ibu atau ASI. Namun, berdasarkan data yang kami himpun, tingginya angka HIV/AIDS di Sumbar disebabkan oleh seks bebas,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Rosnini Savitri, Senin (12/5). Dikatakan, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, jumlah penderita yang paling tinggi berada di Kota Padang. Urutan kedua ditempati Kota Bukittinggi. Namun, saat ditanyakan, tentang data per kabupaten/kota, pihaknya tidak bisa memberikan data, karena bagian yang menangani masalah tersebut, sedang berada di luar kota.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), kata Rosnini, telah meminta peran Komisi Penanggulangan AIDS selaku leading sector untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS. Selain menyusun langkah-langkah strategis, KPAN meminta Komisi Penanggulangan AIDS membuat master plan untuk percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Tujuan master plan tersebut, untuk mengetahui kemajuan dan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS di lapangan.

“KPAN menyampaikannya secara langsung pada saat melakukan pertemuan regional 2014 wilayah Sumbar di Bukittinggi beberapa hari yang lalu,” ungkapnya lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Elka Lusi mengakui, tingginya angka HIV/AIDS

tersebut sudah sangat wajar, karena penduduk Kota Padang merupakan penduduk terpadat di wilayah Sumbar. Ia juga mengakui, data tersebut belum sepenuhnya valid, bahkan data tersebut bisa mengalami penambahan yang cukup besar dari yang ada saat ini. “Data itu data yang terdeteksi. Kami merasa masih banyak kasus-kasus lain di luar sana yang tidak terdeteksi,” katanya.

Berita tersebut rasanya bisa dipercaya, karena datanya bersumber dari dinas yang berkompeten. Dapat diyakini bahwa umat semua umat beragama terlibat dalam kasus tersebut. Berkecambahnya sedemikian luas narkoba dan wabah HIV dan AIDS adalah ancaman kemanusiaan yang harus dihadapi semua umat beragama. Mengerahkan potensi umat untuk mengikis dan menghapus habis narkoba dan pelanggaran moral berbasis masyarakat beragama adalah pilihan bijak untuk mensolidkan kerukunan. Semoga kemajuan dan kebaikan lebih cepat menyintuh umat. Ds.07122014.

LABORATORIUM KERUKUNAN, DAN MULTIKULTURAL¹⁰

Success story Pemerintah Daerah Propinsi Maluku bersama masyarakatnya dalam menyelesaikan konflik horizontal antar etnis, dan penganut agama Islam versus Kristen di Kota Ambon tahun 1999-2013 lalu telah menjadikan warga kota Ambon kembali kea lam keasliannya, hidup berdampingan dalam semangat multicultural. Begitu mendarat di Bandar udara Ambon penumpang disambut oleh warga masyarakat yang dari raut wajahnya terpancar suasana bersahabat, walaupun tampilan diri mereka beda jauh dengan warga dari Indonesia barat dan pulau Jawa. Kulit hitam, tubuh besar, rambut kriting dan terkesan menakutkan bagi mereka yang kenal, namun hati dan sikap mereka santun dan tidak perlu ditakuti.

Mendengar cerita lisan dari beberapa orang yang terlibat aktif dalam konflik Ambon yang mengenaskan itu, tidak seorangpun akan tenang dan gembira, cemas, kasihan, merinding bulu roma mendengar peristiwa sedih, sadis, kejam dan tidak berperimanusiaan yang terjadi antara dua belah pihak yang bersiteru. Pembunuhan kejam yang dilakukan atas seorang perempuan muda sedang hamil, setelah sebelumnya di zinai, setelah mati dibedah perutnya dikeluarkan anaknya, dicincang dagingnya, adalah cerita menakutkan dan sungguh membuat hati-hati tidak habis pikir mengapa manusia sekejam itu. Pembunuhan terhadap musuh yang ditemukan dipasar begitu kejam lagi,

¹⁰ Refleksi Menginjak kaki pertama kali di Bumi Ambon Manise, menghadiri Pertemuan Dekan Fakultas Tarbiyah san Keguruan UIN dan IAIN se Indonesia, di IAIN Ambon, Hotel Amans, Kota Ambon, Jum'at, 5 sd 7 Juni 2015,

dibunuh, dipotong-potong dimasukkan ke dalam kantong plastic, dibuang kelaut.

Perang antar komunitas muslim dengan komunitas Kristen yang begitu dahsyat terjadi di pusat-pusat kota Ambon, daerah Batu Merah, kampung Kuda Mati yang justru di tengah-tengah Kota Ambon membuat masyarakat mudah sekali menjadi korban. Korban nyawa, korban harta benda, pembakaran dan penghancuran bangunan rumah, toko, rumah ibadah dan tempat telah membuat masyarakat bangkrut, infrastruktur hancur dan tentunya membawa kemunduran bagi kehidupan masyarakat Kota Ambon. Saksi hidup bangunan yang belum diperbaiki, walau sudah 15 tahun berlalu, begitu juga kesan kecemasan dan cerita-cerita nyata tentang peristiwa konflik itu masih mudah mengalir dari mulut warga kota Ambon.

MALUKU ARPICILAGO NUSANTARA

Propinsi Maluku adalah daerah kepulauan yang lautnya mencapai angka 93 % dengan 7 % daratan, pulau-pulau kecil dan besar lebih 665 buah. Bahasa dan dialek daerah yang terdiri dari lebih 300 bahasa adat, 117 bahasa daerah, didalam masyarakat terdapat pranata social kerajaan, sebanyak 360 Raja yang memiliki gelar orang kaya, sehingga Ibnu Batutah menyebut Maluku dengan *al-Jazirah al-Mulk*. Kekayaan rempah-rempah berupa cengkeh, pala, kayu putih ditambah lagi dengan kekayaan ikan, mutiara, batu mulia di lalu Maluku telah menjadikan daerah ini dikenal luas di nusantara dan belahan dunia, sejak masa Hindia Belanda.

Dalam kehidupan social keagamaan, kemasyarakatan dan kebudayaan dalam masa-masa yang cukup panjang daerah ini jarang terjadi konflik yang meluas dan mendatangkan luka sejarah mendalam, kecuali konflik awal reformasi, pergantian abad 20 lalu itu. Banyak cendekiawan, pemuka agama dan masyarakat biasa yang berpendapat bahwa 1999 adalah dipicu oleh

kepentingan orang-orang elit dengan tujuan mendapatkan kekuasaan di Maluku.

Setelah lebih satu tengah dasawarsa pasca konflik ada harapan baru yang terpancar dari wajah masyarakat Ambon berupa kesadaran kolektif sulitnya dan dasyatnya bahaya konflik. Pengalaman sejarah gelap dan masa kelam peradaban umat manusia yang terjadi akibat konflik antar agama oleh semua dirasakan tidak boleh terulang lagi. Mereka semua menyadari tidak seorangpun yang mendapat keuntungan dari konflik, justru masyarakat hanya mendapatkan kerusakan, kehancuran dan perpecahan yang sulit sekali melupakannya. Kesadaran bersama untuk hidup saling menghargai dan menjaga kerukunan antar individu dan kelompok masyarakat adalah cara jitu untuk menumbuhkan kebersamaan yang lebih dekat dan saling mengerti.

Perlakuan pemerintah yang adil terhadap kelompok masyarakat dan penganut agama adalah bahagian paling menentukan untuk menciptakan keabadian kerukunan dan kedamaian, saat musabaqah tilawatil qur'an difasilitasi Pemerintah Daerah, maka kegiatan Merawi agama Kristen juga dibantu Pemerintah. Saat Islamic centre didirikan maka gedung Kristen center, Budha, Hindu dan Kong Hu Chu juga segera didirikan, begitu pernyataan Gubenur Maluku ketika membukan Seminar Nasional LPTK Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Maluku dilakukan di gubernuran Maluku Ambon.

Pengalaman sejarah konflik yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat umat beragama di Ambon mudah dipicu pada dasarnya bukanlah oleh masalah agama atau keyakinan semata, akan tetapi yang lebih dominan itu adalah berkaitan dengan kesejahteraan social dan jurang kesenjangan social antar etnis dan agama. Kesejahteraan social yang berkeadilan adalah katup pengaman konflik yang dapat menjamin adanya kerukunan,

kedamaian dalam kehidupan yang multicultural. Pencerdasan masyarakat akan arti hidup beragama dan bermasyarakat yang lebih adil, seimbang, saling menghargai adalah kunci penting mencegah timbulnya konflik. Mengungkit kembali kearifan local sebagai benteng konflik, seperti konsep *Torang Bersaudara* adalah kunci suksesnya perdamaian di Ambon.

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Satu diantara poin penting yang mengemuka dalam wacana akademik seminar nasional pendidikan multicultural menghadapi masyarakat ekonomi Asean yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ambon adalah menjadikan Ambon sebagai laboratorium pendidikan multicultural di Indonesia. Kehidupan budaya yang bersifat adjustment, dinamis, perekat individu, perekat komunitas, perekat institusi adalah bahagian paling penting untuk menjadikan bangsa ini survival.

Sejak lama sudah dicanangkan bahwa pendidikan multicultural adalah bahagian yang tak terpisahkan dari ide dan gerakan pembaharuan (reformasi) di bidang pendidikan, sebagai upaya proses penyesuaian norma, sikap dan perilaku serta struktur lembaga pendidikan dengan memberdayakan semua sumber dan memelihara variatifitas, yang diarahkan untuk mencapai prestasi. Pendidikan multikultural dapat dimulai pada ide, gerakan pembaharuan atau reformasi di bidang pendidikan (khususnya content), proses penyesuaian struktur lembaga pendidikan, memberdayakan semua sumber, memelihara variatifitas, yang meliputi gender, latar belakang, ras, suku, agama. Pendidikan multikultural pada dasarnya untuk memberikan kesempatan yang sama untuk belajar (memperoleh hak pendidikan). Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah mengakomodir semua keragaman potensi untuk sebuah achievement (prestasi). Pendidikan multikultural ingin membebaskan segala bentuk hambatan yang bersifat mengikat seperti kelas sosial, gender,

rasial, etnisitas, Agama (radikalisme) – ide dan aksi, kelompok budaya/masyarakat (primordialisme) - asal usul, diskriminasi, alienasi, eksklusifitas, marginalisasi, kolusi, dan penolakan.

Ide besar yang disuarakan gubernur Maluku tentang pendidikan multikultural adalah mengajak dan menantang pimpinan lembaga pendidikan tinggi, termasuk lembaga pendidikan tinggi agama Islam, untuk merumuskan pendidikan multikultural versi Maluku. Pengalaman masyarakat Maluku dalam membangun kehidupan yang multikultural berbasis kearifan lokal, menyelesaikan konflik dengan kearifan lokal, dan kekayaan budaya kerajaan lebih dari 300 raja-raja, adalah modal sosial yang dapat dijadikan bahan ajar untuk pendidikan multikultural itu sendiri.

Pendidikan mono kultural yang berjalan sejak masa kemerdekaan, lebih lagi saat orde baru, yang serba unifikasi, dalam batas-batas tertentu ada yang sampai pada gnoside kebudayaan telah menghancurkan pranata sosial. Pengalaman masyarakat Maluku yang dapat menyelesaikan konflik horizontal dapat dikatakan adalah sumbangan dari sudah terbentuknya kesadaran pendidikan multikultural di masyarakat Maluku. Era keterbukaan informasi dan kebebasan masyarakat maka beralasan sekali kiranya pendidikan tinggi di Maluku dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yang memang memerlukannya.

KERUKUNAN DAN KEDAMAIAN

Sisi lain yang menjadi modal sosial berharga di Maluku adalah terciptanya kerukunan beragama yang dinamis. Kerukunan yang tidak saja dilapis elit masyarakat, akan tetapi ia mewujudkan setiap elemen masyarakat. Kerukunan hidup beragama yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku sejak awal, bukan sesuatu yang dipaksakan. Kerukunan yang ada di masyarakat, dikalangan

kelompok sosial dan struktural hadir sebagai kebutuhan bersama untuk menjaga kenyamanan bersama.

Kedamaian yang tercipta dalam masyarakat bukanlah kedamaian semu, akan tetapi ia ada karena memang disadari bersama dan merupakan kesadaran kolektif untuk hidup lebih baik. Pengalaman konflik telah menjadi bahan ajar berharga untuk memelihara kedamaian yang bersifat dinamis. Dinamis dalam makna kedamaian bukan terjadi sendirinya, tetapi diusahakan dan dijaga secara bersama oleh semua komponen.

Akhirnya dapat dapat disimpulkan bahwa gagasan besar untuk menjadikan Propinsi sebagai laboratorium pendidikan kerukunan, perdamaian dan multikultural adalah modal kebijakan yang patut dipertimbangkan oleh masyarakat kampus. Perguruan tinggi sebagai lembaga akademis tentu akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan agenda besar tersebut. Semoga IAIN Ambon, menjadi terdepan. Selamat. Ds. Amans Hotel, 6615.22.56.

MENCEGAH SESAT, MERAWAT UMAT¹¹

فَدُلِّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)? (QS. Yunus, 32).

Aliran Sesat di Indonesia mulai menyusuri daratan Indonesia yang memang mayoritas muslim terbesar di dunia. Sesat dan kesesatan yang berarti *dhalal* (dalam bahasa arab) yaitu setiap bentuk penyimpangan dari jalan yang dituju (benar) dan setiap yang berjalan bukan pada jalan yang benar. Munculnya aliran-aliran sesat di Indonesia ada beberapa sebab (1) Untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia karena adanya kekhawatiran bahwa peradaban Islam, (2) Popularitas pribadi dengan tujuan tertentu, (3) terlindungi oleh UUD pasca amandemen pasal 28E ayat (2) yang berisi : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pelajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. (4) Kurangnya keimanan dan ilmu agama Islam yang akhirnya berakibat pada penafsiran alquran dan hadist yang salah. (5) Frustrasi yang

¹¹ Bahan Muzakarah Ulama, MUI Kabupaten Padang Pariaman, Rabu, 18 Februari 2016/9 Rabiul akhir 1437H di Pariaman.

dirasakan umat akibat kondisi keterpurukan ekonomi, dan gagal dalam persaingan global.

Dalam praktiknya, kesesatan itu tidak dianggap sesat walaupun dilaksanakan ramai-ramai ada pula kelompok yang secara nama islamis, namun justru malah menyesatkan. Siapa saja yang mengajarkan aliran dan akidah tidak benar atau menyimpang dari agama Islam yang diajarkan nabi kita Muhammad SAW.(1). Lia Eden.(2) Lembaga Kerasulan. (3). Al-Qiyadah Islammiyah.(4). Pluralisme Agama, Jaringan Islam Liberal (JIL).(5). Abdul Rahman.(6). Komunitas Penimbrung Qur'an Sunnah.(7). Ahmad Sayuti Sang Nabi Baru asal Bandung.(8). Ahmad Mushaddeq – sang rasul. (10). Baha'i.(11). Ahmadiyah.(12). Isa Bugis.(13). Sepilis – Sekularisme Pluralisme Liberalisme. (14). Aliran Masuk Surga (AMS).(15). Natalan/ Doa Bersama.(16). LDII.

Diantara paham yang menyimpang sebagaimana disebutkan pada kriteria di atas antara lain Islam Ahmadiyah, Syi'ah, Islam Jamaah (LDII). Kelompok Syiah dan LDII dewasa ini terus berkembang di Indonesia dan mulai unjuk gigi yang memicu beberapa keributan di tanah Air. Ahmadiyah mempercayai Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi sesudah nabi Muhammad. Syiah mengingkari rukun Iman dan merubah menjadi 5 rukun Iman, meragukan kebenaran Al Qur'an mushaf Ustmani, mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Imam yang 12, menghina dan menghujat para sahabat Nabi. Islam jamaah juga mengkafirkan orang yang diluar kelompok mereka.

Mereka yang sudah memasuki dan mendalami ajaran sesat ini biasanya sulit untuk keluar dari lingkungan mereka . Karena biasanya mereka menjaga jamaahnya agar jangan belajar dan mengaji dari ustad atau ulama dari luar kelompok mereka, sehingga mereka sulit menerima kebenaran dari orang lain. Umat Islam Indonesia perlu berhati hati agar tidak terjebak masuk kedalam kelompok aliran ini. Sebagai pedoman bagi umat Islam

Indonesia pada tgl 6 November 2007 MUI Pusat telah mengeluarkan 10 kriteria aliran atau paham yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. 10 Kriteria dimaksud antara lain:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

ULAMA MERAWAT UMAT.

Dalam literatur keislaman istilah ulama dikaitkan langsung dengan peran dan fungsi yang harus dilakukannya. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, meriwayatkan hadis *al-'ulama waratul ambiya'* (ulama adalah pewaris para nabi). Ini berarti bahwa ulama mempunyai fungsi penting dalam kehidupan umat, yakni sebagai pengganti nabi dalam makna melanjutkan risalah nabi. Perwujudan risalah itu dapat muncul dalam bentuk fatwa dan nasehat (taushiyah) keagamaan. Kedudukan ulama sebagai pewaris nabi lebih tegas diperkuat al-Qur'an bahwa ulama adalah menjadi hamba penjaga kelestarian agama Allah. Al-qur'an

menyebut bahwa ulama itu dapat dilihat dari sikap hidupnya yang hanya takut kepada Allah. (QS,35:28). Kapasitas takwa ulama diyakini melahirkan kemampuan keilmuan yang memadai. Nabi Adam A.S dipilih jadi khalifah adalah karena kompetensi ilmunya itu. [QS.2:31-2].

Keberadaan ulama begitu penting dan strategis dapat diamati dari peran yang ditunjukkan ulama. Meskipun, sekarang sudah terbatas namun penting dan menentukan corak kehidupan masyarakat. Wadah pengabdian ulama yang tersisa, dalam hal ini adalah khotbah Jum'at, ceramah agama, pembaca doa dan pemberi nasehat dalam even pernikahan atau kegiatan keagamaan lainnya, tetap masih penting dalam mengerakkan perubahan serta mengawal akidah, moral dan kehidupan umat .

Untuk memberikan penguatan dan pengokohan terhadap mimbar khotbah, ceramah dan tauhsiyah sebagai panggung mulia yang dimiliki ulama maka perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan yang dapat menegaskan fungsi-fungsi ulama tersebut. Fungsi mulia ulama sebagai pewaris perjuangan Nabi-Nabi harusnya dapat menjadikan ulama bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang mengugat, melecehkan ataupun menolak keberadaan nabi, sebagaimana banyak dilansir di situs-situs internet Barat. Peran penting yang menegaskan bahwa bagi ulama soal kenabian sudah final, ini akan besar artinya mencegah muncul aliran baru yang melecehkan Nabi.(QS,33:4).

Nasehat ulama di atas mimbar dan tempat pengajian harus difokuskan pada usaha membentengi aqidah umat dari perusakan aliran sesat dan kerusakan kehidupan materilitik hedonistik. Perusakan dan kerusakan aqidah adalah bahaya yang sedang dan terus akan mengintai umat. Misalnya saja munculnya aliran sesat yang dipicu oleh berbagai masalah adalah tugas utama kaum

ulama yang harus mencegahnya sedini mungkin. (QS. Al-Jasiyah,(45):23-24).

Relasi sosial antar umat Islam dan umat lain, ulama juga dituntut mengokohkan pendiriannya sebagai perekat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan basyariyah. Ukhuwah adalah program awal yang diluncurkan Nabi Muhammad SAW, ketika baru saja menginjakkan kakinya di bumi Yastrib (Madinah). Merubah sistim sosial dari hubungan sosial kemaysrakatan yang didasarkan benda (uang, dagang, jabatan dan status sosial) digantinya dengan hubungan didasarkan satu paham keagamaan (Islam). (QS.Al-Hujurat (49):10).

Sisi lain yang harus diperkuat pada mimbar atau panggung umat yang dikuasai ulama adalah kedudukan ulama sebagai penganjur dan penegak Amar Ma'ruf Nahyi Mungkar. Ulama bukan saja pioner dari kebaikan akan tetapi ia juga tidak boleh berkompromi dengan kemungkaran. Tegak, istiqamah dan ikhlas dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sikap moral yang tidak boleh menipis dikalangan ulama. (QS.3:104-5)

Motivasi dan misi yang hendaknya ditanamkan kedalam diri kaum ulama adalah bahwa kehadiran ulama bukanlah untuk dirinya sendiri, ia juga bertugas melayani kepentingan umat. Ulama adalah *khadimul ummah*. Nasehat ulama kepada pemimpin, umat dan siapa saja adalah bentuk pelayanan ulama yang harus dimengerti semua pihak. Bila ada pendapat, taushiyah, pengajian dan tulisan ulama yang menyatakan kebenaran mestinya dihargai. Karena, nasehat ulama jelas didasarkan pada nilai-nilai dasar agama Allah yang pasti benarnya. Kalau demikian tidak adalah alasan meremehkan atau tidak memperdulikan nasehat ulama.

Untuk menjaga agar panggung ulama yang tinggal satu-satunya tidak sepi dan ditinggal umat, kaum ulama hendak dapat menjadi orang terdepan yang berfungsi sebagai pengembang agama Islam. Lihat sejarah ribuan makam ulama suhada' yang dihormati

orang. Kadang kala penghormatan itu melenceng dari semestinya, menghormati jasa, karya dan perjuangannya, tapi beralih dengan menghormati kuburannya. Sebuah cara beragama yang naif dan menyedihkan. Memang, sepanjang sejarah dapat dibaca bahwa ulama adalah figur yang hebat dan patriotik dalam membangkitkan semangat jihad. Perjuangan sejarah bangsa-bangsa di dunia membebaskan diri dari penjajah penuh bertabur dengan pengabdian sang ulama.

Peran sosial ulama yang sulit mengukurnya adalah ulama sebagai guru. Ribuan lembaga pendidikan, madrasah, Pesanteren, surau dan lembaga pendidikan umum yang dibidani kelahirannya oleh ulama. Bahkan hidup, tumbuh dan berkembangnya pendidikan itu ditentukan oleh kepiawaian sang ulama. Kedudukan ulama yang begitu strategis ternyata telah membawa dampak yang cukup luas, khususnya posisi ulama sebagai *uswatun hasanah* (teladan terbaik).

Sederatan peran, fungsi dan kedudukan yang dimiliki ulama seperti di atas dapat dilakukan ulama melalui wadah khotbah, ceramah dan tasuhiyah yang tentunya harus dapat pula dipahami dan diikuti oleh umat. Konsekwensi logis yang harus dilakukan ulama untuk memelihara kekuatan panggung keulamaan itu adalah meneguhkan kompetensi ulama. Ulama yang mumpuni akan dengan mudah menggunakan sarana dakwah berupa panggung atau mimbar umat itu untuk kepentingan yang lebih luas. Ulama yang lemah ilmu, terbatas wawasan dan rendah kualitas diri akan terjebak pada rutinitas formal ibadah dan tidak akan tidak cukup kuat memaksimalkan panggung dakwah itu untuk kebaikan umat.

Kedua: Dakwah Wasathiyah.

Ajaran Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi segenap alam semesta menuntut umatnya untuk bersikap wasathiyah.

Islam Wasathiyah adalah “Islam Tengah” untuk terwujudnya umat terbaik (*khairu ummah*). Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan umat Islam pertengahan (wasath) dalam segala urusan agama, seperti dalam hal kenabian, syariat dan lainnya(QS. al-Baqarah/143).

Pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan Islam wasathiyah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijabarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) *Tawassuth*(mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).

(2) *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhiraf* (penyimpangan) dan *ikhtilaf* (perbedaan).

(3) *I’tidal* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.

(4)*Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

(5)*Musawah*(egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.

(6)*Syura*(musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.

(7) *Islah*(reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi

perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah ‘amah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah.

(8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.

(9) *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia.

(10) *Tahadbdhur* (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban.

Islam Wasathiyah wajib diamalkan secara istiqamah oleh seluruh umat Islam Indonesia dan dunia sehingga menjadi syuhada’ ‘ala al-nas (saksi kebenaran Islam) untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang berkemajuan dan toleran; membentuk kehidupan kemasyarakatan yang damai dan saling menghargai; merealisasikan kehidupan kebangsaan yang inklusif, bersatu dan berkeadaban; serta menciptakan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Islam Wasathiyah sangat mendukung ikhtiar kolektif umat Islam Indonesia dan seluruh komponen bangsa dalam mengukuhkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Pengertian ulama dalam konsep sosiologis adalah bagian penting yang perlu diperhatikan untuk menempatkan ulama dalam peran sosialnya. Meneguhkan peran ulama lewat penguatan panggung khotbah, ceramah dan taushiyah adalah cara

terbaik untuk memperkokoh keberadaan ulama yang berkelanjutan. Mempekokohkan kompetensi ulama adalah bagian penting untuk menunjang kuatnya ulama dan umat. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu'alam. Ds. Ambon I/4 Wisma Indah Siteba.05022016.



KERUKUNAN DAN GERAKAN BELA NEGARA (GBN)¹²

Kesadaran semua elemen bangsa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tengah dihadapkan kepada ancaman laten yang perlu mendapat pembelaan dari warga bangsa. Wujud kesadaran itu dapat dirasakan dengan sudah ditetapkannya Hari Bela Negara (HBN) sebagai hari bersejarah Indonesia tanggal 19 Desember. Hari bela negara dimaksudkan untuk memperingati deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 19 Desember 1948. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres Nomor 28. Dalam masyarakat juga sudah dilakukan upaya melembaga memperkuat kesadaran bela negara dengan telah dideklarasikan forum bela negara.

Forum bela negara berasal dari alumni pelatihan Bela Negara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diman mereka bersepakat untuk bersatu dalam wadah Forum Bela Negara. Forum bela negara telah dideklarasikan di LEMHANNAS pada tanggal 17 Juli 2008 pada seminar tema “Pengembangan Bela Negara secara terkoordinasi dan tepat guna di era globalisasi”

Forum Bela Negara wadah alumni Pendidikan Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia beserta warga Negara yang mempunyai visi dan misi yang sama yang dapat dijadikan sebagai alat pemersatu guna membangun kekuatan demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan Sistem

¹² Disampaikan pada Pertemuan Tokoh Sumatera Barat, Pengurus Gerakan Bela Negara (GBN) Sumbar dengan Jendral Kiflan Zen, 7 Mei 2016.

Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk lebih memberikan dukungan dan menyatukan kekuatan bersama juga telah didirikan pula lembaga nasional Gerakan Bela Negara. Hari Jum'at, tanggal 11 Maret 2016, bertempat di auditorium Gubernur Sumatera Barat akan dilantik Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Bela Negara Propinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh H.Bachtiar Kahar dan Sekretaris Brigjen TNI(Purn) Dasiri Musnar. Proses pelantikan akan dipimpin oleh Ketua Umum DPP GBN Pusat dengan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat.

KEBUTUHAN PADA BELA NEGARA

Pasca reformasi yang ditandai dengan keterbukaan tanpa batas, membawa dampak yang tidak kecil terhadap ketahanan hidup berbangsa dan bernegara. Mudah masuknya pengaruh pemahaman berbagai ideologi, mulai dari ideologi yang menganut kapitalisme liberalisme sampai dengan yang berlatar belakang agama yang bersifat ekstrim, fanatik dan radikal, telah membawa perubahan tersendiri dan mulai menarik perhatian sebagian masyarakat. Kalangan terpelajar, khususnya generasi muda, mencoba mempelajarinya, dan memahami dan dalam batas tertentu dicoba diterapkan setelah selama lebih dari 30 tahun merasa terbelenggu oleh sistem pemerintahan orde baru.

Dampak tak sengaja beragam pemikiran baru tersebut, tidak dapat dibantah bawa akhir-akhir ini berbagai tindakan anarkis mulai muncul. Konflik bernuansa SARA, banyak orang yang berbicara mengatas namakan demokrasi dan mengatas namakan rakyat padahal secara nyata terbukti bertujuan untuk kepentingan kelompok, golongan bahkan pribadinya. Begitu juga melunturnya semangat kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk, dikarenakan semakin melunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Tidak berlebihan mengatakan bahwa di kalangan

pemuda tengah terjadi pengikisan kepribadian ataupun karakter dasar bangsa seperti rasa kebersamaan (gotong royong), semangat toleransi, tenggang rasa, saling menghargai dan menghormati. Idealisme hidup menegara mulai tersobek oleh kepentingan pragmatis dan hedonistik.

Kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dan berdiri tegak adalah atas perjuangan dengan segala pengorbanan harta maupun jiwa oleh bangsa Indonesia mengalami erosi yang drastis. Begitu juga hal bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah diakui oleh dunia serta ikut mewujudkan perdamaian dunia serta bebas dari segala penjajahan dan penindasan oleh bangsa-bangsa lain yang melanggar hak-hak azasi dan peradaban umat manusia adalah hasil perjuangan yang mestinya dirawat dan dijaga kemerdekaannya.

Bahwa Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang kaya raya merupakan amanah Tuhan agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan wilayah yang luas dari Sabang hingga ke Merauke harus tetap eksis dan harus dipertahankan dengan segala kekuatan yang ada pada bangsa Indonesia. Maka menanamkan keinsyafan dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai anak bangsa dalam memajukan serta mengembangkan kesatuan dan persatuan Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan perdamaian serta kedaulatan bangsa dan negara adalah upaya strategis yang harus dilakukan semua warga bangsa.

Kesadaran sebagaimana di atas, harus menjadi perhatian dan kesadaran semua elemen bangsa. Upaya kolektif dan melembaga untuk melakukan aksi bela negara hendaknya dilakukan sesuai konteks zaman sekarang. Bela negara saat jangan dipahami seperti pada zaman memperjuangkan kemerdekaan. Konsep bela negara saat itu berbeda dengan kondisi saat ini. Bela negara saat

ini sudah sangat kompleks karena termasuk pekerjaan membantu korban bencana, penanganan wabah penyakit, ancaman teroris dan gerakan radikal, serta berbagai ancaman lainnya.

Oleh dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara bela negara adalah kebutuhan semua warga bangsa. Meneguhkan dan memberikan makna yang lurus terhadap dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara adalah tujuan salah satu fundamental dar gerakan bela negara. Bagi GBN Pancasila telah final sebagai ideologi bangsa. Saat ini, lanjutnya, masyarakat tinggal memberi warna nilai-nilai Islam, kemoderenan dan keadaban sesuai semangat (spirit) para pendiri bangsa (*funding father*).

Banyak warga bangsa telah kehilangan konteks akan nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu adanya reaktualisasi kembali nilai-nilai Pancasila. Perlu adanya komitmen semua pihak agar Pancasila tidak hanya sekedar teori atau jargon belaka namun harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.

Perwujudannya adalah dengan menjadikan visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia

Realitas kehidupan berbangsa yang begitu cepat berubah dan terus diterpa oleh ujian yang berat, seperti melemahnya persatuan bangsa, konflik antar golongan, gesekan politik yang mengarah

pada disintegrasi adalah tuga suci sejarah yang hendaknya dikawal oleh elemen bangsa yang cinta nasionalisme dan NKRI sesuai amanat para pejuang bangsa. Gerakan bela negara diyakini akan menjadi besar dan mendapat perhatian luas bagi anak bangsa ketika arah gerakan ini sesuai cita-cita awal pendiriannya.

Kesadaran untuk menjamin keberlanjutan idealisme hidup bernegara sebagaimana diwariskan, NKRI dengan semangat batin dan sejarahnya, diyakini masih kuat tertanam di lubuk jiwa paling dalam warga bangsa yang cinta damai. Warga bangsa yang masih setia dan loyal pada semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945 dipercayai akan menjadi pilar utama tegaknya Gerakan Bela Negara. Keutuhan ideologi Pancasila bagi Indonesia adalah focus Gerakan Bela Negara. Meluruskan aparat negara yang tidak berdiri di atas landasan kebenaran dan kejujuran, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tindakan tercela lainnya, adalah tugas penting dan suci eksponen Gerakan Bela Negara. Selamat bekerja Pengurus Wilayah Gerakan Bela Negara (GBN) Propinsi Sumatera Barat. Semoga menjadikan kebaikan dan kebenaran menjadi pemandu gerakan ini. Amin. Ds. 632016.

PERAN FKUB MENFASILITASI JEMAAT AHMADIYAH ¹³

Sejak era reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara sering menghadapi keadaan disharmoni. Konflik dan pertentangan kelompok mudah saja terjadi, pengalaman menunjukkan bahwa di antara konflik yang mudah diprovokasi adalah konflik berlatar belakang agama. Begitu sensitifnya persoalan agama bagi masyarakat Indonesia, sehingga konflik sosial dan ekonomipun seringkali ditarik ke wilayah agama untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pemeluknya.

Fakta menunjukkan bahwa konflik antar-umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, melainkan oleh faktor ekonomi, politik maupun sosial, sebagaimana konflik yang terjadi di Ambon, Poso, dsb. Konflik antar-umat beragama banyak disebabkan karena persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau karena adanya salah faham di antara pemeluk agama. Konflik internal umat beragama, terutama terjadi karena adanya pemahaman keagamaan yang diselewengkan atau pemahaman yang “semau sendiri” tanpa mengikuti keadahaedah yang ada.

Untuk mewujudkan kerukunan diperlukan kehidupan yang harmonis antar seluruh warga negara. Hal ini akan terwujud, jika seluruh warga negara menyadari perlunya toleransi akan mengakui keragaman masyarakat Indonesia. Konflik dan kekerasan tidak dibenarkan oleh agama, karena semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Budha

¹³ Sosialisasi SKB 3 Menteri dan PEGUB No.17 Tahun 2011, 29 Agustus 2016 di Wisma Kemala Jln.Sudirman Padang.

mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamîn*).

PERAN DAN FUNGSI FKUB.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan-keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintahan di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintahan dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi Pemerintah Daerah. FKUB memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. FKUB Tingkat Propinsi mempunyai tugas : (1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;(2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;(3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan (4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan FKUB dibentuk Dewan Penasehat pada propinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas : (1) Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan (2) Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antara sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

JEMAAT AHMADIYAH DI SUMATERA BARAT.

Dalam hal berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah FKUB berperan mensosialisasikan Keputusan bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung dan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2008 Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat tentang larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah di Inonesia. Khususnya bagi Propinsi Sumatera Barat Gubernur telah menetapkan peraturan Gubernur No.17 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Propinsi Sumatra Barat.

Realitas kehidupan bahwa manusia hidup dalam satu dunia yang beragam adalah fakta yang tak mungkin dipungkiri. Kesiediaan menerima adanya pluralistik, dalam makna kemajemukan, adalah bentuk pemuliaan terhadap sunnah kehidupan. Penyamaan pengertian pada konsep dasar pluralistik atau kemajemukan mesti terus disosialisasikan secara lebih luas, dewasa dan tegas. Pluralistik arti aslinya adalah mengakui, menerima dan menyambut dengan hati terbuka akan adanya keragaman. Beragam suku, ras, warna kulit, agama, kepercayaan, budaya dan sosial kemasyarakatan adalah kenyataan hidup.

Setiap umat beragama dalam hubungan sosial kemasyarakatan wajib menerapkan pluralistik atau kemajemukan, karena pluralistik adalah keharusan kehidupan. Sedangkan berhubungan dengan teologi, iman, ibadah dan keyakinan agama tidak dikenal

istilah pluralistik atau kemajemukan, ia harus tunggal, utuh, mono dan setiap pemeluk agama wajib hukum meyakini sepenuh hati akan kebenaran dan kebaikan agamanya. Tidak boleh ada sedikit jua keraguan akan kebenaran agama yang dianut. Meragukan iman sama dengan tidak beriman.

Kepastian pengertian pluralistik hanya pada aspek hubungan antar manusia adalah pemikiran yang akan memudahkan penerimaan tentang keragaman. Sedangkan pengertian pluralistik yang dipukul rata dalam semua sisi kehidupan, termasuk pada segi keyakinan, ibadah dan hubungan dengan Tuhan adalah penyesatan yang berdampak serius bagi pengikisan nilai dan pengaburan kesucian agama. Penghargaan pada kemajemukan hanya dapat berlangsung bila setiap individu pemeluk agama cerdas, jujur dan terbuka dalam memaknai konsep pluralistik atau majemuk itu sendiri. Pengaburan istilah pluralistik, ataupun pluralisme pada bidang *core* agama, yaitu iman, ibadah dan ajaran mutlak lainnya adalah bahaya yang merusak setiap agama.

Bingkai teologis ini seharusnya menjadi acuan dalam hubungan antar-umat beragama, antar-warga negara, dan antar-manusia secara keseluruhan. Untuk mencapai kesatuan dan persatuan harus mencari *common denominator*: suatu persamaan kriteria pengikat dalam satu pokok, senasib. *Pertama, Ukhwah Insaniyah* yaitu persaudaraan diantara sesama manusia, secara menyeluruh. (QS. Al-hujurat, 13). *Kedua, Ukhwah Rabbaniyah* yaitu ikatan diantara mereka yang percaya kepada TME. al-Anbiya':107. *Ketiga*, yang lebih khusus adalah *Ukhwah Islamiyah* yang berarti ikatan persaudaraan sesama umat Islam. (QS.al-Hujurat :9-10).

Bahaya yang mengancam kerukunan antar umat beragama, termasuk dengan Jemaat Ahmadiyah disebabkan hadirnya sifat *al-ghuluw* dalam beragama. Seseorang merasa bangga terhadap dirinya. Seseorang tidak mau disalahkan dan tidak mau mengakui kebenaran dari orang lain. Hilangnya tokoh suri tauladan bai

umat. Langkah yang hendaknya dikembangkan tidak memakai agama sebagai jargon untuk kepentingan sesaat. Sebaliknya agama menjadi inspirasi dalam kehidupan bersama, menjadi moralitas publik. Tokoh agama-agama perlu membaharui diri, tidak sibuk dengan urusan intern, melainkan menghadapi tantangan riil dalam era modern. Kita tidak ingin konflik agama. Kita ingin rukun, itu semua perintah agama. Realitasnya konflik lanjutan sejarah.

Sumber konflik ada 3 model (1) Melecehkan Nabi (2) Pemutarbalikan ajaran Islam dan (3) Pemurtadan thdp umat Islam. Kerukunan dan konflik keagamaan sangat ditentukan oleh masyarakat bawah maka untuk itu perlu diperbanyak program kerukunan yang bersifat pemberdayaan arus bawah. Penguatan peran FKUB untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah yang sering ricuh. FKUB menjadi penting untuk menerjemahkan. Peran pemberdayaan tokoh dan umat beragama sebagai katup pengaman antara Pemerintah dan umat beragama. Penguatan reduksi konflik yang akan terjadi dan melokasir konflik. Perpecahan internal itu terjadi seperti aliran sesat, liberal, radikal. Agama baru, misalnya Baha'i, Agama Tao tidak mesti difasilitasi negara. Kepentingan ekonomi dan sosial politik tidak boleh merusak kerukunan. Sikap untuk memelihara kerukunan agar terjaga: takut mencederai orang lain, termasuk beda agama. Umat bisa menerima ada pluralitas- termasuk agama- menghargai perbedaan, tapi tidak membeda-bedakan. Kordinasi, dialog komunikatif, menghidupkan kearifan local, identitas agama kita dipertahankan tanpa harus mengusur akidah.

Mencermati kondisi terkini, dapat dikatakan bahwa di Sumatera Barat Jemaat Ahmadiyah belum sepenuhnya dapat melaksanakan kehendak SKB No.3 tahun 2008 tentang pelarangan Ahmadiyah dan Pergub 17 tahun 2011 tentang pelarangan Ahmadiyah pengembangan alirannya di Sumbar. Faktanya terjadi pada diri saya sendiri, pada hari Rabu, 3 Februari 2016 sekitar pukul 11.00

siang saya kedatangan tamu 6 orang, yang sebelumnya tidak pernah menghubungi saya. Pertanyaan pertama saya dari mana bapak-bapak, ia menjawab dari Masjid Berkah, Sawahan Buya, langsung saya bilang Ahmadiyah ya, mereka jawab ya. Setelah mereka duduk ia memperkenalkan diri, satu orang berana Abdul Malik dari Jokyarakta, pengurus Pusat Ahmadiyah Jakarta. Satu orang dari Pasaman Barat, 1 orang dari Bukitting, mubaligh Ahmadiyah, dan 3 orang dari Parak Gadang Padang.

Pertanyaan pertama saya kepada pimpinan pusat kedudukan terakhir dari Ahmadiyah, apa sudah perubahan setelah ada penelitian dari BALITBANG KEMENAG Pusat. Jawab mereka masih belum ada perubahan. Dalam dialog tersebut saya menyampaikan pandangan, kami minta Ahmadiyah tidak berdakwah dan memprovokasi masyarakat, ini akan membawa dampak tidak baik, dan mengganggu keamanan.

Pada akhir pertemuan saya diberikan 6 buah buku, (1) *Haqiqatu Wahyi*, oleh Syayidina Mirza Gulam Ahmad al-Qadiyani, Bahasa Arab, diterbitkan di Islamabad, 2010. (2). *Tafsir al-Kabir* Jilid I, oleh Hadharat Mirza Basyir al-Din Mahmud Ahmad RDA, Penerbit Islamad, 1992. (3) *al-Qaul al-Sharib Fi Zhubril Mabdi wal maseh*, oleh: Nadzir Ahmad Mubasyir As Syalakuty, (4). *Falsafah al-Ta'lim al Islam*, Syayidina Mirza Gulam Ahmad al-Qadiyani, Bahasa Arab, UK Kingdom, 1996. (5). *Inti Ajaran Islam, Babagian Pertama*, oleh Syayidina Mirza Gulam Ahmad al-Qadiyani, Bahasa Indonesia, Neratja Press, Bogor. (6). *Penjelasan Ahmadiyah*, oleh Muhammad Saddiq Bin Baraktullah, Penerbit Neratja Press. Saya juga diberi 2 CD dan brosur tentang Ahmadiyah di Indonesia. Secara akademik ini tidak masalah bagi saya, akan tetapi sebagai sikap keimanan dan fungsi keulamaan ini sangat tidak baik dan merusak iklim keagamaan.

Keadaan yang sama juga dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah Sumatera barat pada beberapa tokoh. Untuk meresponi kondisi

ini FKUB Sumatera Barat bersama Majelis Ulama difasilitasi KESBANG telah dilakukan dialog pada tanggal 27 Maret 2016 di Gubernuran dengan kesimpulan, antara lain, (1) Meminta Pemda memfasilitasi dialog rutin tokoh agama dan ormas dalam menyikapi radikalisme, terorisme, aliran menyimpang dan masalah keamanan lainnya. (2) Perlu terus dikembangkan dan diperkuat kordinasi Kesbang, TNI, Polri, Kajati dengan tokoh agama, dan pimpinan ormas dalam menyikapi berbagai keadaan yang terjadi, dan berpotensi terjadi. (3)Menyikapi gerakan Ahmadiyah yang menyebarkan pahamnya bagi tokoh dan umat Islam di Kota Padang dan Sumatera Barat dimohon menindaklanjutinya dengan membahasnya pada Bakor PAKEM Sumatera Barat.

PENUTUP.

Peran FKUB dalam memfasilitasi Jemaat Ahmadiyah adalah menjembatani perbedaan pendapat dan meminta Jemaat Ahmadiyah mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Jemaat Ahmadiyah tidak elok, diyakini akan menjadi pemicu, jika masih juga menyampaikan penyiaran pahamnya bagi tokoh dan umat Islam di Sumatera Barat. Siapapun tokoh, ulama, mubaligh dan umat Islam akan tetap loyal dan patuh pada aturan dan bimbingan paham keagamaan yang sejak awal sudah mendarahdaging dalam kehidupan keagamaanya. Paham keagamaan yang nyata-nyata berbeda dan sudah diputuskan melalui penelitian mendalam jelas akan ditolak umat, dan berpotensi mengganggu kerukunan (disharmoni).

Kasus atau konflik yang berlatar agama hampir semua bermula ketika etika sebagai pengembala diabaikan. Tindakan melawan hukum, pembiaraan, pemaksaan kehendak, tidak mengindahkan norma, adat dan budaya lokal dalam menyiarkan agama dan atau menjalan misi paham yang sudah diputuskan diluar aturan adalah menyimpan potensi konflik. Kerukunan dan harmoni akan

efektif ketika adat, norma dan sopan santun sosial dapat dihargai, dipatuhi dan dipedomani semua pihak. Semoga semua komponen umat beragama, dan aparat yang berwenang memahami adanya. Ds. 28082016.

MELIANA, BENCANA KERUKUNAN¹⁴

Meliana adalah nama seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Tanjung Balai Sumatera Utara. Nama Meliana sontak dikenal luas dan diperbincangkan di media massa, media sosial dan dalam perbincangan pemuka agama, pengamat dan masyarakat umum yang cinta damai, karena ia dicatat oleh tinta gelap sejarah bangsa Indonesia sebagai pemantik kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai Sumatera Utara.

Meliana, isteri Atui, etnis Tiongha sebenarnya sama dengan warga lain, hanya saja ia menjadi populer ketika media melaporkan bahwa ia adalah sosok perempuan yang menjadi pangkal kasus atau asal muasal terjadinya kerusuhan yang berujung pembakaran 8 Vihara dan 4 buah dirusak massa. Krisis ketidakpercayaan antar kelompok penganut agama dan konflik horizontal yang mencekam di Tanjung Balai tersebut adalah aib sejarah, dan musibah kerukunan yang sangat mengganggu harmoni umat beragama secara luas di nusantara.

Alasan terganggunya penganut agama lain oleh pengeras suara di Masjid, Mushalla dan rumah ibadah umat Islam yang menjadi alasan protes Meliana, sulit diterima akal sehat. Sudah ratusan tahun masanya umat Islam dengan umat lain hidup secara berdampingan, saling bertegur sapa, saling menjaga kegiatan ibadah antara kelompok umat yang beda agama, begitu juga sudah tertanam dalam memory masyarakat yang berbeda agama bahwa masalah perbedaan selalu dapat diselesaikan dengan adat ataupun kearifan lokal.

¹⁴ Dimuat Teras Utama Padang Eskpres, 2 Agustus 2016.

ALUR DAN ALIR

Mencermati alur dan alir peristiwa kerusuhan Tanjung Balai amat sangat patut ditelisik lebih dalam. Apakah memang sesederhana yang dilaporkan media, hanya gara-gara protes Meliana? Mengapa Meliana menjadi begitu garang dan massa menjadi tersulut?. Alir dan alur peristiwa tidak mudah menerkannya, kecuali mereka yang terlibat dalam kejadian itu. Aparat diminta untuk mengungkap kasus ini dengan jelas untuk bahan ajar bagi kerukunan bangsa di masa datang.

Modus kerusuhan antar umat beragama memang tidak selalu sama. Terjadinya krisis kepercayaan dan konflik pemeluk antar beda agama akhir-akhir ini perlu dipertanyakan lebih dalam dan jelimet. Mengapa Meliana di Tanjung Balai berani nian untuk ngotot dan bagaimana proses penyelesaian berlangsung? Mengapa hanya soal yang sederhana, soal pengeras suara saja kok bisa memicu kerusuhan berskala luas? Bagaimanaantisipasi aparat? Banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan. Yang jelas satu keadaan tidak mungkin berdiri sendiri, ia memiliki sambungan dengan variabel lain.

Pelaku pemantik kerusuhan yang bermain solo, sepertinya juga di Pasaman beberapa waktu lalu, ada pemuda yang menginjak al-Qur'an lalu dipublikasi di media sosial, ada orang tak dikenal yang membakar sajadah, adalah modus baru yang harus dibaca lebih hati-hati dan tidak disimplikasikan begitu saja. Pendekatan hukum dan aturan belum tentu dapat mencegah prilaku menyimpang dan bukan tidak mungkin akan menambah masalah baru.

AKAR DAN ASAL

Pengalaman hidup bangsa Indonesia yang sejak awalnya rukun, damai, toleran dan saling menghargai kini tercabik oleh kelancangan prilaku beberapa orang saja. Sedih, pilu dan prihatin

orang yang cinta damai, dan harmoni melihat saudaranya gagal dalam menghadapi ujian krisis dan konflik diri yang dilapiaskan dalam konflik sosial. Kompetisi kehidupan yang mestinya hal biasa dan lumrah, dimana kalah dan menang adalah wajar, lalu dipaksakan agar terus menang. Ekses yang tak terelakkan dari pemaksaan kehendak adalah perlawanan yang jelas akan membawa korban orang atau pihak yang tak berdosa.

Kerukunan yang sekian waktu lalu dibangun dengan pendekatan doktrin kekuasaan, dari atas ke bawah, dalam perjalanan waktunya menjadi lapuk dan membusuk. Era keterbukaan dan kebebasan menjadi saksi akan rapuh dan lusuhnya kerukunan yang dibakukan secara paksa. Menurut kajian antropologi orang Timur itu lazimnya santun, suka bermusyawarah, beradab, toleran dan tidak mudah diadu domba, karena memang budaya timur itu didasarkan pada keseimbangan. Keserasian alamiah itulah yang kemudian dikenal dengan kearifan yang sudah hidup kuat dihati orang Indonesia yang majemuk.

Mencermati akar dan asal krisis dan konflik bernuasa SARA di era otonomi ini mengindikasikan melemahnya norma agama, moral, budaya dan adat dalam menuntun perilaku individu. Padahal, norma ketimuran menolak konflik dan terus memotivasi harmoni sebagai wujud dari keseimbangan. Hal paling mendasar yang tak boleh abai diperhatikan adalah “sosok” manusia dibelakang panggung yang mengaktori sebuah peristiwa. Bencana kerukunan umat beragama, berupa krisis kepercayaan antara pemeluk agama dan konflik horizontal antar umat beragama, adalah pemecah persatuan, peruntuh NKRI, perusak bhnika tunggal Ika yang sangat berbahaya, waspadalah, waspadalah.

TAWARAN SOLUSI

Recoveri mental harmoni pasca hancurnya kerukunan tidaklah semudah memantik kerusuhan. Ada beberapa tawaran agenda yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan;

Pertama: Peningkatan kapasitas pemahaman umat. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pemahaman nilai-nilai ketuhanan semua agama. Penguatan visi damai yang ada dalam norma setiap agama hendaklah terus dilakukan. Dalam kehidupan berbangsa terus dikembangkan kondisi kerukunan dinamis. Kerukunan dinamis pada dasarnya adalah menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, agama dan atau kelas sosial lainnya. Kerukunan dinamis bukanlah menyamaratakan hak dan kewajiban antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Begitu juga, tidak pula memberikan hak-hak khusus kepada satu kelompok dengan mengabaikan kelompok lain, akan menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang, adil dan proporsional. Kerukunan dinamis mengharamkan tirani minoritas dan dictator mayoritas.

Kerukunan dinamis memberikan kesadaran kolektif bahwa adalah masuk akal, logis dan adil pemeluk agama yang memang mayoritas dalam satu kawasan mendapat hak-hak yang wajar untuk mengekspresikan dirinya sebagai umat dan warga bangsa. Kerukunan dinamis meniscayakan umat Islam menggunakan pengeras suara dalam azan, khotbah, takbir idul fitri dan even yang memang membutuhkan syiar agamanya. Tidaklah berlebihan permintaan umat, yang hanya mohon dihargai secara proporsional pula. Akan tetapi tentu juga perlu diperhatikan kepatutan sosial.

Kerukunan dinamis adalah juga memberikan jaminan akan kebebasan melakukan aktifitas keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya satu kelompok tanpa mengganggu nilai, martabat dan harga diri kelompok lain yang berbeda. Kerukunan dinamis akan efektif dan dapat dilakukan dengan baik bila “wasit” (pemerintah, tokoh agama dan pengiat civil society) memiliki sikap jujur, ikhlas dan tidak menjadi sumber masalah. Pesan yang patut diingatkan janganlah sampai tongkat yang membawa rebah.

Dalam konteks Islam, kitab suci mengajarkan bahwa keberadaan umat dan agama lain adalah niscaya. Al-Qur'an mendidik umat bahwa agama apapun adalah tidak sama dengan Islam. Kebenaran agama Islam adalah pasti bagi pemeluknya. Akan tetapi itu bukan berarti, umat Islam boleh menghakimi orang yang tidak seagama dengan nya. Islam menegaskan bahwa hanya Allah di akhirat kelak yang memiliki wewenang mutlak untuk menentukannya. Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iiin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.* (QS.22:17).

Kedua, kordinasi yang lebih terukur antara pemuka agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah dan aparat keamanan guna untuk memudahkan menemukan akar masalah. *Ketiga*, komunikasi yang efektif dan produktif oleh penentu kebijakan tentang berbagai keadaan yang ada, termasuk ketimpangan ekonomi, perlakuan hukum yang berat sebelah, dan tindakan oknum yang berpotensi menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan sosial. *Keempat*, kendali yang cepat dan akurat pihak keamanan.

Pembiaran terhadap virus perusak kerukunan adalah menyimpan bom waktu yang akan mengguncurkan bumi kerukunan. Krisis ketidakpercayaan dan konflik adalah bencana kerukunan yang merugikan semua orang dan masa depan bangsa. Sekecil apapun bara api konflik harus segera dipadamkan. Perbuatan orang perorang hendaknya diselesaikan secara individual pula. Menjadi dewasa dalam berbangsa, sulit diwujudkan apabila setiap ketidaksukaan atau ketersinggungan selalu diselesaikan dengan konflik dan anarkis. *Nauzubillahi menzalik.* Ds.01082016.

KEARIFAN LOKAL UNTUK KEBANGSAAN¹⁵

Bangsa Indonesia merupakan gambaran bangsa yang majemuk, membawa banyak perbedaan dan keragaman karakter. Indonesia sangat unik, karena masyarakatnya tinggal di daerah yang terpisah (akibat batas geografis) dengan sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda pula. Adanya keberagaman memiliki probabilitas yang tinggi dalam menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, diversitas ini perlu dibarengi dengan suatu keseragaman atau konsensus, yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang khusus.

Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak bangsa senantiasa menggelorakan semangat kebangsaan bangsa Indonesia dengan menanamkan sejarah kebangsaan. Bung Karno selalu menanamkan kejayaan dan kebesaran bangsa Indonesia melalui pemahaman sejarah kebangsaan. Sejarah kebangsaan itu dapat membentuk nilai-nilai dasar kebangsaan dan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan adalah penggerak nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa dan menjadi ruh bangsa Indonesia. Nilai kebangsaan merupakan suatu komponen penting yang wajib dimiliki setiap insan di Indonesia. Yang dimaksud dengan nilai kebangsaan adalah nilai intrinsik yang terkandung di dalam hati, yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk membangun rasa kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Konsensus negara Indonesia ada empat macam dengan masing-masing hakikat nilai kebangsaan yang terkandung di dalamnya, diantaranya: (1) Pancasila, (2) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), (3). Bhinneka Tunggal Ika dan (4). Undang-Undang Dasar 1945. Kini, tantangan terbesar bangsa ini adalah

¹⁵Disampaikan pada pelatihan T.o.T Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Nilai-Nilai Kebangsaan di provinsi Sumatera Barat (Kota Padang), tanggal 19 s.d 28 juli 2016

menyadarkan betapa pentingnya mereaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan ditengah erosi zaman. Dibutuhkan mobilisasi kesatuan solidaritas dan kemandirian berdasarkan prinsip keadilan sosial yang menjadi substansi dari nilai-nilai keagamaan. Untuk itu dibutuhkan suasana batin masyarakat yang kondusif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Satunya di antaranya melalui pengembangan kearifan lokal dalam makna dan interpretasi kekiniaan.

PENGEMBANGAN KEARIFAN LOKAL.

Kearifan lokal (*local wisdom*) dalam kamus terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan lokal) adalah gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang

diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkan sebagai tradisi.

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal.

Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah sebagai berikut, (1)mampu bertahan terhadap budaya luar,(2)memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,(3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, (4).mempunyai kemampuan mengendalikan,(5).mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

Dalam kaitannya dengan kebangsaan, kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas bangsa, terlebih dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal bertransformasi secara lintas budaya yang pada akhirnya melahirkan nilai budaya nasional. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofi dan pandangan hidup yang mewujud dalam berbagai bidang kehidupan (tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya). Kearifan lokal (yang sesungguhnya dapat dipandang sebagai identitas bangsa) tidak akan bermakna apa pun tanpa dukungan ideologi yang berpihak kepadanya.

Kearifan lokal dapat dirasakan dalam hampir setiap suku bangsa yang sudah memiliki kebudayaan dan peradaban. Sebagai contoh, suka bangsa Minangkabau. Minangkabau memiliki sistem kekerabatan yang unik dan beda dengan daerah lainnya yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan menurut garis keturunan Ibu, itu menjadikan wanita di Minangkabau menempati posisi yang sangat penting dalam kaumnya. Sistem matrilineal tersebut menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat Minang sejak dahulu sampai dengan saat sekarang ini.

Nilai kearifan lokal seorang Bundo Kanduang, wanita di Minangkabau dituntut untuk menjadi seorang yang taat beragama, cerdas, berbudi pekerti yang baik, bijaksana, dan sifat-sifat terpuji lainnya. *"Tabu di mudharat jo manfaat, mangana labo jo rugi, mangatabui sumbang jo salah, tabu di unak kamanyangkuiik, tabu di rantiang ka mancucuaik, ingek di daban ka mahimpok, tabu di angin nan basiruiik, arib di ombak nan basabuang, tabu di alamat kato sampai"*. Nilai kearifan lokal perempuan menenpatkan dia adalah seorang pemimpin (pemilik suku) yang harus menjadi teladan yang penuh dengan kearifan serta menjaga nama baik keluarga ataupun sukunya. Seorang wanita hendaklah hati-hati dalam bertutur kata supaya tidak ada orang yang tersinggung dan dalam berjalan haruslah memperhatikan langkahnya agar sesuatu yang dilakukan tidak mendatangkan mudarat nantinya, sesuai dengan ungkapan *"bakato sapatah di pikiri, bajalan salangkab maliek suruiik, muluik tadorong ameh timbangannyo, kaki tataruang inai padahannyo, urang pandorong gadang kanai, urang pandareh hilang aka"*. Selain itu, kaum wanita juga harus selalu taat beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya, rendah hati, dan sopan santun. Kaum wanita harus bisa menjadi panutan bagi anak cucunya, harus hidup hemat sebagai pemilik harta kekayaan, tidak boleh berfoya-foya karena harta tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup anak cucunya kelak. Sehingga, setiap suku di Minangkabau dapat dipastikan memiliki harta benda pusaka masing-masing.

Kearifan lokal yang besarnya sumbangan bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan adalah berlakunya SISTEM MATRILINEAL, yaitu sistem waris harta pusaka tinggi yang berpuncak dan turun temurun pada garis ibu. Saat ini, di seluruh dunia, hanya terdapat 4 (empat) suku bangsa yang menganut sistem Matrilineal, yaitu sebuah suku bangsa di benua Afrika, sebuah suku Indian di benua Amerika, sebuah suku di India dan satu-satunya suku di nusantara yaitu Minangkabau. Sistem matrilineal dengan segala sub-sistemnya adalah “Tiang Agung Minangkabau” kata alm 'Buya Hamka'. Hak Waris Harta pusaka tinggi sebagai sub sistem dari sistem Matrilineal, tetap dijaga keberadaannya. Harta pusaka tinggi adalah harta bersama sebuah kaum, adalah harta bersama untuk dinikmati, bukan harta untuk dibagi-bagi. Pewarisan harta pusaka tinggi adalah hanya sekedar peralihan peran, bukan peralihan milik. Harta pusaka tinggi turun dari niniek ka mamak, dari mamak ka kamanakan dan seterusnya ka bawah menurut garis ibu. Harta pusaka tinggi tak boleh berpindah tangan karena diperjual-belikan. Harta Pusaka tinggi adalah sebagai bukti “asal-usul” seseorang atau kaum.

Seseorang dapat dikatakan adalah keturunan Minang, hanya apabila masih mempunyai harta pusaka tinggi. Dalam adat, ini dikatakan: *“Nan ba pandam ba pakuburan, nan basasok bajarami, kok dakek dapek dikakok, kok jauh dapek diantakan”* Apabila sebuah keluarga atau kaum tak lagi punya harta pusaka tinggi, orang atau keluarga itu tidaklah lengkap keminang kabauannya, bahkan sudah dianggap punah. Mereka tak perlu lagi punya panghulu, karena adat berdiri diatas pusaka tinggi.

Kearifan lokal yang memberikan dukungan terhadap kebangsaan adalah sitim nagari. Nagari mempunyai seperangkat mekanisme adat untuk mengatur segala bentuk hubungan sosial, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Nagari diatur

dengan prinsip *tali tigo sapilin*: yaitu pertautan antara hukum adat, syari'at Islam dan hukum negara (atau Undang-Undang).

Kearifan lokal yang juga patut dimengerti dan didialogkan dengan nilai-nilai kebangsaan adalah hubungan antara adat dan Islam, orang Minang berpegang pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (atau disingkat ABS dan SBK)*, untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan antara hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Pemerintahan Nagari yang otonom dipegang secara kolektif dengan prinsip tigo tungku sajarangan (nirik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai), dan pengambilan keputusan dilakukan melalui permusyawaratan antara pemimpin dan kaumnya di Nagari.

Kini, Nagari tumbuh menjadi unit pemerintahan lokal yang menggabungkan antara prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan nilai-nilai adat lokal. Para golongan tua di Nagari cenderung menggunakan referensi masa lalu untuk menata kembali Nagari. Misalnya, kembali ke Nagari berarti kembali ke adat dan kembali ke surau. Semua hal yang terkait dengan Nagari harus diatur dengan adat. Nirik mamak, misalnya, harus difungsikan kembali tanggung-jawabnya kepada kemenakan dalam kerangka keluarga besar (*extended family*).

Kearifan lokal juga memiliki sumbangan untuk kesejahteraan. Prinsip pemanfaatan manusia orang Minang itu sangat rasional dan objektif sekali. Bahkan, pemanfaatan lahan bagi orang Minang sangat selektif. Tak ada lahan yang tak berguna bagi orang Minang. Semua lahan termanfaatkan sesuai bentuk, lokasi dan jenisnya. Sesuai dengan pepatah: "*Nan lurah tanami bambu, nan lereang tanami tabu, nan padek kaparumahan, nan gurun buek ka parak, nan bancab dibuek sawah, nan munggu kapakuburan, nan gauang ka tabek ikan, nan padang kapaimpauan, nan lambah kubangan kabau, nan rawang payo kaparanangan itiak*".

Berkenaan dengan falsafah masyarakat Minangkabau, yang juga dapat dikatakan sebagai kearifan lokal, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* adalah menunjukkan bahwa orang Minangkabau memiliki budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, tidak berlebihan jika masyarakat Minangkabau dikatakan masyarakat yang religius. Religiusitas masyarakat Minangkabau tercermin dalam petatah, petitih, mamangan, petuah, yang dipakai dalam berbagai rangkaian kegiatan ke-adatan. Falsafah Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah memberi format yang jelas akan identitas masyarakat Minangkabau. Falsafah adat tidak menafikan bahwa masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat yang majemuk, bahkan memberi ruang kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan Hak Asasi Manusia, namun lahirnya otonomi daerah seakan memberi ruang bagi masyarakat Minangkabau untuk memberdayakan identitas budaya lokal ke dalam regulasi-regulasi “kedaerahan” yang seharusnya disesuaikan dengan nilai dasar “alam takambang jadi guru”

Selain memiliki budaya tinggi dan karakteristik yang kuat, masyarakat Minangkabau juga mempunyai institusi yang mapan untuk menopang pola hidup dan tingkah laku anggota masyarakatnya. Pola tingkah laku dalam beradat dan beragama diatur sedemikian rupa dalam wadah yang sering disebut oleh komunitas lokal dengan surau, nagari, dan suku. Sebagai masyarakat adat, masyarakat Minangkabau meyakini bahwa norma-norma, tata nilai yang terkandung di dalam ajaran adat merupakan pedoman hidup yang didasari oleh kontemplasi yang dalam terhadap fenomena alam. Nilai filosofis yang terkandung ajaran adat itu dimaknai sebagai falsafah hidup, sebagaimana pepatah Minang mengatakan *Panakiak pisau sirauik, Ambiak galah batang lintabuang, Salodang ambiak ka niru, Nan satitiek jadikan lanik, Nan sakapa jadikan gunung, Alam takambang jadikan guru* (Moenir 1985:47).

Bersamaan dengan penguatan kearifan lokal, dapat dielakkan bahwa di antara kearifan lokal Minangkabau mengalami dinamika. Pertanyaan yang sering diajukan, Mengapa sistem matriarkat dan Islam dapat hidup berdampingan di Ranah Minang? Padahal keduanya mengatur tata aturan yang saling bertolak belakang. Solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sistem matrilineal dengan pola ABS – SBK, yaitu seorang anak bernasab kepada ayah dan bersuku ke ibu. Dengan demikian kedudukan wanita didalam keluarganya tidak tegeser oleh batasan agama.

Falsafah adat Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaiak mamakai, alam takambang jadi guru* (adat bersendi syariat, syariat bersendi al-Quran, syariat berkata adat memakai, alam terbentang menjadi guru) dijelaskan dengan: 1. "*Syarak mangato adat memakai*". Kata-kata syarak diambil dari Al-quran sunah dan fiqih, akhirnya dipakai dalam adat. 2. "*Syarak bertelanjang-adat bersamping*." maknanya syarak terang dan tegas, sedangkan adat diatur berdasarkan prosedur yang benar berdasarkan membaca yang tersurat, tersirat dan tersuruk, selanjutnya juga mempertimbangkan sesuatu itu dengan seksama dan bijaksana. 3. "*Adat yang kawi, syarak yang lazim*." Artinya adat tidak akan berdiri kalau tidak dikawikan atau dikuatkan. "*Kawi*" berasal dari bahasa Arab "*qanyyun*" berarti kuat. Syarak tidak akan berjalan kalau tidak dilazimkan atau diwajibkan. Lazim artinya biasa, namun lebih aktif dari wajib. Wajib artinya berdosa kalau ditinggalkan. Lazim artinya berpahala atau dikerjakan. "*Zim*" dikenakan sanksi siapa yang tidak mengerjakannya.

Dalam konteks lahirnya aliran dan faham keagamaan yang menyimpang dan berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, maka bagi masyarakat Minangkabau itu jelas diluar kualifikasi gerakan keagamaannya sangatlah berbeda. Gerakan keagamaan yang muncul diluar kesesuaian dengan adat dan syarak adalah ini dipercayai memiliki motif dan modus baru yang

harus diwaspadai karena memiliki muatan pembusukan politik bernuansa kriminalitas dan makar. Kearifan lokal Minangkabau menolak pola dan cara penjelasan konsep-konsep ajaran agama Islam yang diselewengkan serta dieksploitasi dengan pemaksaan, sehingga anggota tergiring untuk melakukan tindakan kriminal”.

Pandangan bahwa keimanan dan kemusliman seseorang jika hendak diterima Allah SWT harus berada dalam territorial Negara Islam sejak awal tidak diterima oleh adat dan syarak sebagai kearifan lokal orang Minangkabau, beragama dan beradat adalah terbuka, moderat dan dapat berdialektika dengan kemajuan. Nilai dan paham keagamaan yang didoktrinkan aliran sempalan, bahwa tidak syah keislaman seseorang bilamana ia masih mengakui aturan sistem bernegara selain aturan Allah SWT yang telah diatur dalam Negara Islam Indonesia, adalah bertentangan dengan nilai ABS-SBK, dan SM-AM.

Nilai Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa pada dasarnya memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: (1). Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; (2). Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan besatu; (3). Cinta akan tanah air dan bangsa; (4). Demokrasi atau kedaulatan rakyat; (5). Kesetiakawanan sosial; (6). Masyarakat adil-makmur.

Kearifan lokal atau local wisdom adalah istilah yang mengacu kepada nilai kearifan yang bersifat tradisional dan dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun. Wacana ini muncul sebagai reaksi atas konsep rasionalisasi di bawah payung modernisasi yang mencoba mengeliminir peran kearifan lokal ini dalam sistem kosmologi masyarakat dengan lembaga-lembaga formal yang dianggap lebih rasional. Kearifan lokal adalah produk budaya (*cultural product*), dan agama sebagai salah satu produk dari budaya itu. DS.



INDONESIA

BERAGAMA DAN BERAGAM, YES!¹⁶

Wajar dan masuk akal umat dan bangsa tersinggung ketika ada perilaku dari sebahagian anak bangsa yang tidak memuliakan kehidupan beragama dan menolak kehidupan yang beragama. Penyakit sosial yang mestinya diobati justru oleh sekelompok orang diorganisir dan diberi penghargaan (*reward*), seperti perilaku menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual), adalah musibah kemanusiaan. Agama, kepercayaan dan keyakinan apapun diyakini menolak perilaku menyimpang yang menyesatkan dan membahayakan komunitas manusia.

Pikiran cerdas sangat mencemaskan saat negara, diwakili aparat pemerintah, abai memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan. Pembiaran sistemik terhadap kaum minoritas yang seharusnya dibina untuk dikembalikan ke jalan yang benar dan lurus, justru diorganisir oleh kelompok masyarakat tertentu dan diberikan posisi sepertinya kelompok yang wajar dan biasa saja, tidak berlebihan jika keadaan seperti itu dikatakan sebagai peremehan terhadap kemanusiaan yang bermartabat.

NEGARA BANGSA DAN UMAT.

Kenyataan bahwa Indonesia didiami oleh penduduk yang beragama adalah fakta yang sudah diterima secara sosiologis, antropologis dan yuridis. Kepastian hukum dan dukungan sosiologis bahwa Indonesia adalah negara yang hanya boleh dihuni oleh penduduk yang beragama. Tidak ada tempat dan kedudukan yang boleh dimiliki oleh manusia yang tak beragama di negeri ini. Dalam bahasa agama, haram hukumnya melakukan pembiaran terhadap pihak mana saja dan siapa saja yang menentang kehidupan beragama di Indonesia.

¹⁶ Teras Utama Harian Padang Eskpres, 3 September 2016.

Tidak ada alasan hukum, sosial dan budaya yang membolehkan orang tidak beragama, anti agama, komunis, ateis dan segala bentuk pemahaman yang melecehkan agama. Agama bagi masyarakat Indonesia adalah sendi dasar kehidupan yang tidak boleh ditawar sedikit juapun. Indonesia sebagai bangsa beragama adalah warisan sejarah yang wajib dijaga dan dipertahankan.

Bersamaan dengan beragama, bangsa Indonesia menyadari dan menghargai bahwa kehidupan bangsa Indonesia itu adalah juga beragam. Beragam semakna dengan majemuk tidak berarti menafikan beragama. Tidaklah patut keberagaman (majemuk) itu juga melindas keberagamaan. Siapapun dalam kapasitas apapun harus sadar dan menyadarkan bahwa negeri ini direbut kemerdekaannya oleh para pejuang dari tokoh agama dan umat beragama yang taat. Peran agama dalam perjuangan dan penegakkan negara Indonesia tidak sedikitpun diragukan, lihat saja daftar nama pejuang dan pahlawan yang sudah ditetapkan negara.

Kedudukan negara bagi umat beragama di Indonesia sudah tidak dipersoalkan lagi. Negara Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhnika Tunggal Ika adalah empat konsensus nasional yang juga sering disebut dengan empat pilar bangsa sudah final bagi umat beragama. Posisi agama dan kebebasan umat beragama dalam menjalankan kehidupan beragamanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara juga sudah mendapat jaminan konstitusi seperti yang dimuat dalam pasal 29 undang-undang dasar 1945.

Apresiasi terhadap kemajemukan (keberagaman) adalah wajar dan niscaya adanya. Namun dalam realitas sosialnya, agama di dalam konteks sosial, tidak semata dimaknai sebagai ritual, doa, dan pengalaman mistik yang bersifat personal dan unik, namun juga hadir dengan fungsi manifes dan laten yang kadang tidak dikehendaki oleh pemeluknya sendiri. Maka dapat dikatakan

bahwa agama adalah sarana integrasi sosial, mengikat solidaritas sesama penganutnya dalam jamaah masjid, mushalla, gereja, sangha, komunitas-komunitas keagamaan; serta sebagai wahana pencipta, pembangun, dan pemelihara perdamaian dan kedamaian.

Patut juga diingatkan bila agama diabaikan pembinaan dan pemuliaan terhadapnya maka ia akan berpotensi menjadi instrumen disintegrasi sosial, konflik, ketegangan, friksi, kontradiksi, hingga perang. Oleh karena itu secara sosiologis dan kenyataan sosial dapat dikatakan bahwa keberadaan agama mengemban memupuk persaudaraan. Amat sangat dicemaskan bila pemahaman terhadap agama tidak lurus dan atau sengaja dibelokkan akan berdampak pada krisis yang merusak keagamaan dan kenyamanan bangsa.

Negara, agama dan umat beragama harus dapat mengerti untuk memposisikan kedudukan masing-masing secara utuh dan tidak saling merusak. Kewajiban negara melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan warganya mengandung pengertian, bahwa negara tidak mempunyai wewenang mencampuri urusan agama dan kepercayaan setiap warga negaranya. Sebaliknya, negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya untuk melaksanakan ibadah keagamaan atau kepercayaan.

Masalah hubungan negara, agama dan umat beragama menjadi crucial dan mengundang perdebatan saat demokrasi tidak ditempatkan secara benar. Mestinya dalam demokrasi dapat diartikan bahwa kesungguhan negara memuliakan agama dan umat beragama itu sebagai bentuk memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di depan hukum dengan idiom-idiom seperti *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia), dan seterusnya.

Dalam pandangan yang lebih luas sebagai bentuk penghargaan negara terhadap agama dan umat beragama, tidaklah salah jika negara, diwakili aparaturnya, dapat menerima perbedaan sikap umat beragama yang berbeda dalam menjelaskan hubungan agama dengan negara. Artinya pandangan umat beragama yang berbeda terhadap aktualisasi agama dalam bernegara itu juga bahagian dari kebebasan beragama. Perdebaan mazhab, beda tafsir, tidak sama aktualisasi keagamaan adalah hal yang wajar, biasa dan itulah dinamika keberagamaan.

Adanya di antara umat beragama yang memiliki sikap eksklusif, misalnya memandang penganut agama lain sebagai orang yang berada dalam kegelapan, kekufuran, dan tidak mendapat petunjuk Tuhan. Kitab suci agama lain dianggap tidak asli dan menyesatkan yang dilakukan bahwa di dalam agama lain tidak ada jalan keselamatan, karena jalan itu hanya ada satu, yaitu melalui nabinya. Dalam batas-batas paham dan sikap keagamaan itu adalah niscaya dan tidak perlu dipermasalahkan, karena memang agama memerlukan konsistensi (*istiqamah*) dalam keimanan.

Masalah yang harus diluruskan dan dibimbing oleh aparat negara adalah saat umat beragama bersikap dan berperilaku eksklusif dengan kalangan agama lain bukan untuk nilai persahabatan, melainkan untuk dakwah atau misi agar kalangan lain melakukan pindah agama. Pola hubungan antar umat beragama yang tidak tulus, alias *musang berbulu ayam* adalah musibah kerukunan yang harus dicegah dan dikendalikan negara, itupun dalam artian menjamin keberlangsungan agama di Indonesia.

Perlu diingatkan pola berfikir dan bersikap inklusif, tolerans terhadap orang lain, terlebih umat lain adalah cara-cara hidup yang harus terus menerus perlu dikembangkan negara, aparatur negara, tokoh agama tentu sekali lagi untuk menjamin kebebasan beragama. Bersamaan dengan itu juga perlu dipahami bahwa

pemahaman terhadap agama ada yang tidak mudah dimengerti umat. Satu di antaranya cara paham atau tafsir agama yang dikemukakan oleh kaum pluralis.

Kaum pluralis berpendirian bahwa setiap agama punya jalan sendiri-sendiri. Jalan-jalan menuju Tuhan beragam, banyak, dan tidak tunggal. Semua bergerak menuju tujuan yang satu, Tuhan. Tuhan Yang Satu memang tak mungkin dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama. Pemahaman dan tafsiran seperti yang dikemukakan kaum pluralis di atas jelas berpotensi kuat mengerus kekokohan keyakinan (iman) umat pada satu agama. Kaum pluralis yang membiarkan agama itu bebas dan tidak boleh menilai agama lain. Semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Tidak perlu ada pemaksaan pindah. Cara seperti ini harusnya tidak untuk umat beragama, akan tetapi hanya sebatas kajian akademik. Berbahaya sekali jika semua kajian akademik dipublikasi di ruang media yang tidak lengkap pembahasannya.

BANGSA BERAGAM

Indonesia didiami oleh penduduk yang beragam. Kemajemukan atau keberagaman adalah keniscayaan yang harus disukuri dan dijadikan modal untuk kekuatan. Hal penting dalam memelihara keragaman adalah menjadikan keragaman itu sebagai suatu yang produktif bagi semua. Beragam bukan negatif atau sesuatu yang harus dipertentangkan. Islam memberikan ruang yang luas terhadap keragaman.

Dalam sejarah ditunjukkan bahwa generasi Islam masa lalu telah menorehkan keteladanan sosial, dalam menghargai keragaman. Kesediaan menjalin kebersamaan dalam kemajemukan serta menebar empati untuk semua sejak awal Islam ditunjukkan Nabi pada masyarakat Madinah, yang kemudian dikenal dengan

masyarakat madani. Solidaritas nasional dalam bingkai menjalin kebersamaan dalam kemajemukan juga sudah dipraktek ulama dan tokoh pejuang Islam sejak awal pendirian negara ini. Dalam konteks ini, Allah mengingatkan dalam salah satu ayat Alquran, "*Bahwa telah jelas tampak, setiap golongan berbangga dengan (kehebatan) kelompoknya.*"

Pesan ayat di atas merupakan peringatan Allah kepada kita dalam dua bentuk pemahaman. Pertama, kita tidak boleh *ta'asshub* (berbangga terhadap kelompok kita secara primordial). Kedua, perjuangan mencapai (keridhaan) Allah di muka bumi, misalnya upaya menyejahterakan masyarakat, tidak bisa dicapai melalui *ta'asshub* tersebut. Karena itu, berjuang di jalan Allah, harus murni menjadi tujuan kita; bukan berjuang untuk membuat organisasi atau kelompok kita hebat. Apalagi kemudian diiringi dengan membanggakan kelompoknya lebih hebat daripada kelompok lain dalam capaian aktivitas sosial. Solidaritas nasional perlu didorong oleh kebersamaan yang tulus untuk membantu sesama, tanpa membedakan agama, etnis, ras, dan budaya. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak beriman seseorang, hingga dia mencintai (apa yang diekspresikan) saudaranya/sesamanya, berbanding lurus dengan apa yang dicintainya.*" (Muttafaq `Alaih).

Sebagai bahagian akhir dapat dikatakan bahwa negara, agama, umat dan keragaman adalah modal sosial yang satu dengan yang saling memberikan dukungan. Tidaklah elok dan dipastikan akan merusak tatanan kehidupan berbangsa ketika keagamaan dan keragaman diposisikan saling bertentangan. Saat negara dan agama dibenturkan dipastikan membawa bahaya bagi kehidupan kebangsaan yang sudah terbangun selama ini. Menjadikan keberagaman dan keragaman sebagai modal sosial, dijamin dan dikembangkan secara bijak, arif, proporsional dengan dukungan kebijakan pro rakyat diyakini akan memperkuat wawasan nusantara. Patut diingatkan bahwa apapun, siapapun dengan cara apapun yang tidak menghargai keberagaman dan keragaman

adalah virus membahayakan bagi kesatuan dan keutuhan bangsa. Semoga kita semua dapat menjaga kebaikan bangsa. Amin. Ds. 31082018. Surabaya.

RABU 7 SEPTEMBER 2016 6 Zuhijah 1437 H

TERAS UTAMA

Indonesia Beragama dan Beragam, Yes!

WAJAR dan masuk akal umat/ bangsa tersinggung ketika ada perilaku sebagian anak bangsa tidak memuliakan kehidupan beragama dan menolak kehidupan beragama.



Duski Samad
Ketua MUI Kota Padang

Penyakit sosial yang mestinya diobati justru oleh sekelompok orang diorganisir dan diberi penghargaan (*reward*), seperti perilaku menyimpang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transeksual).

Agama, kepercayaan dan keyakinan apapun diyakini menolak perilaku menyimpang yang menyesatkan dan membahayakan komunitas manusia itu.

» Baca *Indonesia...* Hal 7

www.padangekspres.co.id redaksi@padang

KERAGAMAN, KALIMATUN SAWA' DAN TOLERANSI¹⁷

KENISCAYAAN KERAGAMAN

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) No.1/PNPS/1965 juncto Undang-undang No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasannya pasal demi pasal dijelaskan bahwa Agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Surat Keputusan Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP hanya menyatakan kelima agama, tetapi Surat Keputusan tersebut telah dianulir pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang Kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia dan sekaligus menambahkan Konghucu sebagai agama keenam yang diakui.

Keragaman agama di Indonesia dalam realitasnya telah membawa manfaat besar dan sekaligus juga menjadi potensi kerawanan, yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik. Upaya untuk menata umat beragama agar dapat terus berkontribusi bagi kehidupan bangsa muncul dalam tema besar kerukunan umat beragama. Salah satu ide besar yang diwacanakan untuk kerukunan adalah soal pluralitas, pluralisme, keragaman dan kerukunan. Istilah pluralisme pada awalnya bermakna kebinekaan dan keragamanisme yang memiliki ruang aplikasi pada bidang-bidang filsafat agama, filsafat moral, hukum,

¹⁷ Makalah Diklat Teknis Substantif Peningkatan Pengerak Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri, 17 April 2014 di Diklat Teknis Keagamaan Sumbar.

dan politik, namun kemudian ia digiring pada ranah keyakinan agama.

Batasan umum (*common*) di antara bidang-bidang selain agama pluralism adalah mengenal secara resmi kebhinekaan dan keragaman sebagai lawan dari monoisme dan eksklusivisme. Sayang, konsep pluralism itu dikooptasi untuk agama, sehingga pluralisme agama diartikan sebagai tidak eksklusifnya keselamatan pada satu agama khusus dan bahwa seluruh agama memiliki saham terhadap kebenaran dan keselamatan.

Konsep seperti inilah yang menjadi biang kerancuan dan menjadi perdebatan yang merugikan bagi kebaikan aqidah umat. Bagi umat Islam sudah final bahwa kesetaraan dan kesamaan (dalam kebenaran) seluruh agama dengan agama Islam tidak dapat dibenarkan. Islam tidak menerima teologi global (*global theology*) dan faham kesatuan transenden agama-agama (*Transcendent Unity of Religions*), seperti yang disuarakan tokoh-tokoh pluralism John Hick, Wilfred Cantwell Smith, Rene Guenon, T. S. Eliot, Titus Burckhardt, Fritjhof Schuon, Martin Ling, Seyyed Hossein Nasr dan beberapa pengikutnya di Indonesia.

Bagi umat Islam soal keragaman adalah sunnatullah . Ayat-ayat yang berbicara ko-eksistensi antar-umat manusia bertebaran di dalam Al-Qur'an. Dalam surat al-Hujurat, ayat 11, misalnya, ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan; dan mereka dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Semua itu muaranya adalah untuk "saling kenal-mengenal" (*lita'arafu*).

Konsep ta'aruf yang ada dalam Islam ini, adalah 'pembersihan' citra yang telah mengotori konsep *tasamuh* (toleransi) dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa intoleran adalah satu sikap yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan kemanusiaan. Pandangan ini dapat melahirkan kerja-sama produktif dalam membangun bangsa dan negara antar-umat beragama. Selain

konsep *ta'aruf* di atas, al-Qur'an menawarkan konsep *fastabiqul khayrāt* (Qs. 2: 148). Ayat ini mengajarkan bagaimana setiap orang (terlepas apa agama dan keyakinannya) dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk kebaikan (*al-khayrāt*) kepada umat manusia. Dalam bidang hubungan antar keyakinan Islam mengajarkan perlunya dialog, yang dikenal dengan istilah *kalimatun sawa'* memiliki penekanan dialog yang berbeda.

PLURALITAS, KALIMATUN SAWA', DAN KERUKUNAN

Pluralitas merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri. Hakikat pluralitas adalah potensi yang dapat menjadi rahmat tetapi dapat juga menjadi laknat bagi alam semesta, tergantung pada cara manusia mengelolanya. Pluralitas yang dikelola dengan baik dapat menjadi rahmat karena pluralitas menumbuhkan keingintahuan, mobilitas, apresiasi, saling-pengertian, koeksistensi dan kolaborasi. Pluralitas mendorong manusia untuk mengetahui lingkungannya dan lingkungan yang lebih besar, sehingga manusia bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan keingin-tahuan ini, manusia dapat menemukan persamaan dan perbedaan identitas baik antar individu, antar kelompok masyarakat, antar etnik, antar agama maupun antar bangsa dan negara. Mengenali persamaan dan perbedaan dapat menumbuhkan apresiasi dan saling-pengertian, serta menumbuhkan kesadaran untuk melakukan tolong-menolong dan bekerja sama.

Pluralitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi laknat karena pluralitas dapat memunculkan berbagai prasangka. Prasangka yang tidak didasari oleh apresiasi merupakan kecurigaan. Pluralitas yang dipenuhi dengan kecurigaan hanya membuahkan iri hati dan kecemburuan. Irihati dan kecemburuan berlebihan dapat berkembang menjadi rasa permusuhan dan menghasilkan konflik, perpecahan, dan kerusakan.

Common platform (kesamaan titik temu) adalah titik focus dari wacana pluralitas sebagai prasyarat menuju kerukunan. Ada opini bahwa kerukunan diyakini dapat terwujud bila secara teologis ada kesamaan atau titik temu pandangan keagamaan. Meskipun tesis ini perlu diuji, sebab justru penemuan titik sama dalam beraqidah adalah potensi konflik yang dapat membakar jagad kerukunan.

Nurcholis Madjid adalah pemikir Indonesia yang secara gencar memperkenalkan konsep *common platform* dengan mengangkat istilah *al-qur'an kalimatin sawa'*. Menurut Nurcholish Madjid *kalimatin sawa'* merupakan ketetapan yang sama diantara agama-agama. Ketetapan ini merupakan landasan fundamental bagi pengembangan dialog dan *paradigm dialog* antar agama. Dengan konsep ini maka hubungan antar agama berada dalam kebersamaan dan kedamaian tanpa adanya sikap saling curiga apalagi pertentangan dan friksi-friksi antara pemeluk agama-agama.

Konsep ini tidak membenarkan adanya klaim kebenaran dari suatu agama. Kontribusi konsep *kalimatin sawa'* adalah pertama, merupakan landasan utama bagi hubungan dan titik temu antar agama yang dapat dikembangkan melalui perjumpaan, dialog yang konstruktif dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang hakiki. Kedua, dengan *kalimatin sawa'* tidak berarti meniadakan perbedaan antara agama-agama melainkan adanya pola-pola pandangan yang sama tentang permasalahan social yang dihadapi. Ketiga, memberikan aura fundamental tentang pluralism. Hal ini penting untuk dijadikan landasan pemahaman dalam dunia pendidikan agama.

Dalam perkembangannya *kalimatin sawa'* adalah kata “keramat” untuk mendukung paham “pluralisme agama” dan teologi “inklusif”. Dengan paham ini akan tercipta ko-eksistensi, kerjasama dan saling-kesepahaman. Karena mereka

mengharapkan seluruh agama dapat berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Tapi jika dilihat lebih cermat, pemahaman mereka terhadap kalimat *sawa'* ini begitu parsial dan tak komprehensif.

Sejatinya, kaum pluralis tidak seharusnya mencomot ayat ini sebagai bumper paham pluralisme. Karena ayat ini sebenarnya “ajakan” dialog kepada kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen), yaitu: seruan kembali kepada ajaran *Tawhid*. Intinya adalah: keyakinan bahwa Allah SWT. itu esa: tunggal, bukan Trinitas. Allah dalam Islam tidak beranak dan tidak diperanakkan (Qs. al-Iklāsh [112]: 3). Karena, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an, kedua agama tersebut telah banyak menyelewengkan ajaran nabi mereka, khususnya dalam masalah ketuhanan.

Perlu ditegaskan bahwa *kalimat* *sawa'* bukan mengajak kepada paham “pluralisme agama” atau teologi “inklusif” sehingga harus dimaknai dengan sangat simplistik sebagai *common platform*. *Kalimat* *sawa'* lebih menekankan kepada aspek teologis (akidah), lihat saja lanjutan ayat tersebut (*allā na'buda illā Allāh wa lā nusyrika bihi syai'an wa lā yattakhidzu ba'dhunā ba'dhan arbāban min duuni Allāh*) menegaskan keesaan Allah (*wahdāniyyat al-ulūhiyyah*) dan *wahdāniyyat al-rubūbiyyah* (Ketuhanan). Keduanya merupakan terma yang disepakati oleh seluruh para nabi.

Ini perlu diperhatikan oleh ketiga agama itu. Agar arah dialognya jelas. Karena jika *kalimat* *sawa'* diseret menjadi ‘topeng’ pluralisme agama, ini namanya “pemeriksaan” ayat. Karena secara de facto, alasan kaum pluralis menjadikan *kalimat* *sawa'* sebagai “ayat pluralisme” disebabkan meruyaknya aksi-aksi kekerasan. Padahal kekerasan itu sifatnya kasuistik. Fakta yang tak mungkin dibantah adalah: Islam adalah agama terakhir. Merupakan kewajaran jika ia mengajak “dialog” kepada agama-

agama awal untuk melihat kembali dogma-dogma dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Dan pihak yang menyatakan bahwa agama Islam “tidak toleran”, keras, fanatik, dslb adalah pemahaman yang parsial terhadap Islam. Dan tidak serta merta mengharuskan kalimatin sawa’ diubah arahnya menjadi ayat pluralisme agama. Dan, *kalimatin sawa’* bukan sekadar *common platform* alias titik temu ‘tanpa titik’. Lebih dari itu, *kalimatin sawa’* adalah titik temu “Tauhid”. Maka ia menjadi terikat, bukan mutlak. Ia juga tidak bisa dijadikan ayat “inklusif”. Ia tetap sebagai *kalimatin sawa’*: ayat yang menyeru kepada persamaan titik temu, yakni titik temu Tauhid, bukan yang lain.

SIKAP TOLERANSI.

Di Indonesia, agama memiliki peran yang sangat vital sebagai perekat persatuan nasional Indonesia. Peran tersebut terutama dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang penuh rasa damai, dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan seraya mengedepankan persamaan-persamaan diantara berbagai umat beragama di Indonesia. Agar kehidupan manusia dalam masyarakat majemuk tersebut bisa mencapai kedamaian, dan kesejahteraan, maka toleransi dan kerukunan hidup antarumat yang berbeda (terutama antarumat beragama), mutlak diperlukan dan merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan¹⁸.

Agama Islam sendiri, sebagai agama mayoritas di negara ini dalam ajarannya mengakui eksistensi kemajemukan, termasuk kemajemukan (pluralitas) dalam hal agama (din), karena Islam merupakan rahmatan lil ‘alamin. . Islam mengajarkan bahwa kemajemukan, keanekaragaman etnis, ras, warna kulit, bahasa, adat istiadat, paham, kepercayaan dan penganut agama,

¹⁸Agama Buddha Adalah Agama Yang Mengajarkan Perdamaian Dan Menentang Kekerasan Dalam Masyarakat Buddhis Selama Lebih Dari 2.500 Tahun. Daniel L. Smith Christopher, (Editor) *Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius. 2005

merupakan suatu kenyataan, menjadi *sunatullah*, yang tidak seorang pun dapat menghapuskannya. Sebagaimana juga tertuang dalam Al -Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Islam telah memberi kebebasan untuk menganut suatu kepercayaan atau agama tertentu dan melarang memaksa orang lain untuk menganut suatu kepercayaan atau agama tertentu serta melarang memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam.

Dalam sejarah Islam, toleransi dan kerukunan hidup umat beragama bahkan telah dipraktekkan Rasulullah SAW melalui kepemimpinan beliau terhadap masyarakat yang majemuk dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Piagam Madinah memuat pokok-pokok kesepakatan antara lain (1) Semua umat islam, walaupun berasal dari banyak suku, merupakan satu komunitas, (2) Hubungan antar komunitas islam dengan non islam didasarkan atas prinsip-prinsip: bertetangga baik, saling membantu dan saling menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati, menghormati kebebasan beragama.

Di Indonesia, konsep toleransi beragama bukanlah suatu hal yang baru. Konsep ini sudah berkembang bahkan sejak tahun-tahun awal bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Sayangnya konsep ini sampai saat ini tidak dapat menunjukkan “keampuhannya”. Jika dievaluasi, hal ini disebabkan tidak implementatifnya konsep toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya konsep ini hanya berujung di ruang-ruang diskusi.

Agar konsep toleransi beragama menjadi hal yang implementatif, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan: *Pertama*, perlunya diadakan pembenahan pemahaman secara mendasar menyangkut tataran filosofis dan etis, atas sikap keberagamaan umat beragama terhadap agama mereka sendiri dan agama orang lain. Dalam hal ini pemuka agama bertanggung jawab untuk menumbuhkan

pemahaman pada masyarakat Indonesia bahwa pada hakekatnya manusia tumbuh dan besar pada hubungan sosial di dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai diterapkan dalam berbagai simbol-simbol budaya. Setiap kebudayaan satu sama lain memiliki posisi yang setara dan saling membutuhkan. Dengan mempelajari kebudayaan lain melalui proses dialog, maka akan memperluas cakrawala pemahaman masyarakat tentang kemajemukan bangsa Indonesia.

Kedua, setelah terdapat pemahaman agama yang benar pada umat beragama, selanjutnya, umat beragama dirasa perlu untuk mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan hal-hal apa saja yang menjadi akar dari konflik dan kekerasan pada masyarakat, seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah dan sebagainya.

Ketiga, sebagai langkah lanjut, para pemuka agama dipandang perlu untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang menekankan pada pemeluknya untuk berpandangan optimistis dan semangat bekerja keras. Nilai-nilai ini dimaksudkan untuk meyakinkan kembali bahwa selama usaha maksimal telah dilakukan, maka pantang hukumnya untuk berputus asa dan hilang harapan. Nilai-nilai agama yang mengedepankan jaminan seluruh rezeki atas makhluknya oleh Tuhan YME serta nilai-nilai yang melahirkan sosok-sosok ummat yang ulet, kreatif dan memiliki keterampilan dalam bekerja keras di dunia perlu untuk lebih sering dikemukakan dalam rangka menuntaskan “akar konflik/kekerasan”.

Agar konsep toleransi lebih bersifat implementatif, diperlukan program strategis dari para pemuka agama untuk mengajak umatnya lebih partisipatif dan peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa. Dengan kata lain, umat harus diajak bersamasama menyelesaikan permasalahan bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam program-program

seperti ini, hal yang harus menjadi perhatian adalah pembuatan mekanisme kontrol evaluatif terhadap implementasi program strategis tersebut untuk menjaga sustainabilitas (keberlangsungan) program. Terkait program strategis, ada beberapa contoh program bersama yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian persoalan bangsa. Hal ini juga sekaligus ditujukan untuk membina kerukunan umat beragama yang berbeda-beda.

Program-program tersebut diantaranya: *Pertama*, mengadakan kegiatan bersama secara nyata yang dilakukan oleh semua penganut agama untuk menyelesaikan persoalan bangsa, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, program tersebut harus direncanakan secara matang dan hati-hati, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah program lingkungan hidup (gerakan menanam sejuta pohon, dsb) secara bersama untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan masyarakat kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable*) terhadap persoalan krisis.

Kedua, menghimpun dan menggalang generasi muda antar umat beragama, dalam wadah kerjasama sosial kemasyarakatan untuk menumbuhkan rasa persatuan diantara umat beragama. Melalui program-program seperti ini, umat beragama tidak saja berperan serta dalam mengatasi persoalan bangsa, tetapi umat beragama juga akan memiliki sikap toleransi yang kuat. Mereka, satu sama lain akan lebih menghargai.

Persaudaraan dan persatuan antarumat beragama dalam masyarakat majemuk sebagai wujud dari sikap toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama hanya dapat diciptakan melalui niat yang tulus dan ikhlas serta kejujuran dari semua pihak, dilandasi oleh pemahaman dan pengamalan yang lengkap

dan benar terhadap ajaran agama masing-masing serta mentaati perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan dan membina toleransi dan kerukunan antarumat yang berbeda-beda terutama antarumat beragama perlu diadakan komunikasi yang intens untuk saling mengenal satu sama lain.

PENUTUP.

Sebagai bahagian akhir dari tulisan ini ingin ditegaskan bahwa manusia itu melainkan semua merupakan umat yang tunggal, kemudian mereka berselisih.” (QS.10:19). Pokok pangkal kebenaran universal yang tunggal itu ialah paham Ketuhanan Yang Maha Esa, atau Tauhid. Tugas para rasul adalah menyampaikan ajaran tentang Tauhid ini, serta ajaran tentang keharusan manusia tunduk patuh hanya kepada-Nya saja (Islam). Dan, justru berdasarkan paham ketauhidan inilah, Alqur’an mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious plurality*). (QS. 2:256). Dalam pandangan teologi Islam, sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada: Bahwa semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama. Karena alasan inilah Alqur’an mengajak kepada “titik pertemuan” atau dalam istilah *kalimatun Sawa’*. (QS. 3:64).

Pandangan ini akan mendorong umat Islam secara normatif untuk menghargai kemajemukan keagamaan lewat sikap-sikap toleransi, dan keterbukaan seperti dicerminkan dalam konsep tentang siapa yang digolongkan sebagai Ahli Kitab. *Kalimatun sawá’* perkataan yang sama, titik temu, yang semuanya berhenti di depannya secara sejajar, yang sebagian mereka tidak lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Ajakan yang tidak akan ditolak kecuali oleh orang yang keras kepala dan suka berbuat kerusakan, yang tidak ingin kembali kepada kebenaran yang lurus”.

Untuk mewujudkan toleransi umat beragama yang implementatif, para pemuka agama dituntut untuk mengembangkan keteladan,

keberagaman yang santun, kesalehan sosial; memelihara etos kerja dan produktivitas; meningkatkan intensitas dialog antar umat beragama; mendorong gerakan pemberantasan korupsi; dan menanamkan nasionalisme sebagai bagian dari spiritualitas agama di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pengembangan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang berwawasan multikultural di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk juga dianggap penting untuk menumbuhkan sikap toleran sedari dini. Ambon I/4 Wisma Indah Siteba,14042014.

TOLIKARA, RAWAT RUKUN DAN CEGAH RAWAN¹⁹

Penyerangan terhadap umat yang sedangkan melaksanakan ibadah, pembakaran rumah ibadah, dan kios tempat usaha pada saat idul fitri 1436/2015 di Tolikara Papua adalah pencideraan kerukunan beragama, pelanggaran HAM berat dan dapat dikatakan sebagai insiden nasional yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Umat Islam percaya aparat keamanan tentu segera dapat mengusut kasus yang memalukan tersebut sampai keakar-akarnya dan sekaligus memberikan sanksi hukum yang jelas dan tegas bagi pelakunya. Merawat kerukunan umat beragama yang sudah hidup dan berjalan dengan baik sejak awal pendirian negara RI adalah kewajiban semua pihak, umat penganut agama tidak boleh terpancing oleh mereka yang tidak ingin bangsa ini kuat dan maju dalam spirit keragaman, sesuai amanat *founding father*, Bhinika Tunggal Ika.

Kata rukun dan rawan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah keadaan social kemasyarakatan yang timbulnya berkaitannya dengan kehidupan beragama. Bahasan tentang rukun, yang kemudian lebih sering dipakai dalam konteks social keagamaan lebih ditekankan pada sifat dari rukun yang ditambah awalan *ke* dan akhiran *an* menjadi kerukunan adalah agenda nasional strategis yang tak terabaikan. Karena, hidup rukun adalah prasyarat utama untuk tercapai tujuan nasional. Hidup rukun dan terpelihatanya kerukunan adalah kebutuhan semua orang sepanjang waku.

¹⁹ Refleksi Dialog dengan Kapolres Padang, pada saat kunjungan Kapolres Silaturahmi Idul Fitri ke rumah Ketua MUI Padang, Jln. Ambon I/4 Wisma Indah Siteba Padang, 18 Juli 2015.

Kerukunan, kedamaian dan keharmonisan antara seorang dengan orang lain, merupakan suatu yang sangat diharapkan semua pihak. Hidup rukun dan damai dalam sebuah keluarga, yang jauh dari perselisihan, pertengkaran dan permusuhan, begitu juga kerukunan dan kenteraman hidup bertetangga juga menjadi harapan masyarakat. Bahkan kerukunan dalam tatanan yang lebih luas mencakup keharmonisan masyarakat dalam kehidupan yang penuh perbedaan dan kemajemukan (suku, agama, ras dan antar golongan) dalam satu negeri dan negara perlu diterapkan dan menjadi harapan semua.²⁰

Bagi bangsa Indonesia dalam waktu panjang tetap perlu mendapat perhatian serius untuk dijaga, dirawat dan dikembangkan secara produktif adalah kerukunan. Membangun bangsa Indonesia menjadi negara bangsa (*nation state*) yang kokoh maka soal keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama dan budaya adalah masalah yang sekaligus potensi yang harus mendapat porsi untuk dikelola secara arif, bijaksana dan berkelanjutan.

Sejarah menunjukkan bahwa sentiment primordial, suka, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang beraneka ragam yang menjadi motivasi perjuangan pahlawan bangsa pada dasarnya adalah modal, dan asset bagi pembentukan awal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarah awal pembentukan Republik Indonesia jelas tercatat bahwa kesediaan, ketulusan dan kebijaksanaan tokoh-tokoh Islam menghargai keberagaman adalah titik awal hadirnya kerukunan dalam negara bangsa. Dapat dibayangkan bagaimana seandainya tokoh umat

²⁰ Kanwil Kemenag Sumbar, *Pedoman Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat*, 2007, h.vi.

Islam “keras Kepala” tidak mau menerima pencoretan tujuh buah kata pada kalimat pembukaan UUD 1945?²¹

KEWAJIBAN MENCIPTAKAN HIDUP RUKUN.

Kerukunan bukan anugerah dari langit begitu saja. Kerukunan harus diciptakan. Menciptakan kerukunan adalah tugas hidup yang harus diperjuangkan. Kerukunan dapat hadir jika ada ikhtiar, upaya dan rekayasa social dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kerukunan bukanlah kepentingan sekelompok orang, golongan atau pihak tertentu, ia adalah kebutuhan semua pihak dan menjadi modal dasar kemajuan bersama. Kerukunan adalah kepentingan dan keniscayaan hidup yang tak dapat dipungkiri adanya.

Bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai sebuah bangsa yang multikultur memiliki kultur dan budaya yang berbeda, dan plural (*pluralistic society*) ini adalah sebagai bukti *sunnah kauniyah*, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pencipta. Jika Allah SWT berkehendak untuk menjadikan umat manusia ini menjadi satu suku bangsa yang sama bahkan dengan bentuk yang seragam maka tentu tidaklah akan disaksikan keberagaman yang ada ini. Semua orang yang beragama disebut juga dengan umat beragama yang hidup di Negara Indonesia ini, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 dan bersesuai pula dengan deklarasi hak asasi manusia internasional (*The Declaration of Human Rights*) adalah dijamin dalam kehidupan mereka untuk memeluk, menganut agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing.

Dalam realitasnya bangsa Indoensia dapat efektif sebagai bangsa ketika kerukunan dapat dipelihara. Hidup rukun adalah modal utama untuk mencegah kerawanan. Bila rukun dan atau

²¹ Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, Penerbit Zikrul Hakim, Cet I, 2011, Jakarta, h.10.

kerukunan terwujud maka rawan akan pergi. Begitu sebaliknya bila rawan atau kerawanan dapat dicegah maka kerukunan akan hadir. Menjaga kerukunan dapat dilakukan dengan mencegah kerawanan. Rawan atau kerawanan, adalah suatu keadaan yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama, yang antara lain ditandai timbulnya keresahan-keresahan social.

Upaya untuk mencegah kerawanan dan menegakkan kerukunan tentu sulit dicapai tanpa memperhatikan dengan factor yang akan memicunya. Karena harus diakui, bahwa ideology (aqidah) setiap agama pada dasarnya menuntut agar umatnya menyebarkan agama kepada semua orang. Tugas dakwah dan misionaris adalah tugas suci yang melekat pada setiap penganut agama. Kesamaan pandangan, strategi dan pendekatan antar tokoh agama dalam melakukan penyiaran agama dalam konteks kerukunan hendaknya terus diupayakan.

Ada sepuluh masalah krusial yang berpotensi menimbulkan kerawanan antar umat beragama, dan sekaligus berpotensi mengganggu hadirnya kerukunan. *Pertama*, Kegamangan pendirian rumah ibadah bagi agama tertentu. *Kedua*, Penyiar agama menyinggung agama lain, baik langsung atau pengeras suara. *Ketiga*, Penyebaran buku-buku/pamphlet yang berisi ajaran agama tertentu ke agama lain. *Keempat*, Rumah tinggal dijadikan tempat ibadah. *Kelima*, Penyiaran agama melalui jalur perkawinan. *Keenam*, Pelaksanaan ibadah mengganggu umat lain. *Ketujuh*, Pendirian rumah ibadah belum diterima masyarakat. *Kedelapan*, Pemberian kredit murah atas motif atau misi suatu agama. *Kesembilan*, Penyebaran agama terhadap orang yang sudah beragama. *Kesepuluh*, Kebijakan dan atau prilaku aparat pemerintah yang berpotensi memarginalkan umat tertentu²².

²² Kesimpulan Rakor, Seminar dan FGD Kerukunan Umat Beragama, Kerjasama Bina Sosial dan Agama SETDA Prop.Sumbar dengan FU IAIN IB Padang, 19 Mei 2009.

Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah di atas telah dituangkan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, tanggal 13 September 1969, tentang Pelaksanaan tugas aparaturnya pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya. Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 70/1978, tanggal 1 Agustus 1978, tentang Pedoman Penyiaran Agama, secara rinci dijelaskan bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan ditujukan kepada orang beragama lain. Tidak dibenarkan dilakukan dengan mempergunakan alat pemikat (materi/finansial). Tidak dibenarkan dilakukan dengan menyebarkan pamflet, bulletin, majalah/buku di daerah/rumah umat/orang yang beragama lain. Tidak dibenarkan dilakukan dengan keluar-masuk dari rumah orang yang telah memeluk agama lain. Bagi umat Islam berkenaan dengan penyiaran agama dan hubungan antar umat beragama ini sudah ditetapkan dalam Keputusan Musyawarah Paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 15 Pebruari 1976, tentang “Konsultasi Antar Umat Beragama”. Bahwa tidak boleh menyebarkan agama kepada mereka yang sudah beragama lain, dan menyambut baik diadakannya konsultasi antar umat beragama.

Pandangan umat Islam tentang kerukunan dalam kehidupan berbangsa yang majemuk sudah sejak awal ditegaskan oleh pemuka agama. Pencoretan tujuh kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada piagam Jakarta didasarkan pada pemahaman bahwa umat Islam memandang posisi umat agama lain dengan istilah *mu'abadah* dan *muwasaqah*, artinya sesama bahagian warga bangsa yang terikat oleh komitmen kebangsaan sehingga harus hidup berdampingan secara damai, bukan posisi *muqatalah* atau *mubarabah*, artinya kelompok lain yang harus diperangi atau dimusuhi.

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS/ An-Nisa', 92).

Landasan penting dari mereka yang terikat perjanjian jelas sekali dari ayat di atas. Bahwa orang yang tidak seagama tetapi terikat dalam satu perjanjian hidup berdampingan harus diperlakukan sebagaimana hukum sesama penganut Islam itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Buchari dijelaskan bahwa... *orang yang membunuh mereka yang terikat perjanjian dengan umat Islam, tidak akan mendapatkan baun harumnya sorga, baun harum sorga sudah tercium sejauh 40 tahun perjalanan.* Begitu jelas sikap umat Islam menjaga dan menghormati umat Islam yang beda agama.

Islam sebagai keyakinan keagamaan, kebudayaan dan jati diri pada dasarnya mendorong umatnya untuk menjaga kerukunan. Keragaman hidup, jenis kelamin yang berbeda, suku bangsa yang tidak satu, bahasa yang tidak sama bukanlah hambatan untuk rukun, malah itu adalah modal kerukunan. (QS. *Al-Hujuraat*, 13 dan *al-Rum*,22.) Islam dengan tegas dan jelas melarang umatnya untuk mencela, meremehkan dan melecehkan orang, kelompok dan agama lain. (QS. *Al-Hujuraat* 11). Islam melarang umatnya untuk memaksa orang lain ataupun umat lain untuk menganut kepercayaannya. (QS. *Al-Baqarah*,256). Secara tegas dapat dikatakan bahwa kerukunan adalah niscaya adanya dalam Islam.

Semua umat beragama hendaknya terus mendorong lahirnya kesepakatan dan terus memperjuangkan kerukunan. Kerukunan itu penting, harus dipentingkan dan itu mesti menjadi kepentingan bersama. Secara normative, semua orang setuju bahwa kerukunan adalah begitu penting dan kebutuhan semua orang. Dalam prakteknya, jelas tidak mudah untuk merawat bibit kerukunan, agar jangan dimakan ulat kebencian dan konflik yang akan merugikan semua pihak. Riilnya di masyarakat, masalah kerukunan tidak ada masalah yang berarti, kecuali masalah yang sengaja ditimbulkan oleh pembuat masalah.

Kondusifnya kehidupan beragama, dalam batas tertentu ada krikil kecil, yang harus dibicarakan dengan lapang dada oleh tokoh-tokoh lintas agama, adalah rahmat dari sang pencipta yang hendaknya dijaga dan dipagari secara bersama-sama. Bukti menunjukkan sekali saja terganggu kehidupan beragama, itu dipastikan mendatangkan mudarat besar bagi kehidupan semua, cost mahal dan kerugian social yang tinggi sekali. Pada dasarnya, semua agama mengajarkan untuk hidup rukun, damai, aman, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin. Tidaklah benar jika ada pihak yang mengklaim bahwa agamanya mendorong munculnya kerusakan, kerusuhan dan ketidakbaikan.

Dalam kontek masyarakat Minangkabau sejak awal sejarah dikenal dengan masyarakat muslim begitu akomodatif dengan etnis, dan agama apa saja yang datang ke daerah ini. Sebagai bukti dapat ditunjukkan dengan penamaan kampung di pusat-pusat kota, seperti kampung Cina, dan Kampung Keling. Dalam culturalpun dikenal ada beberapa model negosiasi keragaman yang berujung pada terjalannya kerukunan. Ada model ambil mengambil, artinya antar etnis dan agama yang berbeda saling kawin mengawini. Ada juga model pencelupan, yaitu antar etnis dan agama yang berbeda dapat hidup begitu rukun dalam satu ikatan warga local. Dalam masyarakat asli Minangkabau dikenal tradisi *malakok*. *Malakok* yaitu kesedian pimpinan adat dan

masyarakat local menerima etnis dan agama berbeda, namun dalam hal-hal tertentu mereka harus melakukan dan menghentikannya²³.

Norma, tradisi dan emosi keagamaan yang lurus, benar, jujur dan otentik adalah prasyarat untuk terwujudnya kerukunan yang lebih baik. Kecurigaan, saling tuding, tidak saling mempercayai, mengganggu tatanan budaya local dan perilaku yang mengabaikan kearifan local adalah pemantik timbul disharmoni. Siapapun, dalam kapasitas apapun, ketika kearifan local dan agamanya terusik dipastikan akan berontak. Hanya saja, bentuk ketidakpuasaan itu muncul dalam ekspresi yang berbeda. Ada yang lunak dan santun, tentu juga ada yang keras dan kasar. Peran tokoh agama mendidik umat untuk menjunjung tinggi moralitas adalah menjadi sangat menentukan.

Sebagai bahagian akhir ingin ditegaskan bahwa merawat kerukunan adalah kewajiban bersama. Mencegah kerawanan di dapat dilakukan dengan terus menerus mengembangkan dialog lintas agama, mewaspadai pihak asing atau siapapun yang akan merusak tatanan kehidupan beragama yang sudah baik, meningkat kesejahteraan umat dan menggunakan kearifan local sebagai perekat bangsa. Semoga kerukunan tidak terusik oleh perilaku orang tertentu yang tak bertanggung jawab. Bangsa besar adalah mereka yang dapat hidup berdampingan dengan umat dan bangsa lain secara berbudaya dan bermartabat. Semoga dapat diarifi adanya. Ds. Ambon I/4. 19072015.

²³Makalah Sepriyono, *Malakok Model menegosiasikan Keragama bagi Etnis Nias-Kristen dengan Minangkabau-Islam di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.*

KUALITAS KERUKUNAN²⁴

Satu di antara kebutuhan bersama yang harus dijaga secara bersama-sama pula adalah kerukunan hidup umat beragama. Kajian tentang kerukunan beragama di Indonesia sudah lama berkembang. Studi-studi tentang kerukunan keagamaan dan konflik keagamaan, dapat dipandang sebagai dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Semakin tinggi intensitas konflik keagamaan pada sebuah komunitas umat beragama menandakan kualitas kerukunan keagamaan pada komunitas tersebut semakin rendah. Demikian sebaliknya, semakin tinggi kualitas kerukunan keagamaan pada sebuah komunitas umat beragama menandakan semakin rendah intensitas konflik keagamaan pada komunitas tersebut.

Kerukunan beragama adalah keniscayaan kultural yang menyerah. Pendiri dan pejuang bangsa telah menorehkan sejarah kerukunan sebagai modal kolektif yang menjadikan bangsa ini hidup. Kesediaan *founding father* mencoret tujuh kata dalam piagam Jakarta, kewajiban menjalankan agama Islam bagi penganutnya, adalah langkah sejarah awal hadir kerukunan bagi setiap aspek kehidupan bangsa.

KEBIJAKAN KERUKUNAN

Menteri Agama Mukti Ali dikenal sebagai motor penggerak kerukunan keagamaan yang mengedepankan konsep *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Setiap umat beragama hendaknya menerima adanya orang lain yang berbeda agama. Menteri Alamsyah Ratu Perwira Negara, kebijakan kerukunan keagamaan dikenal dengan konsep kebijakan yang menekankan

²⁴ Disampaikan Bimtek Kerukunan Umat Beragama Pemko Padang, 17 Mei 2016.

trilogi kerukunan umat beragama, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Menteri Agama Munawir Sjadzali, konsep trilogi kerukunan dilanjutkan dengan istilah Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal) kerukunan umat beragama. Kondisi bangsa akan sangat ideal kalau kerukunan intern umat dalam satu agama, kerukunan antar umat berbeda agama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah terwujud. Menteri Agama Tarmizi Taher, kementerian agama lebih memfokuskan pada kebijakan pengembangan bingkai Teologi Kerukunan, yang intinya mengedepankan perlunya titik temu konsep ajaran semua agama yang bisa dijadikan landasan kerukunan antar umat beragama.

Kebijakan-kebijakan para Menteri Agama yang bersifat normatif tersebut terus dikembangkan oleh para penggantinya. Dalam tataran praktis, kebijakan para Menteri Agama tersebut kemudian melahirkan berbagai kegiatan diskusi, seminar, workshop dan dialog kerukunan keagamaan dan dialog lintas iman antar tokoh agama pada tingkat lokal, nasional dan bahkan juga internasional.

Selain itu, organ Kementerian Agama setara eselon II yang menangani khusus kerukunan keagamaan dikembangkan, dengan nama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Pada era Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni hingga Menteri Agama Suryadarma Ali, kebijakan pembinaan kerukunan umat beragama yang bersifat normatif dan akademik tetap diteruskan, dengan memperkuat pengembangan wawasan multikultural umat beragama. Pengembangan wawasan multikultural ini secara teknis dilakukan melalui penekanan pendidikan agama yang

bernuansa *rahmatan lil alamin* dan inklusif mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi.²⁵

Kementerian Agama selaku penanggung jawab pembinaan kerukunan keagamaan juga telah lama menerbitkan regulasi dan mengembangkan konsep-konsep kebijakan yang bersifat normatif dan akademik. Pada aspek regulasi, era Menteri Agama KH Moh. Dahlan, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Pada era Menteri Alamsyah Ratuperwiranegara diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri, yang kemudian diperkuat dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pada masa Menteri Agama Tarmizi Taher, diterbitkan Surat keputusan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Kemudian pada masa Menteri Agama Maftuh Basuni, dilahirkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,²⁶

²⁵ Bahrul Hayat. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.

²⁶ Atho'Mudhzhar .”Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki.” Dalam Abdurrahman Mas’ud dkk (ed). 2011. *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Hlm. 19 – 38.

KUALITAS KERUKUNAN.

Manusia secara keseluruhannya adalah makhluk Allah, yang diciptakan-Nya dari asal yang satu yaitu Nabi Adam as., hanya ketaqwaan yang membedakan manusia disisi-Nya, QS. An Nisa:1 dan Al Hujurat:13. Wujud ketaqwaan itu tidak saja dalam aqidah, ibadah akan tetapi juga dalam prilaku sehari-hari. Salah satu prilaku yang berkaitan dengan ketaqwaan adalah sikap menghargai orang lain dan penganut agama yang berbeda aqidah.

Menghargai perbedaan itu disebut dengan toleransi beragama (*Tolerance of Religions*). Toleransi beragama dalam Islam ditegakkan atas dasar kemerdekaan beragama, persamaan dan keadilan. Rasulullah saw, telah meletakkan toleransi beragama sebagai salah satu prinsip dari Negara Islam yang didirikannya setelah hijrah, ke Madinah (Yatsrib). Tiga agama besar saat itu Yahudi, Nasrani dan Majusi (Zaraster) telah mendapat pengakuan hak-haknya dari pemerintahan Islam saat itu (QS. Al-Kafirun).

Toleransi secara bahasa bermakna sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri²⁷. Sedangkan pengertian toleransi sebagai istilah budaya, sosial dan politik, ia adalah simbol kompromi beberapa kekuatan yang saling tarik-menarik atau saling berkonfrontasi untuk kemudian bahu-membahu membela kepentingan bersama, menjaganya dan memperjuangkannya.

Akan tetapi dalam realitas sosial ada pemahaman yang mengembangkan pengertian toleransi bergeser menjauh dari batasan-batasan Islam, sehingga cenderung mengarah kepada sinkretisme agama-agama berpijak dengan prinsip yang berbunyi “semua agama sama baiknya”. Prinsip ini menolak kemutlakan

²⁷ Kamus Besar B.Indonesia Edisi. 2 Cetakan 4 Th.1995.

doktrin agama yang menyatakan bahwa kebenaran hanya ada didalam agama masing-masing Islam.

Menjadikan agama sama atau mendorong hadir kesamaan aqidah antar penganut agama bisa dikatakan sebagai toleransi yang sesat dan menyesatkan (*dbalun mudhalun*). Krisis aqidah, kepercayaan terhadap sakralnya iman bermula dari kekeliruan di dalam memahami dan menyikapi makna toleransi.

Dalam menjaga kualitas toleransi perlu pula diwaspadai beberapa pola zionis dkk, berupa teror fisik dan mental menjadikan issue toleransi beragama sebagai *faith accompy* sosial, politik terhadap umat Islam. Penggiringan opini lengkap dengan sekularisasi agama dan sekularisme politik, sosial, dan ekonomi serta budaya, guna menyingkirkan peranan Islam dari segenap kehidupan. “Mereka (orang-orang kafir itu) menghendaki untuk memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah terus menyempurnakan cahaya (agamaNya) walaupun orang-orang kafir tidak suka”. (Ash-Shaf: 8).

Toleransi beragama dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang tidak boleh diabaikan sedikitpun oleh umat Islam dalam bertoleransi dengan penganut agama lain yaitu : (1). Menegaskan akan kebenaran Islam dan selain Islam “Sesungguhnya agama yang diridhoi disisi Allah hanyalah Islam”.(Al-Imran: 19). “Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) dari padanya, dan diakhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (Al-Imran: 85). “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah engkau termasuk kalangan orang yang bimbang.”(Al- baqarah :147)“Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Aku lengkapi nikmatku atas kalian dan Aku ridhoi islam sebagai agama kalian”. (Al-Maidah: 3).

Adapun hubungan toleransi diantara kaum muslimin dengan orang-orang kafir disebut dalam ayat “Tidak ada paksaan untuk

memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (Al Baqarah: 256). Kaum muslimin harus tetap berbuat adil walaupun terhadap orang-orang kafir dan dilarang mendhalimi hak mereka. “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah: 2).

Orang-orang kafir yang tidak menyatakan permusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin, dibolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa dengan mereka. “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (8) “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim.” (Al-Mumtahanah: 8-9)

Kaum muslimin berhubungan baik dan bertoleransi dengan orang-orang kafir, bukanlah karena mencintai mereka. Tetapi semata-mata karena agama Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dengan orang yang kita benci dan membenci kita. Sehingga orang-orang kafir yang hidup dimasyarakat muslimin, mereka mempunyai hak sebagai tetangga, dan bahkan mempunyai hak sebagai famili karib kerabat, hak sebagai orang tua bila anaknya sebagai seorang muslim. Untuk hal ini semua kita dapati banyak teladan perbuatan Rasulullah Sholallahu ‘alaihi

wasallam. “Dari Asma' Binti Abu Bakar , ia berkata: ‘Di masa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa ‘ala aalihi wasallammasih hidup, ibuku pernah mengunjungiku dalam keadaan sangat berharap kebbaikanku kepadanya dan takut kalau aku menolaknya dan merasa kecewa. Maka saya pun bertanya kepada Nabi Sholallahu ‘alaihi wasallam: “Apakah boleh aku menyambung hubungan silaturahmi dengannya?” Beliau berkata:”Ya.” Ibnu ‘Uyainah menerangkan: Maka Allah “Azza wa Jalla menurunkan ayat 8 surat Al-Mumtahanah tersebut artinya (Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu).

PENUTUP.

Demikian semestinya toleransi beragama itu diterapkan dimasyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Tidak sepatasnya kaum muslimin lalai dari segenap prinsip dan patokan agamanya dalam bertoleransi. Karen kaum muslimin akan ditunggangi oleh musuh-musuhnya bila melalaikan prinsip-prinsip tersebut. *Wallahu a'lamu bish-shawab. DS.16052016.*

MAAF DAN REKONSILIASI

Idul fitri adalah saatnya saling memaafkan. Kata maaf begitu mudah mengalir dalam komunikasi tulis dan lisan setiap orang saat bertemu atau menyampaikan ucapan selamat hari raya idul firi, mohon maaf lahir dan batin. Memberi maaf adalah kesediaan diri dan kondisi mental yang dapat menerima kesalahan masa lalu dan bersedia melupakannya. Maaf mudah mengucapkannya atau menuliskannya, namun jelas sulit melaksanakannya, khusus pada keadaan yang menyangkut harga diri, nyawa dan kehormatan.

Islam sebagai jalan damai dalam kehidupan dan panduan jalan kebenaran meletakkan landasan ideologis, teologis dan moral dalam mendorong setiap umatnya dapat memberikan maaf sesulit dan sekeras apapun keadaannya. Maaf bagi mereka yang benar-benar ingin menjunjung tinggi ajaran Islam menjadi mudah dan bisa dilakukan. Maaf bukan saja kebutuhan individu, tetapi juga berkaitan dengan keluarga, masyarakat dan bangsa.

Berdamai dengan diri sendiri, bersepakat dengan keluarga dan masyarakat, rekonsiliasi dalam kehidupan berbangsa akan mudah terlaksana, ketika maaf dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Damai yang dilahirkan oleh perbuatan maaf tidak saja bermanfaat untuk menjadikan diri lebih mudah menerima realitas, akan tetapi juga berguna untuk membangun keutuhan keluarga, kesejahteraan masyarakat dan kerukunan antar elemen bangsa.

Rekonsiliasi kehidupan berbangsa yang terus menjadi kebutuhan masa depan negeri ini sulit dapat dilakukan tanpa ada ketulusan untuk saling memaafkan. Membuka pintu maaf antar elemen dan komponen bangsa adalah keniscayaan yang tidak boleh ditunggu, tetapi harus segera diwujudkan. Rekonsiliasi adalah media tepat untuk membentangkan jalan damai dan kebenaran. Tidak

mungkin ada rekonsiliasi ataupun merasakan hidup dalam satu nafas yang sama, kecuali ketika maaf menjadi etika dan gaya hidup (*life seth*) kolektif semua anak bangsa. Untuk itu diperlukan kesamaan persepsi dan arah gerakan dalam menerjemahkan maaf dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan bernegara, antara lain:

MAAF DALAM KEPUTUSAN POLITIK

Wacana memaafkan dalam politik bukan barang baru. Sejak zaman Rasul Muhammad SAW, Allah SWT sudah memberikan arahan bagaimana menjadikan maaf sejalan dengan sabar. Kekeliruan tindakan politik, khususnya keputusan politik yang berujung pada perang, tidak selalu harus diselesaikan dengan membalasnya dengan perang pula. Melakukan pembalasan setimpal adalah sifat yang ditolerir, namun memberikan maaf justru itulah perilaku terpuji.

Allah SWT menegur Nabi Muhammad SAW, saat ia bersumpah akan membunuh 70 (tujuh puluh) orang kafir yang menyiksa tanpa pri kemanusiaan dengan merobek-robek tubuh dan memakan jantung pamannya Hamzah, saat syahid pada Perang Uhud. Untuk menetralsir pola pikir dan sikap hukum yang akan diambil Nabi, maka turunlah ayat surat an-Nahl,/16:126-8. Artinya: *Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*

Maaf dalam politik Islam menunjukkan tingginya moralitas kemanusiaan. Islam lebih memilih jalan damai dan saling memuliakan. Islam menegaskan bahwa kesabaran adalah cara terbaik yang harus dipilih oleh orang-orang bertaqwa dan orang muhsinin. Politik Islam adalah politik berbasis kemanusiaan, tidak politik bumi hangus dan ataupun akan memberikan pembalasan harus yang setimpal. Politik Islam lebih mendahulukan moral universal di atas kepentingan jangka pendek. Maaf, sabar dan lapang dada adalah pintu yang harus selalu dibuka lebar.

MAAF DALAM RELASI SOSIAL

Maaf menjadi kebutuhan dan keuntungan bernilai tinggi bagi pengembangan relasi sosial. Maaf sangat efektif untuk menjadikan hubungan antar individu dalam komunitas menjadi kokoh. Islam menempatkan sikap hidup pemaaf sebagai pilar utama menciptakan kestabilan sosial. Saat anak Abu Bakar RDA, isteri Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh munafik dan beberapa orang yang pembiayaan hidupnya diberi Abu Bakar, kondisi ini disikapinya dengan bersumpah tidak akan memberikan bantuan bagi siapa saja yang terlibat menyebarkan berita bohong dan merusak nama baiknya anaknya.

Sikap Abu Bakar RDA yang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan sosial, walaupun kasus berita bohong merusak nama baik dirinya, anaknya dan Nabi Muhammad SAW sendiri, moral Islam menegaskan bahwa memberi maaf dan sikap lapang dada jauh lebih mulia. Maaf dalam relasi sosial ini tidak selalu mudah dan dapat dilaksanakan dengan enteng. Ternyata tidak, bila perbuatan orang yang merugikan atau merusak nama baik itu jelaslah akan tidak mudah maafkan. Namun, itu dimengerti, namun sabar tetap lebih utama.

Pola pikir dan rencana aksi yang akan dilakukan Abu Bakar RDA, diingatkan Allah SWT dalam surat Nuur/24:22. Artinya; *Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan bendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa Dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bobong tentang diri 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu.].

Maaf dalam relasi sosial artinya memberikan maaf dalam hubungan antar manusia. Ketersinggungan dengan orang lemah atau pembantu sekalipun tidak boleh dikaitkan dengan pemberian hak, kewajiban dan tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Harus ada batas yang jelas antara urusan priadi dengan kepentingan publik.

MAAF DALAM PENDIDIKAN

Maaf juga dibutuhkan dalam mendidik dan membina keluarga. Maaf sangat diperlukan dalam memimpin generasi penerus, khususnya anak-anak yang menjadi harapan orang tua. Mendidik anak tanpa dibingkai maaf akan menjadi sulit suksesnya. Maaf dilingkungan keluarga dimaksudkan untuk pendidikan sepanjang hayat. Maaf yang terbangun dalam memory anak-anak akan berdampak jangka panjang bagi pembentukkan karakter generasi umat.

Contoh pembelajaran yang diungkap al-Qur'an tentang maaf sebagai sarana edukasi dapat ditemukan dalam kisah Nabi Yusuf. Saat bapak Yusuf yang bernama Nabi Ya'kup diciderai

amanahnya untuk memelihara Yusuf saat bermain nanti, lalu oleh anak-anaknya yang sudah besar dibohongi orang tuanya dengan baju yang dilumuri darah sebagai tipuan bahwa Yusuf di makan serigala. Artinya; *Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah (kesabaranku[Maksudnya: dalam hal ini Ya'qub memilih kesabaran yang baik, setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu.]). dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan."* (QS. Yusuf/12: 18).

Pilihan sabar dan mendoakan anaknya yang diambil Nabi Ya'kub dalam menyikapi kekecewaan terhadap perilaku anak-anaknya adalah modal sosial yang kelak menjadikan keluarga utuh dan bahagia di akhir usianya. Maaf dalam keluarga harus dibarengi dengan tidak boleh abaikan anak dan terus beri motivasi mereka.

MAAF DALAM KRITIK

Keutamaan yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Daud as, dalam jabatan kenabian dan kerajaan, membuat ia tidak selalu dapat sadar sepenuhnya, lalu pada satu kesempatan ia tergelincir yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan bagi seorang warganya. Isterinya seorang umatnya telah membuat ia tergoda, melalui orang kepercayaannya, Daud as, meminta agar sang suami menceraikan isterinya itu dan segera nanti akan dinikahinya.

Perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan orang penting tentu lebih luas dampaknya. Allah mengajari Nabi Daud as, dengan cara mengkritiknya melalui utusan dua orang Malaikat yang minta keadilan. Artinya... *Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk*

ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. dan Sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (QS. 38:23-5).

Pemimpin arif dan negarawan dengan cepat akan segera sadar atas kritik konstruktif. Daud as, segera sadar atas kekeliruan tindakannya, tidak perlu ada pihak yang meningngatkan, akan tetapi segera memperbaiki diri dan mohon ampunan atas kesalahannya. Pemimpin tidak boleh kebal kritik, karena memang kritik adalah pupuk untuk kemajuan. Jabatan dan status kepemimpinan setinggi apapun harus mampu bertindak yang tepat dan tidak menzalimi bawahannya.

Empat contoh hidup dan sumber belajar yang diungkap al-Qur'an di atas dapat dijadikan dasar rujukan untuk merikat kehidupan bangsa. Rekonsiliasi yang bermula dari kesatuan dan kebersamaan semua komponen dan elemen baru bisa didapatkan disaat pintu maaf, lapang dada, menegakkan aturan agar hak-hak yang dirapas dikembali secara adil, kesadaran kolektif pemimpin dapat berjalan secara benar dan lurus.

Rekonsiliasi nasional sebagai kebutuhan dapat diwujudkan dengan memaksimal kan peran politik, sosial, keluarga dan pemimpin forma penentuk kebijakan. Pemimpin bijak akan terus mengembangkan keutuhan bangsa melalui Islam rahmatan lil alamin, kultural, berupa kearifan lokal, adat istiadat dan regulasi penerapan adil dan tidak berpihak. Rekonsiliasi nasional bisa dicapai dengan mensosialisasikan dan mencari bentuk tepat untuk kebaikan semua pihak.

MASYARAKAT

BELUM BUTUH FKUB, APA IYA?²⁸

Judul di atas diangkat dari ungkapan seorang peserta dialog yang sangat bersemangat tentang ada atau tidaknya FKUB di daerahnya. Peserta tersebut adalah salah satu tiga daerah di Sumatra Barat yang FKUB belum terbentuk dan dalam sesi dialog dipertanyakan oleh peserta lain. Secara lugas dikatakannya bahwa kami tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak Kementerian Agama dan Pemda sudah berkali-kali mengadakan pertemuan, namun hasil evaluasi, FKUB di daerah ini belum dibutuhkan masyarakat, karena kehidupan keagamaan kondusif dan aman saja. Pernyataan peserta yang mewakili Kemenag tadi menjadi topic diskusi dan dialog selanjutnya.

Menjelang tutup tahun 2012 umat beragama yang berhimpun dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatra Barat melakukan dialog dengan FKUB Kaupaten Kota, Kesbangpol Propinsi, Kabupaten Kota, Kemenang Kabupaten Kota Se Sumatra Barat, bertempat di aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatra Barat pada hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2012. Dialog dengan didahului empat orang narasumber Zulnadi dari Kesabangpol Propinsi, Kanwil Kemenag, mewakili Kapolda, dan Duski Samad dari FKUB Sumatra Barat kemudian dilanjutkan dengan dialog berjalan dinamis.

Peta kondisi keberagamaan masyarakat Sumatra Barat selama tahun 2012 berjalan aman, tertib dan kondusif, meskipun ada

²⁸ Dialog Refleksi Akhir Tahun 2012, FKUB Propinsi bersama FKUB Kab.Kota,Kesbangpol,Kemenag Kab.Kota Se Sumbar, Jum'at, 28 Desember 2012 di Kanwil Kemenag Jln. Kuini Padang.

masalah kecil yang dapat diselesaikan dan belum menjadi konflik besar. Zulfaldi menegaskan kasus yang berkaitan dengan rumah ibadah di Pasaman Barat, Agam, Dharmasraya adalah contoh masalah yang harus terus menerus diwaspadai dan perlunya dialog. Kapolda juga menegaskan penyerangan antar kelompok dan suku seperti kasus Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara di Subuh hari atas dasar konflik lahan adalah juga perlu dukungan tokoh agama untuk meredam bersama-sama aparat keamanan. Begitu juga halnya dengan penyambutan tahun baru 2013 aparat keamanan mohon tokoh agama ikut serta mendorong tercipta keamanan di Sumatra Barat, sampai saat daerah teraman kedua setelah Bali. Sedangkan curanmor dan kejahatan perampokan Sumbar belum dapat dibayangkan karena hampir setiap hari ada satu kasus.

Narasumber Kakanwil H. Ismail Usman, menegaskan bahwa Kementerian agama tetap membutuhkan FKUB dan akan terus memfasilitasi sarana dan biaya serta kordinasi dengan Pemerintah daerah. Sisi lain yang juga harus diingat terus kepada tokoh agama adalah kondusifnya kehidupan beragama di daerah ini tidak boleh membuat kita lengah, karena agama adalah hal yang sensitive dan mudah dipakai sebagai alat justifikasi, kasus adanya keresahan pendirian rumah ibadah agama tertentu di Pasaman dan Dharmasraya misalnya sebenarnya dipicu oleh motif ekonomi atau kepentingan lain, tidak nampak kesan motif keagamaannya, begitu penegasan Duski Samad seorang pengiat kerukunan.

Isyu lain yang juga kian dirasakan oleh pengurus FKUB Kabupaten Kota adalah lahirnya kelompok masyarakat yang cenderung beragama di luar *maindstrim* yang ada. Aliran sesat di beberapa daerah dari beberapa agama cenderung menyimpan potensi konflik. Begitu juga pihak kementerian agama diminta untuk hati-hati dalam memposisikan antara satu agama dengan agama lainnya. Contoh kasus adalah antara agama Budha dengan Konghucu. Organisasi WALUBI adalah wadahnya umat Budha

bukan Konghucu. Begitu juga Klenteng bukan rumah ibadah Konghucu, begitu penegasan Romo Silandri dari Walubi. Konghucu secara organisasi keagamaan belum ada di Sumatra Barat. Etnis Tionghoa di Sumatra Barat bukanlah penganut Konghucu tapi adalah penganut Budha. Di Tiongkok sendiri tidak ada agama Konghucu, tapi agama Budha. Konghucu adalah filosof yang pemikirannya dijadikan panduan hidup oleh orang-orang Cina.

Pentingnya juga untuk diingatkan bahwa kontelasi politik di tahun 2013 akan mengalami kenaikan suhu dengan segala ikutannya, oleh karenanya tokoh agama diharapkan dapat mencermati dan menyikapinya dengan cerdas tanpa harus melibatkan agama untuk kepentingan kelompok atau kepentingan jangka pendek. Tokoh agama dihimbau untuk terus membangun dialog yang santun, dinamis dan tetap berakar pada nilai-nilai agama. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang Pendeta Manulang dari agama Keristen adalah bahwa tahun 2012 sampai 2015 agama Kristen Protentan dan Katolik menyepakati satu himbauan bersama yaitu “Marilah Berdamai dengan Semua”. Mereka menilai bahwa kerukunan di Sumatra Barat belum cukup kuat menyintuh lapisan masyarakat di bawah. Pada level elit mereka sudah merasakan betul bahwa kerukunan di Sumatera Barat sangat baik.

REFLEKSI UNTUK AKSI

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi dan peta keberagaman di Sumatra Barat sepanjang tahun 2012 dan memperkirakan tantangan ke depan perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 3 (tiga) agenda bersama yaitu:

Pertama: Menjaga Kondusifnya Situasi Keberagaman.

Kehidupan keberagaman yang sudah kondusif dan aman ini perlu terus dijaga dan diisi dengan agenda bersama untuk

kebaikan masyarakat (*virtue public*). FKUB dan forum lintas keagamaan seperti FAPSEDU (Forum Antar Tokoh Agama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) diminta untuk melakukan kerja bersama dalam meningkatkan taraf kehidupan umat beragama. Menjaga umat beragama dari infiltrasi dan penyimpangan keagamaan seperti aliran sesat dan perbuatan menyimpang lainnya.

Kedua: Konsolidasi FKUB.

Untuk memenuhi kehendak Surat Keputusan Bersama tentang FKUB perlu dilakukan pendampingan dan konsolidasi lebih intensif kepada tokoh agama di Kabupaten Agam, Tanah datar dan Pesisir Selatan untuk dapat mendirikan FKUB. Berdirinya FKUB dapat dimenegrti sebagai upaya menyediakan mediasi ketika ada masalah yang berkaitan dengan agama. FKUB Propinsi juga diminta untuk menyesuaikan susunan pengurus FKUB Darmaasraya sesuai aturan yang berlaku, dimana Kemenag adalah penasihat.

Ketiga: Komitmen Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi FKUB.

FKUB sebagai wadah fasilitator, dialog dan mediasi antar tokoh umat beragama pasti besar sumbangannya bagi keamanan dan ketenteraman masyarakat. Maka Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota harus menyatakan komitmennya yang serius untuk membantu kebijakan, budget dan dukungan fasilitas. Komitmen Pemerintah daerah dipastikan akan menentukan gerak langkah FKUB dan efektifnya lembaga ini.

Pertemuan refleksi akhir tahun dan agenda aksi menyongsong 2013 ini diakhiri dalam semangat kebersamaan dan keakraban tokoh lintas agama atau 5 agama yang ada di Sumatra Barat. Semoga tetap aman, dan terus lahirnya kebabjikan nan abadi. Ds. 29122012.

UMAT PILIHAN ITU MENYATU!

Setiap makhluk diberikan Allah fitrah atau naluri untuk hidup berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dibangun biasanya berdasarkan unsur kesamaan yang mereka miliki. Kelompok makhluk Tuhan inilah yang disebut dengan nama ummat, dan manusia adalah salah satu bentuk kelompok tersebut. Akan tetapi, dari sekian banyak bentuk ummat, dalam al-Qur'an terdapat istilah khairu ummah yang berarti umat terbaik; sebuah penamaan yang diperuntukan bagi umat Islam. Kata Khairu Ummah tersebut terdapat dalam surat Ali 'Imran [3]: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.* (QS. Ali Imran/3:110)

Firman Allah SWT di atas merupakan pernyataan dari Allah SWT bahwa umat Muhammad s.a.w., yakni kaum muslimin, sebagai umat yang terbaik di antara umat manusia di muka bumi. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip sebuah hadits dari Bahz bin Hakim bahwa tatkala membaca ayat ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

أَنْتُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

Artinya: “*Kalian adalah penyempurna dari 70 umat, kalian yang terbaik di antara mereka dan termulia di sisi Allah ‘Azza wa Jalla’*” (HR. at-Tirmidzi).

Ummat seperti yang telah disebutkan, ia diartikan sebagai suatu kelompok yang dihimpun oleh suatu kesamaan. Kesamaan itu bisa agama, waktu, tempat, jenis dan sebagainya. Oleh karena itulah, burung yang diikat kesamaan jenis sebagai binatang yang memiliki sayap dan terbang, dalam al-Qur’an disebut umat, (QS. al-An’am [6]: 38). Umat Muhammad saw adalah umat terbaik dari semua aspek yang mengikat kesamaan tersebut. Misalnya dari sisi agama, betapa tidak karena Allah swt telah menegaskan dalam surat al-Maidah [5]: 6, “*Pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku sempurnakan atas kamu nikmat-Ku dan telah Ku ridhai Islam sebagai agamamu*”. Agama Islam yang dibawa nabi Muhammad saw adalah agama yang paling terakhir dan paling sempurna.

Dari segi waktu atau masa hidup, umat Islam juga merupakan umat terbaik. Sebab, dalam surat al-Hadid [57]: 9, Allah swt berfirman, “*Dialah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang nyata supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dan sesungguhnya Allah terhadap kamu maha pengampun lagi penyayang*”. Hal itu menunjukkan bahwa umat Muhammad hidup dalam masa dan keadaan, yang jauh lebih baik dari umat lalu. Sebab, umat lalu hidup dalam zaman kegelapan, baik akidah maupun peradaban. Saat ini umat Islam telah mencapai apa yang zaman dulu mustahil bagi manusia, seperti naik pesawat, mobil dan sebagainya.

Umat Islam juga umat terbaik dari sisi wilayah atau tempat tinggal. Betapa tidak, bahwa di manapun negara Islam atau negara yang berpenduduk muslim merupakan negara yang kaya raya. Seperti Indonesia yang merupakan negara paling subur dan disebut sebagai “surga Allah” di bumi. Negara-negara Arab, walaupun tidak subur tetapi kaya dengan sumber-sumber minyak

yang menjadi urat nadi kehidupan dunia. Begitulah Allah jadikan umat Islam sebagai umat terbaik dari segi tempat tinggal.

Dari segi jenis sudah dapat dipastikan bahwa jenis manusia adalah umat terbaik bila dibandingkan jenis lain, “Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan” (Q.S. at-Tin [95]: 4. *Namun demikian, jika kita kembali kepada surat Ali Imran [3]: 110 tentang pembicaraan Allah terhadap umat Islam sebagai umat terbaik, akan ditemukan sebab yang menjadikan kondisi dan sebutan itu tetap melekat pada diri mereka.* Tidak perlu dipertentangkannya apakah yang terbaik di antara umat Islam ini, yang awal ataukah yang akhir, al-Qurthubi dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat hadits bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أُمَّتِي كَالْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوْلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

“Umatku bagaikan hujan, tak diketahui, yang lebih baik itu yang pertama ataukah yang terakhir.” (HR Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Abu Isa At-Tirmidzi dari Anas bin Malik). Keunggulan kaum muslimin yang menjadi umat terbaik ini di antara umat manusia disebut oleh Abu Hurairah r.a. (lihat al-Qurthubi) dalam ucapannya:

نَحْنُ خَيْرُ النَّاسِ نَسُوقُهُمْ بِالسَّلَابِلِ إِلَى الْإِسْلَامِ

Artinya: “Kami adalah yang terbaik di antara manusia, kami mengarahkan mereka untuk menapaki jalan mendaki menuju kepada Islam”.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyertakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Durrah binti Abi Lahab berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah saw sewaktu beliau berpidato di atas mimbar : “Siapakah orang yang terbaik, ya Rasulullah? Rasulullah s.a.w. menjawab:

خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَأُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلَهُمْ لِلرَّحْمٰنِ

“Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak membaca, paling bertaqwa kepada Allah SWT, paling giat melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan paling suka bersilaturahmi.”

Dari sini bisa kita pahami bahwa orang yang terbaik adalah yang banyak pengertiannya (karena aktivitas membacanya) dan paling memiliki sikap taqwa. Dengan kalimat singkat, dia adalah orang yang senantiasa berbuat baik dalam pandangan syari’at Islam, baik untuk dirinya, maupun untuk umat manusia. Al-Qurthubi mengutip sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسَنَ عَمَلُهُ وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَ سَاءَ عَمَلُهُ.

Artinya: “Sebaik-baik orang adalah orang yang berumur panjang dan baik amalnya dan seburuk-buruk orang adalah yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya”.

Untuk mewujudkan norma sebagai umat terbaik di atas beberapa panduan al-Qur’an menegaskan, antara lain perlu ada ikhtiar kolektif untuk menyatukan umat dalam satu sistim ketuhanan, aqidah yah sahahah, dan ibadah hanifah yang dapat juga dikatakan sebagai umat menyatu,(*ummat wahidah*). Firman-Nya:

إِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu[Maksudnya: sama dalam pokok-pokok kepercayaan dan pokok-pokok Syari’at.] dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. (QS. Al-Anbiyaa’/21:92).

Menanamkan nilai-nilai ketuhanan, memperbaiki aqidah dan menegakkan ibadah yang lurus adalah cara yang jelas untuk menegakkan umat pilihan atau terbaik. Umat terbaik akan

menjadi isapan jempol, tinggal dalam norma agama, ketika umat tidak memeperlihatkan identitas dan kapasitas diri sebagai makhluk bertuhan dan patuh pada ajarannya. Persatuan dan kesatuan umat atau umat yang menyatu hanya bisa hadir ketika aqidah dan ibadah dapat menjadi jembatan emas pemersatunya.

Kesiapan menerima perbedaan sebagai jalan utama menuju penyatuan sulit didapatkan bila pola pikir tidak dikembangkan menjadi umat moderat, *Ummatan wastaban*, firman-Nya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِئَنعَلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۗ

Artinya: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan [Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhiraat.] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. (QS. Al-Baqarah/2:143)*

Ummat wasathan biasa juga diterjemahkan umat pertengahan atau moderat. Ibnu Katsir memahami umat tengah sebagai umat pilihan dan terbaik, umat paling mulia dan utama, umat yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Karena, Allah menjadikan umat Islam sebagai umat tengah, Allah memberi secara khusus syariat yang paling sempurna, manhaj paling lengkap, dan mazhab paling jelas.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya memahami umat tengah sebagai umat yang menjadi saksi bagi manusia semua bahwa mereka menerapkan nilai keadilan dan keseimbangan. Umat ini adalah umat tengah dalam segala kandungan maknanya, baik dalam arti tengah pada persepsi dan pemahaman, sehingga tidak tenggelam dalam ruhani atau hanya mementingkan urusan materi saja; tengah dalam pemikiran dan perasaan.

Umat Islam, menurut Buya Hamka, adalah umat yang menempuh jalan tengah, menerima hidup dalam keadaannya. Percaya kepada akhirat, lalu beramal di dalam dunia ini. Mencari kekayaan untuk membela keadilan, mementingkan kesehatan ruhani dan jasmani karena kesehatan yang lain bertalian dengan yang lain. Mementingkan kecerdasan pikiran, tapi dengan menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan. Mencari kekayaan sebanyak-banyaknya karena kekayaan merupakan alat untuk berbuat baik. Menjadi khalifah di muka bumi untuk bekal menuju akhirat karena kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selama umat ini masih menempuh jalan yang lurus, selama itu pula mereka akan menjadi umat jalan tengah.

Umat pertengahan juga kelihatan dalam praktik ibadah, betapa ajaran Islam syarat dengan simbol-simbol kehidupan seimbang itu. Dalam shalat, umpamanya, terjadi keseimbangan yang serasi yang menggabungkan antara gerak raga dan gerak jiwa. Tiap Jumat, umat Islam tetap disuruh bekerja mencari rizki, tapi ketika azan dikumandangkan menandai datangnya shalat Jumat, semua pekerjaan harus ditinggalkan, bergegas menuju masjid untuk melaksanakan shalat Jumat.

Setelah shalat Jumat, mereka kembali menuju pekerjaannya masing-masing. Begitu pula dalam praktik mengumpulkan kekayaan materi. Dalam harta yang dikumpulkan, ada harta bagian yang harus dikeluarkan untuk pemberdayaan orang-orang lemah supaya terjadi keseimbangan sosial dan tidak terjadi

ketimpangan. Alquran menegaskan pentingnya keseimbangan hidup dunia dan akhirat, ruhani dan materi.

Sedangkan Imam Ibnu Jarir ath-Thabari menyatakan bahwa makna '*wasathan*' adalah bagian yang berada di antara dua sisi. Dan Allah menyifati umat ini sebagai '*ummatan wasathan*' karena sikap pertengahan mereka dalam agama. Umat Islam bukanlah '*ahlu gbuluw*', kelompok yang melampaui batas, sebagaimana *ghuluw*-nya orang-orang Nashara dalam kerahiban dan melampaui batasnya mereka dalam berbicara tentang 'Isa 'alaih salam.

Umat wasathan juga bukan '*ahlu taqshir*', kelompok yang suka mereduksi (mengurangi dan menghilangkan) ajaran agama, sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengubah kitab Allah, membunuh Nabi-nabi mereka, serta kafir dan mendustakan Tuhan mereka. Ia adalah umat yang *tawassuth dan i'tidal*, bersikap pertengahan. Dan Allah menyifati mereka dengan ini, karena perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah pertengahannya.

Makna yang dikemukakan dua ahli tafsir ternama di atas tentang makna '*ummatan wasathan*' di ayat ini memang berbeda. Perbedaan mereka salah satunya dilandasi oleh perbedaan memahami makna '*wasathan*'. Namun, sebagai pelajaran, bisa terima penjelasan dua ahli tafsir di atas, tanpa harus meninggalkan salah satunya. Kesimpulan yang harusnya diambil umat Islam adalah umat yang terbaik, karena mereka memiliki syariat yang paling sempurna dan *manhaj* yang paling kokoh. Dan salah satu sifat yang menonjol pada umat terbaik ini adalah sifat pertengahan, tidak bersikap *ghuluw*, bukan juga *ahlu taqshir*. Umat Islam bukanlah umat yang bersikap *ghuluw* atau ekstrim dalam beragama. Mereka adalah umat yang bersikap *tawassuth dan i'tidal*, sebagaimana telah dicontohkan dengan sangat baik oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat ridhwanullahi 'alaihim ajma'in.

Dalam merealisasikan sikap pertengahan di atas maka setiap sikap tengah harus punya argumentasi ilmiah, sehingga menjadi *ummatan wasathan* itu tidaklah mudah. Imam Hasan Basri (21-110 H) mengingatkan umat Islam jangan larut dalam perpecahan politik antara Syiah, Jabariah, Mu'tazilah, Qadariah, dan Murji'ah. "Imam Hasan Basri berpesan, agar mewarisi dan mengambil prinsip-prinsip Islam dan ilmu-ilmu keislaman secara komperhensif dan moderat. Jangan terjebak hanya partai politik. Gerakan zuhud dan memperkuat nilai-nilai kemoderatan (sufistik) yang dikembangkan Hasan al-Bsihri akhirnya memunculkan gerakan ilmiah di kalangan tabi'ut tabi'in," kelak sejarah mencatat bahwa Hasan Al-Bisri menjadi rujukan pemikiran, keteladan dan gaya hidup di masa tabi' tabiin.

Dalam perkembangan ilmu keislaman, sikap moderat adalah pangkal lahirnya ilmu tauhid, ilmu kalam atau disebut juga teologi Islam. Memahami akidah kalau hanya dengan al-Qur'an dan Hadis saja tidak akan meresap dalam hati. Tapi kalau didukung dengan teori-teori rasional, kreatifitas para ulama yang namanya ilmu kalam, maka bisa mengenal Allah dengan meresap. "*Allah Tuhan yang satu. Memiliki sifat yang wajib 20, yang mustabil 20 dan jaiẓ satu. Yang 20 dibagi lagi menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani.* Itu sebuah temuan pemahaman dan sikap *tawasuth* para ulama akidah menggabungkan antara al-Qur'an, Hadis dan *mantiq aqliyah*,"

Adapun sikap *tawasut* dalam ber-syariah, melahirkan produk yang luar biasa, namanya ilmu fiqh. Tanpa fiqh, umat Islam tidak bisa berbuat banyak. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam mendirikan shalat sebanyak 62 kali. Tapi al-Qur'an tidak menjelaskan berapa kali shalat yang wajib itu. Namanya apa shalat yang wajib itu? Tapi penjelasan itu ada di dalam hadis. Tapi hadis tidak menjelaskan syarat dan rukun shalat itu apa saja. "Lalu, dari mana kita tahu shalat yang kita lakukan sekarang? Jawabannya dari ijtihadnya para ulama yang melahirkan ijma' (konsensus). Ulama itu bukan kita, tapi Imam Hanafi, Imam Asy-

Syafi'i, Imam Hanbali dan lainnya. Jadi siapa orang yang tidak mengikuti ulama, maka dia tidak akan bisa shalat sampai hari kiamat,”

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa umat pilihan dan umat terbaik sulit mewujudkannya tanpa adanya kesamaan pandangan yang didukung oleh kesatuan aqidah, ibadah dan gerakan pembinaan umat. Melahirkan umat yang memiliki cara berfikir yang tawasut adalah cara baik untuk menciptakan umat terbaik. Kembali pada nilai dasar keislaman adalah agenda strategis untuk menuju umat pilihan. Ds. 29072016.

MEMAAFKAN

Jagad kehidupan di dunia nyata dan dunia maya minggu ini dipenuhi oleh ucapan dan tulisan mohon maaf lahir batin, marilah kita saling memaafkan dan kata sejenisnya yang mengandung makna memaafkan dan dimaafkan. Memaafkan mudah mengucapkan dan menulisnya di media sosial FB, WA, Twitter dan sejenisnya, namun tidak mudah merealisasikan dalam tindakan dan sikap hidup. Memaafkan artinya melupakan kesalahan pihak lain yang terkait dengan diri orang meminta maaf. Di maafkan artinya kesediaan orang yang pernah dirugikan, dijahati lalu dilupakan dan abaikan begitu saja.

Akhlik Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah pintu kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Silaturahmi yang menjadi tali penghubung antar sesama manusia tidak boleh tergoreskan, apalagi putus atau rusak, hanya soal kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Realitasnya, tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Sekaitan dengan kata memaafkan dan dimaafkan ada tiga pesan moral al-Qur'an dijadikan pedoman menghadapi masalah sulit itu.

MEMAAFKAN ITU MULIA.

Kemuliaan memaafkan menjadi hal penting dan pokok dalam menjaga kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Begitu pentingnya kesediaan memaafkan disebutkan dalam al-Qur'an;

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ
أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (QS. An-Nuur/24: 22).

Dalam kitab Lubub Asbun Nuzul disebutkan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa Dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu.

Abu Bakar AlSiddiq dapat melaksanakan perintah Allah SWT untuk memaafkan anak angkatnya yang juga terlibat jauh menyebarkan berita bohong terhadap peristiwa Aisyah yang dibebaskan Allah SWT tidak bersalah dalam kasus kabar bohong (*hadisul ifkun*). Abu Bakar AS mencabut sumpahnya tidak akan membantu siapa saja yang terlibat dalam kasus yang menghebohkan itu, lalu Allah menegurnya bahwa memaafkan dan berlapang dada adalah perbuatan terpuji.

MEMAAFKAN DAN MEMBALAS.

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a ketika Rasulullah SAW melihat jenazah Hamzah yang gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud dengan keadaan tubuh yang mengenaskan. Seketika itu, Rasulullah SAW bersumpah; “Sungguh aku akan membalas dendam kepada orang-orang kafir. Aku benar-benar akan membantai tujuh puluh orang di antara mereka”. Pernyataan ini

ditegur Allah dengan memberi nasehat kepada Rasulullah dengan sabar, karena itulah yang terbaik. Seperti tertera dalam surat al-Nahl (16)126-128).

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ . وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ . إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ .

Artinya: *Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu[Maksudnya pembalasan yang dijatuhkan atas mereka janganlah melebihi dari siksaan yang ditimpakan atas kita.]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Bersabarlah (hai Muhammad) dan Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.*

Memaafkan dan membalasi kejahatan adalah diizinkan dalam batas-batas yang sebanding dan sepadan. Ajaran akhlak Islam justru lebih mendahulukan sabar dengan memaafkan kesalahan dan kejahatan orang terhadap kita. Malah ditegaskan bahwa sabar itu juga bahagian dari menunaikan urusan Allah.

MENYADARI DAN MEMAAFKAN.

Nabi Daud as adalah salah seorang Nabi dan Rasul Allah yang cepat memahami teguran dan segera meminta maaf atas kesalahannya. Allah memberikan pelajaran menyadari kesalahan dan segera memohon maaf melalui kisah Nabi Daud. Ketika, ia

tergoda dengan seorang perempuan, isteri dari seorang laki-laki saleh, kemudian ia mengupaya akan suaminya menceraikan isterinya yang hanya satu-satunya, untuk kemudian ia akan mengawini perempuan tersebut.

Allah menegur Nabi Daud as dengan cara diutus dua orang Malaikat yang bertengkar dalam merebut satu ekor kambing yang ingin diambil oleh penggembala yang sudah memiliki sembilan puluh sembilan kambing.

إِنَّ هَذَا أَحْيَىٰ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَّيَ لِي نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ
فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ
نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka Dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan Dia mengalahkan aku dalam perdebatan". Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyekur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad/38:23-4).*

Sadar terhadap kesalahan, segera bertaubat dan meminta maaf adalah sifat mulia yang dimiliki Rasul Allah tentu juga harus menjadi teladan dan ikutan bagi umat pengikut Nabi. Sehebat apapun orang, ia tetap punya kelemahan dan kesalahan, cara terbaik untuk menyempurnakan kemanusiaan adalah dengan menyadari kelemahan, kesalahan dan kemudian segera memaafkan kesalahan seberat apapun.

Etika dan tatacara memaafkan dan meminta maafkan jika berhubungan dengan Allah ya taubatan nasuha. Kalau itu berkaitan dengan kesalahan dalam hubungan antar manusia haruslah dengan terbuka dan bersikap *gentelmen*, berani menyebutkan kesalahan dan memohon maaf atas kesalahan itu. Jika menyebut kesalahan akan berakibat buruk, misalnya rusaknya hubungan yang telah baik, maka dapat dilakukan dengan memohonkannya pada Allah SWT. Akhlak Islam mendahulukan *mashlahat* di atas *mafsadat*, tidak baik membuka aib masa lalu yang akan berakibat fatal dalam hubungan antar manusia.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kelak di akhirat saat manusia diadili, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya diperlihatkan oleh Allah SWT istana super mewah. Orang itu bertanya, ya Allah siapa saja yang berhak masuk ke istana itu, Allah menjawab orang yang bersedia dengan tulus memaafkan kesalahan saudaranya. Saat itu juga orang tersebut berdoa, Ya Allah, aku sudah maafkan kesalahan saudaraku dengan ikhlas. Lalu istana itu diberikan Allah SWT pada orang yang ikhlas memaafkan tersebut.

Mengiringi idul fitri yang dikatakan sebagai bulan saling memaafkan, bulan tempatnya takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan, bulan Syawal yang bermakna peningkatan dengan puasa sunah enam hari di bulan Syawal ini, maka patut sekali umat Islam yang sudah menyelesaikan hubungannya

dengan Allah melalui puasa Ramadhan, kini saatnya membereskan hubungan dengan sesama manusia, saling memaafkan dan mendoakan. *Taqabbalahhu minni wa minkum taqabal ya karim*. Amin. Ds. 08072016.

ANTI KEBHINIKAAN?

Kebhinikaan bangsa Indonesia adalah realitas sejarah dan merupakan keniscayaan yang wajib dihormati oleh semua elemen bangsa. Judul tulisan anti kebhinikaan dengan disertai tanda tanya adalah kesadaran bahwa wacana itu mencemaskan dan berpotensi mengganggu ketahanan bangsa. Pernyataan tentang anti kebhinikaan jika itu ditujukan sebagai respon atas gerakan demokratis oleh sebahagian anak bangsa berupa unjuk rasa menuntut perbuatan dan sikap tidak bijak seorang pejabat publik, yang sekarang lebih dikenal dengan gerakan 411 dan 212 adalah tidak sepenuhnya benar, kalau tidak mau dikatakan berlebihan.

Kata anti kebhinikaan beredar luas di media, termasuk media sosial, karena disampaikan dalam pidato politik ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat peringatan hari ulang tahun PDI P yang ke 54 pada 10 Januari 2017 disamping penegasan kata sejahteraan rakyat, bukan sebaliknya. Pada prolog pidato diungkapkan bahwa Pancasila adalah ideologi kebangsaan yang mata airnya adalah kultur Indonesia asli. Bersamaan dengan itu, Buk Mega mengkritisi tentang ideologi tertutup yang tengah berkembang di tanah air dan itu diyakini akan membuat Indonesia pecah belah dan mengancam kebhinikaan.

Pandangan politik Buk Mega secara politis itu boleh saja, karena memang itu disampaikan dalam pidato politik. Wacana dan pilihan kata dalam pidato politik biasanya tetap saja dimaknai sebagai sikap politik. Sikap politik tentu belum sepenuh berbasis metodologi ilmiah yang tingkat akurasi dipercaya. Pidato politik dapat dipahami sebagai bentuk menarik simpati dan perhatian konstituen guna untuk investasi dukungan pada pemilihan umum berikutnya. Bila kacamata politik dijadikan

ukuran baku dalam menilai kondisi terkini kehidupan berbangsa tentu akan membawa masalah lain nantinya.

Pidato politik tidak mesti dimaknai *linear* dan dimungkinkan akan berbeda dengan kajian ilmiah adalah niscaya adanya. Dalam konteks sosiologis dan realitas yang terjadi amat patut ditelisik lebih jernih apa yang disebut Ketum PDI P di atas. Fachri Ali dalam wawancara *Apa Kabar Indonesia* jam 21.00 Selasa 10 Jan 2017 menyebutkan bahwa kasus Habib Rizieq menjadi tokoh utama seperti yang terjadi pada peristiwa 411 dan 212 itu lebih disebabkan karena ketidakmampuan elit bangsa menangkap ruh zaman. Kegagalan konsolidasi organisasi Islam formal dalam menjawab kebutuhan umat dan memberikan solusi terhadap masalah umat.

Menurut Fachri Ali bahwa Pidato Ibuk Megawati adalah meresponi 411 dan 212 yang memunculkan tokoh Habib Rizieq. Sekali lagi, ini terjadi karena ormas formal dan tokohnya abai terhadap suara rakyat. Pimpinan organisasi politik, tak terkecuali PDI Perjuangan yang visinya wong kecilpun terjebak pada arus elit korup dan rebut kekuasaan. *Consern* PDI P partai wong cilik mestinya tidak boleh luntur dan tetap jadi semangat dan arah perjuangannya. Sayangnya, realita politik koalisi DPR yang digagas PDI P begitu rapuh dan terkesan bagi-bagi kue adalah indikasi elit larut dalam uforia yang melupakan wong cilik. Inilah sesungguhnya yang diingatkan Ketum PDI P itu dengan bahasa lugas sejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Pidato politik tentu harus dibaca dan diartikan secara politik pula. Nasionalisme yg didasarkan pada pandangan antropocentris dapat dimaklumi. Namun, juga harus diingatkan sejarah lurus bangsa ini yg *founding father* adalah pimpinan umat dimana spirit religiusitas pondasi perjuangan. Siapapun yg paham akar, kultur dan peradaban nusantara pasti dengan arif akan memposisikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam makna utuh dan menyeluruh.

Tidak satupun event, gerak dan denyut nadi bangsa ini yg boleh bebas dari nilai Ketuhanan.

Ada pendapat bahwa ancaman anti kebhinikaan rasanya terlalu mengada-ada dan boleh jadi bentuk pengalihan masalah yang bermotif pembenaran terhadap sikap keterlaluhan tokoh antagonis, Ahok. Berbaik sangka perlu sekali, tetapi waspada dan kritisi sangat perlu pula. Dalam konteks ini siapapun harus mewaspadai terhadap siapa saja yang akan membalikkan jarum sejarah. Anak bangsa diyakini sudah dewasa dan paham apa artinya dan makna demokrasi. Menyampaikan pendapat, pikiran dan aspirasi sesuai undang-undang adalah keberhasilan demokrasi yang hendaknya dihargai dan ditempatkan secara arif.

IMPLEMENTASI TOLERANSI

Kecemasan anti kebhinikaan boleh saja terjadi. Namun yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mencegah pembiakannya, dan implemementasi toleransi. Toleransi sudah berkembang sejak tahun-tahun awal bangsa ini mencapai kemerdekaannya. Agar konsep toleransi menjadi implementatif, *Pertama*, perlunya diadakan pembenahan pemahaman secara mendasar menyangkut tataran filosofis dan etis, atas sikap keberagamaan umat terhadap agama mereka sendiri dan agama orang lain. Satu sama lain memiliki posisi yang setara dan saling membutuhkan. Antar umat dibimbing untuk mempelajari kebudayaan lain melalui proses dialog, maka akan memperluas cakrawala pemahaman tentang kemajemukan.

Kedua, setelah terdapat pemahaman agama yang benar pada umat beragama, selanjutnya, umat beragama mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan hal-hal apa saja yang menjadi akar dari konflik dan kekerasan pada masyarakat, seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan yang rendah dan sebagainya. Artinya pendekatan ekonomi berkeadilan dan

mengatasi jurang pemisah antara yang kaya dengan miskin adalah bentuk nyata dari menutup celah konflik.

Ketiga, pemuka agama mengembangkan nilai-nilai agama yang menekankan pada pemeluknya untuk berpandangan optimistis dan semangat bekerja keras. Nilai-nilai ini dimaksudkan untuk meyakinkan kembali bahwa selama usaha maksimal telah dilakukan, maka pantang hukumnya untuk berputus asa dan hilang harapan. Nilai-nilai agama yang melahirkan sosok-sosok ummat yang ulet, kreatif dan memiliki keterampilan dalam bekerja keras di dunia perlu untuk lebih sering dikemukakan dalam rangka menuntaskan “akar konflik dan kekerasan”.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa pandangan anti kebhinikaan tanpa pembatasan adalah tidak tepat dan tidak dapat mewakili sikap sebahagian besar elemen umat Islam. Sikap dewasa, cerdas dan terus mengawal proses demokrasi untuk berjalan di alur yang tepat adalah pilihan bijak untuk merawat kebhinikaan Indonesia. Jalan berbeda itu bukanlah menunjukkan permusuhan dan perlawanan. Berprasangka baik, mengedukasi dan menilai kondisi secara akurat, jernih dan arif adalah cara terbaik untuk memantapkan kebhinikaan. DS.11012017.

MEMBANGUN JARINGAN KOMUNIKASI UMAT²⁹

Agama mendapat kedudukan yang amat penting, terhormat dan suci di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu para penganutnya terutama para pemuka Agama di Indonesia ini mampu mendaya gunakan Agama yang dianutnya sebagai kekuatan untuk hidup terhormat. Agama seyogianya dapat dijadikan pendorong paling utama untuk mengeksistensikan nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada diri manusia itu sendiri, bahkan aspek kemanusiaan itulah unsur yang terpenting dalam diri manusia. Bung Karno sering menyatakan bahwa “*Homo homini socius*”. Artinya manusia adalah sahabatnya manusia. Bukan “*Homo homini lupus*”, Artinya: Manusia bukan srigala bagi manusia”.

Pluralitas atau kemajemukan kelompok umat beragama itu menjadi beban tugas semua unsur bangsa untuk membangun integrasi. Kemajemukan ini berimplikasi pada dua potensi yang kontradiktif sekaligus, yaitu potensi integrasi dan disintegrasi. Potensi disintegrasi ini perlu dikelola agar berubah menjadi potensi integrasi yang positif yang mampu mendukung pembangunan di atas kemajemukan. Kini sudah saatnya setiap komunitas budaya merevitalisasi kearifan lokalnya sebagai modal sosial (*social capital*) agar terbangun rasa persaudaraan yang kuat antar kelompok umat beragama. Kearifan lokal yang mulai hilang dari jiwa masyarakat pemilik budaya membuat potensi konflik anarkisme agama semakin membesar. Masyarakat tidak memiliki filter kultural yang kuat sebagai pengendali sosial dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka.

²⁹ Bahan Kordinasi FKUB Kabupaten Darmasraya, Selasa, 31 januari 2017 di Gedung Sekber KUB Ka. Darmasraya.

Penguatan toleransi bertujuan untuk membangun tatanan sosial yang harmoni. Dalam membangun tatanan sosial yang harmoni ada tiga komponen dasar yang menjadi landasan bagi setiap individu dalam melakukan interaksinya, yaitu: Kepercayaan, kepercayaan yang terbangun dengan baik antara satu individu dengan individu, antara individu dan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Kepercayaan itu diikat oleh prinsip saling pengertian (*mutual understanding*). Norma, hal ini merupakan satu nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bagi setiap anggota masyarakat untuk dijadikan sebagai rambu-rambu hukum yang harus dipatuhi dalam suatu komunitas, norma-norma ini menjadi penguat sosial kontrol dalam sistem sosial masyarakat yang menjadi nilai-nilai bersama (*share value*).

Jaringan, konsep ini memiliki makna kerjasama dalam sistem sosial masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik secara terus menerus. Pemerintah sangat serius dalam mendorong terciptanya integrasi sosial dalam masyarakat, salah satunya dengan mengimplemetasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Isi peraturan menteri itu antara lain pembentukan lembaga jaringan komunikasi antartokoh agama-agama pada daerah-daerah yang dinamakan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).

HARMONI DAN KOMUNIKASI LINTAS AGAMA.

Kehidupan bersama dalam masyarakat selalu berhadapan dengan dua kondisi sosial. Kondisi sosial yang selalu dihadapi itu adalah hidup dalam suasana harmoni dan hidup dalam suasana konflik. Kondisi harmoni dan konflik silih berganti menghadiri kehidupan bersama itu. Kedua kondisi sosial tersebut masing-masing memiliki dimensi positif dan negatif. Ia akan berdimensi positif apabila harmoni dan konflik tersebut didasarkan pada proses penegakan kebenaran. Ini artinya harmoni itu sebagai kondisi yang positif kalau ia sebagai perwujudan kebenaran

sejati. Demikian juga konflik itu akan berdimensi positif kalau dilandasi untuk menegakan kebenaran. Harmoni tanpa kebenaran dapat menumpulkan dan melemahkan makna nilai-nilai kehidupan. Tegaknya nilai-nilai kehidupan tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan makna untuk memajukan hidup ini mewujudkan ketentraman untuk mencapai kesejahteraan bersama yang adil dan beradab. Harmoni dalam hidup bersama memang merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap manusia normal di dunia ini.

Untuk menjaga keseimbangan antara harmoni dan konflik perlu ada jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan salah satu dimensi dari modal sosial (*social capital*), selain rasa saling percaya (*trust*) dan berkembangnya nilai-nilai/norma sosial (*values/ norm*). Teori jaringan memiliki lima prinsip, 1) ikatan-ikatan di kalangan aktor biasanya simetris, baik di dalam isi maupun intensitas, dan para aktor saling menyuplai satu sama lain dengan hal-hal yang berbeda; 2) ikatan-ikatan antar individu harus dianalisis di dalam konteks struktur jaringan yang lebih besar; 3) penyusunan ikatan sosial menyebabkan berbagai jenis jaringan tidak acak; 4) eksistensi kelompok-kelompok menghasilkan fakta ada kemungkinan pertautan lintas di antara kelompok maupun individu; 5) ada ikatan asimetrik antar unsur.

Jaringan sosial tentunya memiliki daya kohesi yang menyebabkan anggota dalam jaringan itu lebih intensif dalam menjalin hubungan. Kohesi sosial bisa dilihat dari sudut subyektif dan obyektif. Ia cenderung setuju dengan pandangan obyektif dimana solidaritas dapat dipandang sebagai suatu proses obyektif yang dapat diamati yang bebas dari sentimen-sentimen individu. Kesamaan struktural lebih memainkan peran yang kuat sebagai kohesi di dalam menjelaskan kemiripan perilaku. Para aktor yang setara secara struktural adalah orang-orang yang mempunyai hubungan identik dengan aktor-aktor lain di dalam struktur

sosial. Tokoh-tokoh berbagai agama dalam FKUB merupakan aktor yang memiliki posisi setara.

Hubungan dalam sebuah jaringan antar tokoh lintas agama idealnya dilandasi dalam prinsip kesetaraan (*equality*) akan meningkatkan daya kohesi dalam jaringan tersebut. Ketika kepentingan dan kemampuan telah dipolakan secara paksa oleh struktur yang dibuat dengan kebijakan *top down*, maka aktor hanya akan mengejar kepentingan itu sampai pada batas kemampuannya di bawah aturan/norma dalam struktur sosial yang sifatnya memaksa itu. Komunikasi antar tokoh lintas agama dan mereduksi potensi konflik karena kekeliruan memahami nilai dan norma dari agama lain. Sangat diperlukan kreativitas seorang aktor dalam membuat terobosan hingga muncul nilai-nilai kebersamaan.

Konsep-konsep lain yang penting untuk dikritisi adalah konsep mencari kesamaan dalam hidup beragama, yaitu akhlaq. Konsep ini sangat akan berlaku general karena baik atau buruknya perilaku individu tergantung akhlaq-nya, sehingga apapun agamanya jika akhlaq-nya baik maka dia akan menyebarkan kebaikan pada sesama. Hal ini di luar konteks apakah sebuah agama benar atau tidak benar, karena agama masih memiliki unsur lain yaitu aqidah dan ibadah. Jika akhlaqnya baik maka nilai-nilai kebaikan yang diajarkan agamanya akan mudah diimplementasikan dalam perilakunya.

Jika nilai-nilai atau norma (*norm*) kebaikan itu bisa menjadi karakter kelompok dalam suatu struktur jaringan maka akan mendorong terbentuknya rasa saling percaya antar aktor, tidak ada lagi kecurigaan antar tokoh lintas agama atau antarkelompok. Dari situ akan terbangun rasa saling percaya (*trust*) untuk memperkuat kohesivitas kelompok. Inilah pentingnya rasa saling percaya dalam membangun social capital dalam suatu sistem jaringan sosial kelompok dan masyarakat luas. Jika *small group*

masing-masing daerah mampu mengembangkan social capital pada lokal daerahnya, kemudian menjadi contoh untuk daerah lain, maka pada level multi lokal hingga nasional akan teragregasi menjadi sebuah tata nilai hidup beragama dalam masyarakat plural yang penuh dengan kebaikan dalam prinsip *co-existence*.

Peranan pemerintah untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat seutuhnya ini paling strategis, terutama karena pemerintah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun begitu untuk mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut diperlukan dukungan dari infrastruktur, seperti organisasi sosial dan politik, dan dukungan dari sub struktur seperti para tokoh masyarakat dan para intelektual yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kehidupan masyarakat. Harus terus menerus dikembangkan bahwa agama tidak hanya memainkan peranan dalam menciptakan integritas dan harmoni sosial tetapi juga menjadi faktor konflik dalam masyarakat.

Teori interaksionalisme, ada tiga hal yang penting bagi interaksionalisme simbolik; 1. Memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dan dunia nyata, 2. Memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis, 3. Arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial.

Pada kenyataannya pendekatan teori ini tidak melihat interaksi masyarakat sebagai suatu yang dinamis, apalagi dengan perkembangan media saat ini. Begitu juga dengan kemampuan aktor, dalam hal ini pemerintah secara struktural tidak memahami makna kebebasan beragama secara konstitusi dengan baik, yang menjadi hak dasar setiap warganya secara individu, begitu juga dengan kemampuan pemerintah dalam memahami realita sosial pada aspek keberagaman dengan berbagai simbol-simbol agama yang ada, dengan didukung menciptakan ruang-ruang publik

sebagai media alternatif bagi masyarakat dalam melakukan interaksi secara langsung, maupun tidak langsung dalam mengelola perbedaan yang ada dalam masyarakat sehingga muncul suatu sikap keberagamaan yang bermuara pada “*mutual understanding*”

Rukun adalah sebagai terminal sosial untuk mengantarkan kehidupan yang aman dan damai. Hidup yang aman dan damai sebagai iklim sosial yang dibutuhkan untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual dan nilai material secara seimbang dan kontinue. Nilai-nilai spiritual dan nilai material yang seimbang dan kontinue itu dibutuhkan untuk membangun manusia yang utuh dan berkualitas. Salah satu aspek yang dapat menimbulkan gangguan kerukunan sosial adalah pluralisme dibidang Agama. Dengan mengembangkan sikap Religious Literacy kesalahan pemahaman akan pluralisme Agama akan semakin dapat diatasi. *Religious Leteracy* itu akan semakin menampakkan hasilnya apabila hal itu dilakukan secara jujur oleh semua pihak terutama para pemuka-pemuka semua agama.

KEBEBASAN DAN MORAL.

Kebebasan membutuhkan toleransi yaitu pengakuan bahwa individu atau kelompok lain juga memiliki hak kebebasan untuk menentukan pemikiran sendiri. Toleransi menghormati kebebasan pihak lain, dan kebutuhan karena disadari tidak ada manusia mempunyai kebenaran yang mutlak sepanjang masa. Toleransi juga merupakan perasaan jujur dari dalam diri manusia, bahwa mungkin saja kebenaran ada dipihak lain, individu yang toleran bersedia mendengarkan pendapat pihak lain, mneyanggahnya dengan adu argumentasi, dan tidak menyerang pribadi yang mengemukakan pendapat tersebut. Individu atau kelompok toleran lebih mudah berdialog dan bekerjasama dengan pihak lain. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan

spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa.

Dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga mengkomunikasikan, menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Kekuatan moralitas sebagai basis pengembangan dari teori interpenetrasi terkesan bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pembangunan agama pada sektor toleransi agama. Pelayanan publik selama ini bagaikan rimba raya bagi banyak orang.

Indikator yang dapat digunakan misalnya semakin kurangnya berbagi konflik bernuansa agama di berbagai daerah dan semakin berkembangnya geliat pendidikan multikultural di berbagai tingkat dan jenjang pendidikan sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat bergama. Bersamaan dengan itu gerakan yang bersifat radikal perlu diwaspadai dan dicegah, karena pada dasarnya radikalisme merupakan gerakan yang cenderung tidak demokratis, terutama karena karakter dari gerakan tersebut adalah bersifat ekstrem dan memaksakan kehendak yang kadangkadang menggunakan pendekatan yang anarkis dan teror. Namun selama gerakan kelompok radikal masih dalam batas-batas yang tidak anarkhis, gerakan tersebut masih dapat ditoleransi. Di Indonesia dan negara-negara manapun, gerakan radikalisme ini dapat muncul dari berbagai kelompok sosial,

seperti kelompok etnik, kelompok budaya, kelompok buruh dan kelompok agama.

Gerakan radikalisme, pada satu sisi muncul diakibatkan mereka merasa terancam akan adanya kelompok yang didefenisikan sebagai kelompok minoritas, sebagai suatu ancaman, baik secara ideologi agama, maupun penganut umat beragama, sering sekali mereka melakukan perbuatan yang anarkis dengan mencari suatu legitimasi doktrin ajaran agama yang mereka pahami secara sempit sebagai suatu pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan.

Atas nama kebebasan mereka melakukan apa yang menjadi tujuannya. Dalam hidup setiap orang kebebasan adalah suatu unsur hakiki. Kesulitannya baru dimulai bila kita ingin mengungkapkan pengalaman pada taraf refleksi. Kalau tidak ada orang yang bertanya apa arti kebebasan itu, kita yakin kita tahu, karena kita sendiri mengalaminya. Tapi saat ditanya kita menjadi bingung dan tidak bisa menjawab. Dalam arti ini kebebasan tidak pernah dapat ditentukan. Dari kenyataan itu, ilmuwan menyimpulkan bahwa tidak ada kebebasan, karena mereka hanya melihat satu pengalaman dan mengabaikan yang lain seperti pengalaman batin. *Wallahu'alam. ds.30012017.*



**Narasumber Dalam Kordinasi Lintas Agama FKUB Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Darmasraya**



**Bersama Kapolresta Kota Padang dan Tokoh Masyarakat
Dalam Kegiatan Kerukunan dan Keutuhan Bangsa**

PESANTREN DAN ISIS?

Headlines Harian *Padang Ekspres*, Kamis, 12 Januari 2017 di bawah judul *Diduga ISIS, 8 warga Agama di Dideportasi*, dan “*Gambar ISIS dikirim orang lain*” yang melaporkan tentang delapan guru dan santri Pondok Pesantren Darul Hadist di Jorong Tampunik, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang Agam dideportasi Malaysia melalui Batam, Selasa, 10 Januari 2017 telah menimbulkan suasana kurang nyaman dan gundah dikalangan pemimpin, guru, santri, alumni, dan masyarakat pencinta Pondok Pesantren di Sumatera Barat. Bukan tidak mungkin berita tersebut sulit dikendalikan efek yang di bawanya, karena memang begitu hukum informasi, saat ia sudah menyebarluas tidak dapat lagi dikontrol berikut akibat yang menyertainya.

Sebutan dan atau istilah Pesanteren bagi masyarakat Sumatera Barat baru dikenal luas sejak pemerintah orde baru yang menyeragamkan sebutan lembaga pendidikan Islam. Nama Pesanteren bagi institusi pendidikan Islam pada awalnya dimaksudkan untuk penyesuaian nomenklatur Kementerian Agama guna mendapatkan bantuan pembiayaan dan pembangunan. Aslinya pendidikan agama di Sumatera Barat menggunakan istilah Perguruan, seperti perguruan Thawalib, Madrasah Tarbiyah Islamiyah disingkat MTI, Madrasah Aliyah/Tsanawiyah Negeri, Diniyah Putri dan Pengajian halakah, kini disebut Pesanteren Salafi.

Sejarah pendidikan Islam di Minangkabau jauh sebelum kemerdekaan, yang ditandainya berdiri MTI Candung bersama MTI lainnya di awal abad 20, Thawalib Padang Panjang dan Thawalib lainnya menyebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut didirikan, dibesarkan dan menjadi referensi umat Islam karena ia hidup mencerdaskan umat dan

sekaligus menjadi pilar penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Peneliti asing dan dalam negeri yang mengali tentang sumbangan pendidikan Islam, - dalam hal ini Perguruan MTI, Thawalib, Diniyah dan Madrasah- terhadap pencerdasan bangsa dan keterlibatannya dalam memelihara dan mengembang RI dipastikan tidak akan berbeda, artinya luar biasa banyaknya.

Tidak bisa dipungkuri sumbangan MTI, Perguruan Thawalib, dan Diniyah Putri selama lebih satu abad, pasti tidak bisa dinilai besarnya dan ia dirasakan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Munculnya lembaga pendidikan dengan nama Pesanteren akhir-akhir ini adalah tentu patut disambut gembira, namun juga harus disikapi dengan bijaksana. Kasus Pesanteren Darul Hadis di Tilatang Kamang Agam, yang jelas berdirinya belum sampai satu tahun, lalu kini guru dan santri berhadapan dengan hukum dan diderpotasi tentu harus dapat dibaca dengan jernih.

Pembacaan publik terhadap dunia Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang murni mendalami ilmu agama Islam, dan dalam konteks Sumatera Barat lebih banyak yang sudah berakar secara kultural, diharapkan lebih cerdas, arif dan tidak menyudutkan. Sikap *tabayyun*, (mencari kejelasan informasi secara lengkap), proporsional, menempatkan masalahnya secara tepat dan adil, harus dilebih dikemukakan. Kearifan lokal mengajarkan *jaan karano sikue kabau ba kubang sadonyo kanal luluknyo* (karena ada satu ekor kerbau berkubang, semuanya kena lumpurnya). Ratusan Pesanteren, Madrasah dan lembaga pendidikan di Sumatera Barat yang memakai nama Pesanteren untuk kepentingan tekhnis adminsitratif, lalu kemudian menjadi korban, hanya karena ada satu Pesanteren yang bermasalah.

Pasca lahirnya undang-undang sistim Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003 Pesanteren, Madrasah dan lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat pada umumnya berada dalam sistim pendidikan Islam yang diurus oleh

Pemerintah, Kementerian Agama. Kecuali akhir-akhir ini memang ada beberapa Pondok Pesanteren yang lahir dengan mengikuti arah perkembangan dari luar tradisi surau dan atau perguruan di Minangkabau. Tradisi baru Pondok Pesantren yang ada mendapat tempat di hati masyarakat, karena memang Pesanteren salah satu alternatif tepat untuk mendidik anak-anak, guna menjauhkan mereka dari gempuran budaya hedonis yang merusak mental generasi bangsa.

Adanya budaya Pesanteren corak baru yang berbeda dengan budaya asli Minangkabau tentu tidak perlu dicemaskan. Yang harus menjadi perhatian adalah materi ajar, tradisi, pola pikir dan bentuk kepribadian yang ditanamkan pada santri. Sejauh pengamatan akademik belumlah dapat dikatakan bahwa Pondok Pesantren di Sumatera Barat menjadi biang, sarang atau apapun tuduhan negatif lainnya. Pondok Pesantren masih berada dalam situasi sosial yang kondusif, terbuka dengan masyarakat lingkungan, dan memiliki hubungan dengan Kementerian Agama sesuai jangkauannya. Walaupun ada yang diluar kontrol itu adalah masalah bersama yang perlu dicarikan solusi bersama pula.

Dugaan Pesanteren memiliki jaringan dengan organisasi terlarang seperti ISIS, tentu aparat dapat menegakkan hukum secara profesional, adil dan tidak membunuh karakter Pesanteren lain dalam bentuk generalisasi. Umat memerlukan Pesanteren, bangsa membutuhkan Pesanteren dan bahkan bangsa berhutang budi pada Pondok Pesantren, karena ribuan santri telah mengorbankan jiwanya sejak masa pra kemerdekaan, membela tanah air, begitu juga saat revolusi mempertahankan NKRI.

MERAWAT PESANTEREN

Dalam sejarah perkembangan dan tradisi pesanteren, lembaga dan institusi pendidikan Islam keunggulan Psanteren adalah menjadi pilar utama pembentuk karakter anak bangsa. Nilai ketakwaan sebagai nilai dasar dalam setiap denyut nadi institusi

pendidikan Islam tidak saja dilihat dari pembelajaran, akan tetapi lebih nyata dalam setiap gerak kehidupan. Pesantern – salafi atau moderen – memulai aktivitas pembinaan ketaqwaan sejak sebelum shalat subuh, shalat subuh, pengajian selesai shalat subuh, belajar pagi sampai siang, maghrib berjamaah, mengaji selesai maghrib, dilanjutkan shalat tahajud di malam hari. Proses pembiasaan akhlak sopan santun, disiplin belajar, pengaturan tempat tinggal dan sebagainya adalah bentuk-bentuk pendidikan karakter di institusi pendidikan Islam Pesanteren.

Pondok Pesanteren adalah lembaga yang kuat pengaruhnya dalam menginternalisasikan nilai-nilai (*internalitation of values*) dan budaya. Disaat pembelajaran berlangsung sang guru tidak saja menjelaskan aspek bahasa dan isi, akan tetapi dikaitkan dengan perilaku dan pesan-pesan moral. Internalisasi nilai-nilai dilingkungan Pesanteren berlangsung dalam setiap gerak kehidupan, masing-masing psanteren memberi label dengan bermacam-macam istilah. Ada yang menyebut *sunmah psanteren*, ada pula yang menetapkan dalam aturan-aturan tertulis dan tak tertulis, tetapi dijalankan dan dipatuhi oleh warga pesantren.

Perawatan yang cukup tingginya di Pesanteren adalah pendekatan kultural. Pendekatan kultural dengan cara menciptakan lingkungan sebagai lingkungan pembelajar (*learning society*) yang berbudaya. Lembaga pendidikan Islam di Sumatra Barat yang dinamakan dengan surau menunjukkan tentang betapa hebatnya pendidikan karakter pendekatan kultural. Sejarah membuktikan *Collective memory* orang Minang terhadap masa lalunya yang sarat cetak biru sejarah yang mengagumkan dikatakan buah dari pendidikan surau. Surau itu kini berganti label dengan Pondok Pesantren.

Sisi lain yang mahal dan mulia di dunia Pesanteren adalah berjalannya proses peneladanan. Keteladanan merupakan pendekatan yang paling berpengaruh dalam mendidik peserta

didik, khususnya dalam hal pembentukan kepribadian. Pendidikan surau masa lalu menunjukkan bahwa Tuanku Syekh sebagai pendidik sekaligus pemimpin surau menjadi *figur central* bagi murid-muridnya sehingga terjadi proses pembentukan karakter yang begitu kuat.

Kepatuhan kepada guru ditanamkan sedemikian rupa dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Tuanku atau Syekh mengembangkan simbol-simbol keagamaan itu menjadi keyakinan. Adanya keyakinan pada "*berkah*" guru atau ulama adalah cara yang dipakai untuk membentuk figur yang diteladani. Penggunaan simbol kerohanian yang dimiliki oleh guru seperti *karâmah*, *berkah* dan keistimewaan lainnya ternyata mampu menjadi perekat hubungan antara satu murid dengan murid yang lain.

Pondok Pesaneren adalah kawah candra dimuka untuk terjadi pembiasaan. Pembiasaan adalah upaya membiasakan nilai-nilai positif yang dikembangkan dalam sistem pendidikan surau. Dengan begitu, pendekatan pembiasaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah melakukan kebiasaan yang baik (*good habit*). Penanaman pendidikan berkarakter melalui pembiasaan cukup kuat dan solid dilembaga pendidikan Islam sejak lalu sampai saat ini. Perbedaan hanya pada focus dan intensitasnya. Pembiasaan yang berlaku cukup kuat di surau atau pesantren dimulai dari cium tangan kepada guru, hormat sesama kawan, cinta dan kasih sayang yang kuat pada orang tua, dan perilaku kesantunan lainnya.

Pondok Pesanteren juga mendidikan kematangan emosi. Pendekatan emosional menekankan kepada aspek *raso* (rasa) peserta didik. Dengan pendekatan emosional ini, peserta didik berperilaku atas dorongan dari dalam (*internal motivation*). Dalam istilah lain, pendekatan ini relevan dengan pendekatan instrinsik. Pendekatan emosional yang berorientasi kepada aspek instrinsik akan melahirkan keikhlasan (*do more expect less*) dalam setiap

aktivitas. Kenyataan ini sudah diperlihatkan oleh pendidikan surau, dimana hubungan antara guru-murid, ulama-jamaah berkelindan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan surau dan “doktrin” ulama surau pada umumnya.

Penutup kalam ingin ditegaskan bahwa Pondok Pesantren di Sumatera Barat adalah kelanjutan dari perguruan Thawalib, MTI, Diniyah, surau dan Madrasah. Tentang Pondok Pesantren corak baru karena sentuhannya dengan dunia diluar tradisi pendidikan Islam yang sudah kokoh di Sumatera Barat adalah keniscayaan sejarah yang hendaknya disikapi dengan bijak. Adanya Pondok Pesanteren yang berbeda atau menyimpang dari khittah, tradisi dan visi Perguruan, Surau, MTI, Madrasah adalah tantangan bersama yang harus diluruskan. Masyarakat dan aparat diminta jernih, bijak dan adil dalam memberikan pandangan terhadap Pondok Pesanteren yang mayoritas pemimpin, ulama, guru, santrinya adalah menjadi pilar penyangga NKRI dan kehidupan berbangsa yang maju dan berkeadaban. Semoga Pesanteren sebagai warisan budaya luhur bangsa tetap kokoh dan kuat dalam menghadapi cobaan ini. Amin. DS. 12012017.

TADBIR AL KHAFI,

KUASA CLEAR AND CLEAN

Ketika situasi sudah pada taraf mencemaskan dan suasana dibangun dengan kekhawatiran maka diperlukan pengaturan strategi yg tidak saja terbuka, akan tetapi juga dilaksanakan pengaturan yg tertutup. Strategi tertutup itu dinamakan dengan *tadbir al khafi*. *Tadbir al khafi* adalah mengatur taktik, strategi dan langkah yang bersifat tidak segera disebarluaskan akan tetapi dirumuskan terbatas lalu kemudian setelah matang dan dirasa cukup mampu baru dikeluarkan. Strategi tertutup diperlukan dalam menilai perkembangan situasi yang mengancam kehidupan jangka panjang.

Perlawanan yg diberikan pemuda *al khafi* adalah contoh perjuangan tertutup. Pemuda *al khafi* dicatat sejarahnya dalam surat *al khafi*. *Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran (QS. Alkahfi/18:13-4).*

Pengaturan strategi tertutup harus didukung oleh pemuda teguh komitmennya dan siap memberikan apa yg dibutuhkan perjuangan. *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak). Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati*

orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. (QS. Al-Fath/48:1-4).

Ayat di atas turun asbabun nuzulnya berkaitan dengan salah satu contoh *tadbir al-khafi* yaitu perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah satu daerah berjarak lebih kurang 15 km dari pusat kota Makah. Hudaibiyah menjadi terkenal dalam sejarah karena pilihan nabi beristirahat di kampung ini sebelum memasuki Kota Mekah. Kesiapan Nabi untuk umrah setelah ditinggal 9 tahun membawa berita luas di Mekah. Rasul mengirim Usman bin Affan meninjau situasi apakah sudah aman dikunjungi. Usman di tahan beberapa waktu, sehingga menimbulkan desas desus bahwa ia dibunuh kafir Mekah. Usman kembali menyampaikan permintaan kafir Mekah agar menunda umroh tahun ini.

Perjanjian Hudaibiyah ditolak beberapa sahabat, akhirnya mereka terima setelah diyakini ini strategi Rasul atas bimbingan Allah sesuai al fath. Ada 4 makna yang dipesankan oleh sikap umat menerima perjanjian Hudaibiyah.

Pertama: *Reflektif* melupakan konflik.

Masa lalu adalah saat yang harus dijadikan untuk menutupi kesalahan dan kegagalan. Kesadaran kritis tidak boleh dikalahkan oleh kesadaran mistis dan naif. Kesadaran mistis tandanya adalah mereka yang suka melempar tanggung jawab pada kekuasaan mutlak Tuhan (*taqdir*). Tuhan dipersalahkan atas dosa dan kefatalan yang diterimanya. Mengambil tanggung jawab adalah sikap *mukallaf* yang baik. Kesadaran naif artinya kesadaran salah

baca, *over acting* dan melupakan bahwa hidup tidak bebas sebebasnya, ada namanya takdir, nasib, doa dan tawakal.

Kesadaran kritis mereka yang meyakini hidup itu penuh kebebasan (ikhtiar dan usaha) dan sekaligus dibimbing, tawakal, doa dan taqdir. Kematangan iman, keutuhan ilmu dan ketangguhan sipiritual dapat tumbuh melalui proses pembiasaan. Kepribadian terbentuk melalui kebiasaan. Kebiasaan hadir saat ia dilakukan tiada henti dgn tulus, dan ikhlas.

Artinya kesiapan menahan diri dan mengikuti strategi Allah dipastikan sesulit apapun keadaan dapat diselesaikan dgn kemengan bersama. Sebagaimana terjadi satu tahun kemudian yg dikenal *futuh Makkah*. Pembebasan Mekah yang beradab tanpa menghilangkan harga diri lawan.

Kedua: Prospek damai dan beradab.

Perjanjian Hudaibiyah melicinkan komunikasi sesama anak bangsa etnis Quraisy dan Madinah selama 10 tahun konflik dan perang yang menguras energi. Jalan kebaikan terbuka lebar pasca Futuh Makkah. Untuk maju dan sukses koninyu diperlukan pandangan tajam melihat depan. Hari esok adalah prospek yang tak boleh dibiarkan tanpa makna. Waktu terus bergetak *linear* ia tidak *sirkel*. Saat ini tidak akan berulang. Menjadi kreatif dan produktif adalah kehendak hidup. Menemukan dan mengejar masa depan sesuai karunia Allah secara serasi, selaras dan seimbang adalah tuntutan kalam suci. (*Qashas*).

Ketiga: Inovatif untuk lebih baik.

Pesan damai, maju dan kebersamaan yang dilahirkan oleh strategi jangkan panjang Hudaibiyah telah dengan nyata menjadi modal untuk melahirkan super power. Daulah Islamiyah yang menguasai dua pertiga dunia pada abad ke 13 masehi. Nikmat Allah itu luas dan sempurna. Mendapatkan nikmat dengan

menggunakan fasilitas Allah adalah panggilan suci karena memang manusia disertai mandat manajer dunia (*kehalifah*). Mengatur sesuai fungsi khalifah adalah watak dasar yang dapat menjadi modal menghadapi tantangan.

Disisi dan segi mana saja ditilik pasti orang merasakan sempurnanya karunia Allah. Titik lemah kebodohan, kemiskinan dan kerakusan telah mematikan bibit inovasi. Kedangkalan pandangan telah membenamkan mutiara jiwa sehingga menutupi inovasi.

Keempat: Adaptif. Perlu sakinah.

Hudaibiyah sekaligus membentangkan jalan sakinah dalam makna penyesuaian kritis. Pergerakan hidup telah membawa gesekan dan situasi yang kadangkala membuat hidup tidak nyaman. Melakukan penyesuaian yang alami cara jitu untuk sukses kontinyu. Menghadapi perubahan mesti memegang prinsip dan nilai. Bersamaan dengan itu membangun optimisme. Tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kecerdasan yang disertai kerendahatian modal efektif untuk beradaptasi. Tindakan bodoh dan arogansi seringkali menyulitkan diri dalam penyesuaian.

Kuasa *clear and clean*

Islam menempatkan kekuasaan sebagai tugas dan fungsi paling utama yang melekat dalam tugas dan eksistensi hidup manusia. Jabatan kekhalifahan menjadikan manusia disebut sebagai khalifah, (pemegang mandat atau mewakili urusan Allah terhadap jagad kehidupan) (al-baqarah/2:30). Visi kekhalifahan yang dalam bahasa sosial disebut dengan istilah kuasa selalu diingatkan khatib setiap kali penutup khutbah dengan mengutip surat al-Nahl/16:90 di bawah ini: Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan*

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nah/16:90).

Kuasa adalah salah satu watak yang dimiliki setiap orang. Berkuasa satu di antara amanat yang melekat dalam diri setiap orang. Pemegang amanah kuasa adalah mereka yang diberikan kepercayaan oleh sang pemilik utama kuasa, Allah Subhanahuwata'ala. Amanat kuasa menjadi penentu kebaikan hidup satu komunitas. Umat Islam setiap kali melaksanakan ibadah Jum'at diingatkan oleh khatib agar tetap loyal pada amanat kuasa itu.

Prinsip dasar yang harus dijaga oleh pemegang kuasa meliputi pemberian hak-hak utama mereka yang mendelegasikan kekuasaan (rakyat). Ada 6 prinsip dasar yang melekat dengan kuasa sekecil apapun posisi dan kedudukannya. (1). Menegakkan keadilan, (2) Mengembangkan kebaikan, (3) Melindungi keluarga (komunitas), (4) mencegah *fahisab* (kerusakan moral), (5) Menegakkan aturan atas pelanggaran hukum, dan (6) Memberantas *bughat* (tindakan makar) dan ekstrimis.

Keenam tugas kuasa tersebut dapat tercapai bila pemegang amanat kuasa memiliki nilai, norma dan komitmen yang tinggi atas cita, tujuan dan harapan yang sudah disampaikan sejak awal mereka berjuang mendapatkan mandat kuasa dari rakyat pemegang daulat. Jargon, janji politik yang disampaikan kepada konstituen saat kampanye adalah hutang kuasa yang harus di tunaikan saat kuasa sudah ditangan. Strategi pencapaian janji kuasa yang disebutkan dalam an-Nahl 90 di atas dapat terlaksana ketika didukung oleh sistim nilai antara lain:

Sumpah dan Janji.

Jabatan apapun setiap akan diberikan atau dipegang seseorang selalu diambil sumpah dan janjinya. Sumpah dan janji dibuat tidak saja sebatas administrasi, akan tetapi melibatkan nama

Allah. Spirit religiusitas yang dimuat dalam sumpah dan janji tentu dengan tujuan untuk mengikat pikiran, hati dan nurani keilahian sang pemegang kuasa. Pengucapan dan penandatanganan sumpah dan janji menjadi lampu peringatan terhadap bahaya mengingkari janji. Artinya; *Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dabulu kamu perselisihkan itu.* (QS. An-Nahl/16:92).

Meneguhi janji politik, kontrak politik, jargon kampanye bukan saja diperlukan untuk merebut simpati pemilih ketika akan dilakukan pemilihan, akan tetapi ia memiliki hubungan panjang sampai kuasa dijalankan. Janji adalah hutang yang saatnya akan ditagih. Janji politik tidak sekedar isapan jempol, tetapi adalah komitmen moral. Pemimpin yang teguh memegang janji diyakini bebas konflik. Sungguh naif, pelanggar janji disebut mereka laksana pemintal benang yang sudah baik dan kuat lalu diurai lagi.

Kekuatan pemegang kuasa menepati janji ada hubungkaitnya dengan keteguhan iman pada sang pemilik kuasa. Bahwa kuasa pada saatnya akan habis dan pergi yang abadi hanya Allah. Prilaku mengingkari janji, jual beli kuasa, prilaku politik “belah bambu” adalah indikasi absennya ilahi pada ruang kuasa. Kuasa yang tidak dihadiri Allah cenderung mudah disusupi syeithan. Meneguhi janji dengan diri, rakyat dan tentu dengan Allah adalah komitmen mulia untuk kebaikan abadi.

Hayyatan Thaiyabatan

Kuasa diabadikan untuk kehidupan yang lebih bermutu. Kualitas hidup adalah tujuan kekuasaan. Pengukuran kehidupan tahyyibah tentu berkembang sesuai budaya dan peradaban. Kualitas

lahiriyah dapat dilihat dari ketercukupan kebutuhan pokok, sarana primer hidup, seperti sarana jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kualitas hidup dihitung dengan lama pendidikan, saat ini 8, 6 tahun, jumlah tanggungan dalam keluarga, agama dan peradaban.

Kebaikan selalu berkompetisi dengan kejahatan. Kemajuan kebaikan lazimnya berbanding lurus pula dengan kejahatan. Hebatnya polisi dan aparat keamanan mencegah kriminilitas, tidak kalah pintarnya pencuri, perampok dan penadah mencari celahnya. Kuatnya aturan tentang larangan korupsi, masih saja banyak pejabat yang memakai baju oranye, OTT, diduga, tersangka, terdakwa dan terpidana kasus korupsi.

Sultan (kekuasaan) Allah, yang boleh jadi direpresentasikan oleh KPK, Jaksa, dan Polisi, akan segera menghampiri orang yang merasa berkuasa, lalu lupa diri. Banyak kita kaget dan sulit mempercayainya, orang-orang dengan performace meyakinkan, tetapi justru berurusan dengan baju oranye.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kuasa adalah amanat yang harus direbut, dipertahankan dan akhirnya dipersembahkan untuk mereka yang memberikan mandat kuasa tersebut. Tugas universal yang melekat dari diri setiap pemegang amanah kuasa meliputi menegakkan keadilan, menebarkan kebaikan, menjamin kehidupan komunitas manusia, mencegah kerusakan moral dan pelanggaran aturan serta memberantas pelaku makar. Untuk terselenggaranya tugas mulia tersebut harus diperkuat komitmen pada sumpah dan janji, terus berkreasi dan berinovasi untuk kehidupan yang lebih baik, serta menutupi lobang kebocoran. Budaya, gaya hidup dan prilaku korupsi, pungli, mafia kasus, mafia jabatan, mafia anggaran, dan sejenisnya adalah lobang kebocoran yang menghancurkan bangsa ini. Semoga Allah memberikan kita semua pemegang kuasa yang diridai-Nya, amin. Ds. 15022017.

**REKOMENDASI RAKOR AKHIR TAHUN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROPINSI
SUMATERA BARAT Senen, 28 Desember 2015, di
Auditorium Gubernuran**

Setelah mendengarkan, mencermati dan mendiskusikan, Sambutan Kepala Kantor Kemenag, Gubernur, laporan Pengurus FKUB Kabupaten Kota, Narasumber Rakor terdiri dari Prof. Dr. Duski Samad, M. Ag, Dr. H. Alirman Hamzah, M. A, Penatua Emeritus Ginting. Dan hasil Diskusi peserta Rakorwil. Menyampaikan Rekomendasi sbb:

1. Berkaitan dengan organisasi FKUB secara kelembagaan masih ada Kabupaten yang belum berdiri, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Darma raya. Pemda bersama tokoh agama agar segera merealisasikan pendirinya.
2. Pembiayaan rutin dan program FKUB mendapat anggaran dari Kementrian Agama Propinsi, Kabupaten Kota. Sedangkan bantuan APBD belum semuanya yang membantu.
3. Potensi konflik yang rawan adalah berkaitan pendirian rumah ibadah baru yang belum berizin. Stakeholder diminta untuk hat—hati memberi izin.
4. Kordinasi jelang hari besar agama dan even natal dan pendirian rumah ibadah belum seluruh kabupaten Kota yang melakukannya.
5. Kesadaran pengurus FKUB untuk tindakan antisipatif, diperlukan kebersamaan dan kekompakan tokoh contoh Pasbar dan Solok.
6. Peta kerukunan di Sumatera Barat terdiri dari daerah rawan, setengah rawan dan aman, untuk memastikanya perlu ada dukungan kajian ilmiah.

7. Perlu dikembangkan penghargaan terhadap simbol kerukunan, seperti berdampingannya rumah ibadah dan saling memulia kan hari besar agama.
8. Gubernur, Bupati dan Walikota mohon memberikan bantuan APBD bagi FKUB sesuai aturan dan kondisi daerah.
9. Umat beragama menyadari dan akan terus memelihara kerukunan sebagai modal pembangunan bangsa.
10. Untuk menjaga kerukunan yang dinamis penggunaan otoritas pemerintah lebih ditegakkan dan dilakukan dengan benar dan berkeadilan.

Padang, 28 Desember 2015
Ketua FKUB Sumatera Barat
Drs.H.Yulius Said

DAFTAR BACAAN

- Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, Penerbit Zikrul Hakim, Cet I, 2011, Jakarta, h.10.
- Atho'Mudhzhahar .”Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki.” Dalam Abdurrahman Mas’ud dkk (ed). 2011.
- Bahan Kordinasi FKUB Kabupaten Darmasraya, Selasa, 31 januari 2017 di Gedung Sekber KUB Ka. Darmasraya.
- Bahan Muzakarah Ulama, MUI Kabupaten Padang Pariaman, Rabu, 18 Februari 2016/9 Rabiul akhir 1437H di Pariaman.
- Bahrul Hayat. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri.
- Bimtek Kerukunan Umat Beragama Pemko Padang, 17 Mei 2016.
- Binsar A. Hutabarat, ”Kebebasan Beragama VS Toleransi Beragama”,<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/25/opi05.html>
- Daniel L. Smith Christopher, (Editor) *Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius. 2005
- Daniel L. Smith Christopher, (Editor) *Lebih Tajam Dari Pedang-Refleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan*, Yogyakarta: Kanisius. 2005
- Dialog Refleksi Akhir Tahun 2012, FKUB Propinsi bersama FKUB Kab.Kota,Kesbangpol,Kemenag Kab.Kota Se Sumbar, Jum’at, 28 Desember 2012 di Kanwil Kemenag Jln. Kuini Padang.
- Erich Fromm, *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta, Januari 2000
- Kamus Besar B.Indonesia Edisi. 2 Cetakan 4 Th.1995.
- Kanwil Kemenag Sumbar, *Pedoman Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat*, 2007, h.vi.

Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Hlm. 19 – 38.

Makalah Dialog Akhir Tahun 2014 FKUB Sumatera Barat, 22 Desember 2014 di Kanwil Kemenag.

Makalah Diklat Teknis Substantif Peningkatan Pengerak Kerukunan Umat Beragama Kemenag Sumbar, Jambi, Riau dan Kepri, 17 April 2014 di Dilat Teknis Keagamaan Sumbar.

Makalah Rapat Kerja Daerah FKUB se Sumatera Barat, 28 Desember 2015.

Makalah Rapat Kerja Daerah FKUB se Sumatera Barat, 28 Desember 2015.

Makalah Sepriyono, *Malakok Model menegosiasikan Keragama bagi Etnis Nias-Kristen dengan Minangkabau-Islam di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.*

Menag RI Suryadarma Ali, Pidato Acara *Silaturahmi Tokoh Agama dan Menag RI*, Jum'at, 20 Desember 2013 di Auditorium Gubernur Sumatra Barat dan ditegaskannya lagi pada Sambutan Melepas *Gerakan Jalan Kerukunan Umat Lintas Agama* dan keluarga besar Kementrian Agama Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Sabtu, 21 Desember 2013.

Pelatihan T.o.T Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Nilai-Nilai Kebangsaan di provinsi Sumatera Barat (Kota Padang), tanggal 19 s.d 28 juli 2016

Pertemuan Tokoh Sumatera Barat, Pengurus Gerakan Bela Negara (GBN) Sumbar dengan Jendral Kiflan Zen, 7 Mei 2016.

Refleksi Dialog dengan Kapolres Padang, pada saat kunjungan Kapolres Silaturahmi Idul Fitri ke rumah Ketua MUI Padang, Jln. Ambon I/4 Wisma Indah Siteba Padang, 18 Juli 2015.

Refleksi Menginjak kaki pertama kali di Bumi Ambon Manise, menghadiri Pertemuan Dekan Fakultas Tarbiyah san Keguruan UIN dan IAIN se Indonesia, di IAIN Ambon, Hotel Amans, Kota Ambon, Jum'at, 5 sd 7 Juni 2015,

Rumusan Diskusi Pusat Kajian Strategis LEMHANAS dengan Tokoh Lintas Agama dan PEMDA Propinsi Sumatera Barat, Rabu, 15 Mei 2013 di Ruang Rapat SETDA Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Sambutan Ketua Panitia Dialog dan Buka Bersama Gerakan Pemuda Ka'bah, 28 Juli 2013.

Seminar dan FGD Kerukunan Umat Beragama, Kerjasama Bina Sosial dan Agama SETDA Prop.Sumbar dengan FU IAIN IB Padang, 19 Mei 2009.

Sosialisasi SKB 3 Mentri dan PEGUB No.17 Tahun 2011, 29 Agustus 2016 di Wisma Kemala Jln.Sudirman Padang.

Sumbangan Pikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Priode 2013-2018.

Teras Utama Harian Padang Eskpres, 3 September 2016.

Teras Utama Padang Eskpres, 2 Agustus 2016.

**IDENTITAS:**

Nama Lengkap **PROF. DR. H. DUSKI SAMAD, M. Ag**, dilahirkan di Nagari Sikabu Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 18 Juli 1960. Ayah bernama Djalaluddin (Wafat 31 Mei 1971). Ibu bernama Hj. Maimunah (kini berusia lanjut 97 tahun). Pekerjaan Dosen pada Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang dengan pangkat Guru Besar Dalam Ilmu Tasawuf pada Fak. Tarbiyah IAIN. Golongan Pembina Tingkat I/IV d. Jabatan sekarang Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Alamat Jalan Ambon I No.4 Wisma Indah Siteba Padang HP/WAg. 081363271302. 081277022275. 082388611186. email: duskisamad6@gmail.com. www.prof.duski@com.

RIWAYAT KEPANGKATAN:

Guru Besar/IV d, Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, TMT, Oktober 2011. Guru Besar /IV c, Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang TMT 1992. Dosen Pemikiran Islam dan Tasawuf Program Magister (S.2) Pascasarjana IAIN Ib, TMT 01 April 2008. Dosen Pemikiran Moderen Dalam Islam pada Program Magister (S.2) STAIN Mahmud Yunus Batusangkar, TMT 01 Februari 2011. Lektor Kepala/IV a, Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah dan Dosen Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Ib, TMT 01 Oktober 2004. Lektor Muda/III d Dosen Akhlak Tasawuf Fak. Tarbiyah, TMT ,01 Oktober 2001. Lektor/III c, Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah ,TMT.01-10-1999. Asisten Ahli Madya /III b Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah, TMT 01 Oktober 1997. Asisten

Ahli /III a Dosen Akhlak Tasawuf Fakultas Tarbiyah, TMT, 01 Maret 1995. Pegawai Negeri Sipil/ Asisten Dosen Akhlak Tasawuf Fak.Ushuluddin TMT 01 Desember 1993. Calon Pegawai (Capeg), Fak. Ushuluddin IAIN / Dosen Kader TMT, 01-03- 1992.

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Doktor pada Program Doktor (S.3) Kajian Islam Konsentrasi Tasawuf pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Promisi 11 April 2003. Magister Agama (M.Ag) Konsentrasi Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999. Sarjana Lengkap (Drs) Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN,1988. Sarjana Muda (BA) Fakultas Ushuluddin IAIN IB Padang, tamat 1985. Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung Padang. 1973-1980. Sekolah Dasar No.2 Sikabu, Lubuk Alung tamat 1973.

PENGALAMAN PEKERJAAN

Fungsional dan Struktural. Guru Madrasah MTI Batang Kabung Padang, 1980-1993. Kepala Madrasah Aliyah MTI Batang Kabung Padang 1988-1993. Dosen kader pada Fakultas Ushuluddin IAIN IB 1988-1993. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Syekh Burhanuddin Pariaman 1988 - 1997. Pembantu Ketua Bidang Akademis STIT SB Pariaman 1992-1997. Dosen Tetap STIT YASTIS Padang 1988-1997. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN IB 1993 – sekarang. Dosen Pemikiran Islam Pascasarjana IAIN Imam Bonjol 2003,- sekarang. Ketua Program Konsentrasi Peradaban Islam Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, 2004-2005. Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2007-2010. Dekan PAW Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang 2010-2011. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN IB 2011-2015.

Non Struktural. Pembina Pramuka IAIN IB Padang 1993-1997. Anggota Peneliti Puslit IAIN Imam Bonjol, 2004. –sekarang. Pembina Nagari Binaan dan Narapidana Pusat Pengabdian IAIN Imam Bonjol, 2005-2008. Ketua Pusat Pengkajian Islam dan

Sumber Daya Manusia (PPI-SDM) IAIN Imam Bonjol 2003-2008. Anggota Senat Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2004 sampai sekarang. Anggota Senat IAIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2007-sekarang. Pengurus Komite Penunjang Pendidikan IAIN Ib, 2004-2008. Ketua Bidang Peningkatan Mutu Dewan Pendidikan Sumatra Barat 2011.

KARYA ILMIAH

Buku. *Kerja Sebagai Ibadah: Relasi Ibadah Vertikal-Horizontal* Nuansa Madani, 1999. *Produktivitas Kerja Sebagai Kesadaran Imani dan Relevansinya dengan Masyarakat Madani*, Penerbit Nuansa Madani, Jakarta. *Studi Tasawuf (Sejarah, Tokoh dan Pemikirannya)*, Penerbit TMF Press 1998. *Tasawuf Pasca Ibn Arabi*, buku, 1999. *Tasawuf di Nusantara*, Penerbit TMF Press 2000. *Surau di Era Otonomi*, TMF Press, 2001. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau*, Penerbit TMF Press 2002. *Adat Bansandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali Ke Nagari dan Surau*, Tahun 2003. Penerbit PT.Kartika Insan Lestari Jakarta. *Tradisionalisme Islam di Tengah Modernisme Minangkabau*. TMF Press, 2004. *Tausiyah: Kumpulan Ceramah, Dakwah dan Khutbah*, TMF Pres 2005. *Angku Batang Kabung: Kepribadian dan Pengabdiannya*, TMF Press, 2004. *Dzikerullah*, TMF Press, 2006. *Kontinuitas Tarekat di Minangkabau*, TMF Press, 2006. *Tasawuf Positif*, TMF Press.2007. *Teras: Penguatan Moral dan Keadaban(Kumpulan Artekel 2009)*, TMF Press, 2009. *Lebih Dekat Ke Hati Umat*, IAIN IB Press, 2010. *Membaca Dakwah Kotemporer*, Duskisamad Institut, 2011. *Zakat Melalui Amil*, Duskisamad Institut, 2011. *Tasawuf Dinamis*, Duskisamad Institut, 2012. *Duo Angku*, Duskisamad Institut, 2012. *Syarak Mandaki Adat Manurun*. Duskisamad Institut, 2012. *Panduan Manajemen Masjid*. Duskisamad Institut, 2012. *Penguaran Keluarga Berbasis Kearifan Lokal*, PSPH, 2013. *Pemimpin Peradaban*, Duskisamad Institut, 2014. *Kolom Dekan*, Duskisamad Institut,2014. *Khutbah Mitigasi Bencana*,i Duskisamad Institut, 2014. *Konseling Sufistik*, PT. Rajawali, Jakata, 2017. *Best Practice* Toleransi, 2017. Menulis makalah dalam jurnal ilmiah dan pertemuan ilmiah berskala daerah, nasional dan internasional. Serta pengisi kolom Opini Harian Nasional

Republika, Teras Utama pada Harian Padang Ekspres, Opini Singgalang, Majalah Saga dan pertemuan ilmiah lainnya.

KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pengerak Umat Dalam Kelembagaan antara lain: Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (TARBIYAH-PERTI) Nasional. Ketua Umum FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan Sumatra Barat. SK Fapsedu Pusat. Ketua Umum MUI Kota Padang 2012-2017. SK MUI Propinsi Sumatra Barat. Ketua Bidang pendidikan MUI Sumatera Barat. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatra Barat 2012-2017. SK Gubernur Sumatra Barat. Sekeretaris Pembina Paersatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatra Barat 2012-2017. Ketua Bidang Akses dan Mutu Pendidikan Dewan Pendidikan Sumatra Barat 2011-2016. SK Gubernur Sumatra Barat. Ketua Mustasyar DMI Kota Padang, 2012-2017. Ketua Bidang Pendidikan MUI Sumatra Barat 2010-2015. Ketua MUI Kota Padang, 2012-2017. Ketua DPD PERTI Sumatera Barat, 2012-2017. Majelis Pakar Koalisi Kependudukan Sumatra Barat 2011-2016. SK Koalisi Pusat. Ketua Bidang Dakwah, Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat (MUI). 2005 -2010. SK MUI Pusat. Ketua Umum Pembinaan Kehidupan Beragama di Kota Padang Kerjasama IAIN Imam Bonjol Padang dengan Pemerintah Kota Padang, 2004. Ketua Devisi Pendayagunaan Zakat (BAZDA) Kota Padang, SK Walikota Padang No.4 Tahun 2005. Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota Padang, 2005. Anggota Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama Sumatera Barat, 2005. Direktur Lembaga Surau Propinsi Sumatera Barat, 2005. Ketua Umum Pemangku Jabatan Dewan Pimpinan Daerah PERTI Sumatera Barat, 2006. Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Himpunan Alumni Tarbiyah Islamiyah (HAMTI), 2002-2006. Pembina Persatuan Majelis Ta'lim Kota Padang, 2008-2012. Bahagian Muzakarah dan Konsultasi Masjid Nurul Iman Sumatera Barat, SK Gubernur 6 September 2007. Wakil Sekretaris Majelis Mustasyar DPD Tarbiyah Islamiyah Sumatera Barat, 2007-2012. Komisi Ilmu-Ilmu Keislaman ICMI Korwil Sumatera Barat, 2006-2011. Ketua Bidang

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama FKUB Sumbar, SK Gubernur Sumatera barat Tahun 2008. Ketua Umum Yayasan Pengembangan Insan Madani Sumatera Barat. 2001. Ketua Umum Yayasan Tannur Sumatera Barat, 2007. Pembina Yayasan Bakhti Islam Sumatera Barat, 2007. Pembina Ikatan Mubaligh Profesional (IMP) Padang, 2007. Wakil Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Syariah Sumatera Barat, 2007. Ketua Umum Pembina Yayasan Pondok Pesantern Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung Koto Tengah Padang. 2008. Ketua II Forum Islamic Centre Sumatera Barat, 2008. Ketua Pembina Majelis Dzkiir SBY Nurussalam Wilayah Sumatera Barat, 2008. Penasehat Majelis Ulama Kabupaten Padangpariaman. Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Sumatera Barat. Dewan Pakar DPP GEMPPAR Jakarta (Generasi Muda Padangpariaman). Ketua Pembina Yayasan Murid Buya Batang Kabung Kot Tengah Padang. Ketua Dewan Pengawas KJKS BMT Rangkang Basamo, 2008. Anggota Pengawas BMT Al Anshar Binaan MUI SB, 2007. Ketua Bidang Peningkatan Mutu Dewan Pendidikan Sumatra Barat, 2010. Pengisi Program Nuansa Iman, pada TVRI Sumatera Barat. 2003. Teledakwah pada TVRI Sumatera Barat. 2004. Darus Sakinah pada TVRI Sumatera Barat. 2005. Program Buya Manjawek di Padang TV 2008. Pengisi Acara Mangaji Tasawuf di Padang TV, 2008. Pengisi Acara Intisari Kaji Ramadhan 2008 di Padang TV. Penulis Kolom Hikmah Republika, 2002-2005. Penulis Kolom Teras harian Padang Ekspres. Pengasuh Konsultasi Agama di Harian Padang Ekspres 2008. Penulis Kolom Hikmah Harian Singgalang. Mubaligh dalam berbagai kegiatan sejak 1980.

KETERLIBATAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Penanggung Jawab Pesanteren Ramadhan, Wirid Remaja dan Didikan Subuh Kota Padang, Sk Walikota Padang 220, tahun 2005. Tim Peneliti dan Sosialisasi Pembelajaran Budi Pekerti di Sekolah di Sumatera Barat, SK Gubernur 2004. Tim Ramadhan Kota Padang, SK Walikota Padang sejak 2003. Tim Ramadhan Propinsi Sumatera Barat, SK Gubernur sejak 2005. Ketua Tim Pelaksana Pesanteren Ramadhan, Wirid Remaja dan Didikan Subuh Kota Padang, Sk Walikota Padang 220, tahun 2005.

Ketua Tim Monitoring Pesanteren Ramadhan, Wirid Remaja dan Didikan Subuh Kota Padang, Sk Walikota Padang 220, tahun 2005. Tim Persiapan Dialog Kebudayaan da Kongres Kebudayaan Minangkabau 2005, SK Gubernur 2005. Tim Verifiki dan Evaluasi Buku Pelajaran Agama SD Kota Padang, SK Walikota Padang, tahun 2006. Tim Penilai Kopetensi Wali Nagari, Kepala Desa Dan Lurah Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Tahun 2007. Sekretaris Panitia Pengarah Seminar Zakat, Ekspo dan Islamic Fair dan Komperensi Zakat Asia Tenggara di Padang, September 2007. Tim Pembuatan Perda Zakat Kota Padang, 2008. Tim Penilai Kopetensi Wali Nagari, Kepala Desa Dan Lurah Tingkat Propinsi Sumatera Barat. Tahun 2008. Tim Pendamping bantuan kridit mikro Nagari Sumatera Barat, 2007. SK Gubernur Sumatera Barat 2007. Tim Perumusan Kebijakan Daerah Tentang Penjabaran dan Operasional serta Kompilasi Adat basandi Syarak dalam Propinsi Sumatera Barat, SK Gubernur 2008. Tim Peneliti Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Sumatera Barat 2008. SK Gubernur 2008. Tim Sosialiasasi Kerukunan Kehidupan Umat Beragama Sumatera Barat, SK Gubernur sd sekarang 2009. Pemateri Agama dan Adat Pelatihan KIE Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat BKKBN Propinsi Sumatera Barat 2009 sd sekarang. Pemateri ABS-SBK untuk dilingkungan Pemda Propinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat 2007 sd sekarang. Narasumber dalam pada Kabupaten Kota di Sumatera Barat, Regional dan Nasional.

KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI.

Saudi Arabia, Desember 2000, Ibadah haji Pimpinan rombongan Ibadah Haji YAPIM Jakarta. Saudia Arabia, November 2005, Ketua Kloter/PPIH Klotrr VII Embarkasi Medan. Negara Malaysia, Agustus 2007, Seminar Agama dan Pembangunan di UKM. Saudi Arabia, Februari 2008, Umroh bersama 92 Ulama dan Pimpinan Pesanteren se Indonesia atas undangan Presiden SBY . Malaysia, 19 Febuari 2009, Seminar Proposal di Kolej Darul Hikmah Kajang Malaysia. Singapura, 20 Februari 2009, Kunjungan Bersama Pascasarjana IAIN Imam

Bonjol Padang. Malaysia, Agustus 2010, Seminar Akhir Tesis S.2 (Magister) Kolej Darul Hikmah Kajang Malaysia kerjasama dengan PPs IAIN Imam Bonjol Padang. Trenggano Malaysia, Universitas Yayasan Islamiyah, Seminar Tamddun Islam Melayu. Kedah Malaysia, Agustus 2011, Pertemuan Institusi Perguruan Tinggi Islam Se ASEAN, di Insaniah. Arab Saudi, Umrah, 8-20 Februari 2013. Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore, 25-30 Desember 2013.

PENGHARGAAN

1. Piagam Penghargaan Doktor Terbaik, UIN Jakarta, 2003.
2. Piagam Penghargaan Tokoh Pesanteren Ramadhan Pemerintah Kota Padang, 2008.
3. Penerima Pin Emas Tokoh Pengerak Masyarakat Pemerintah Kota Padang Tahun 2010.
4. Piagam Penghargaan Ketua Kloter VIII Jamaah Haji, Medan 2005.
5. Piagam Ketua Rombongan Jamaah Umrah Majelis Dzikir SBY Nurussalam Tahun 2008.
6. Pimpinan Rombongan Umrah PT. Tour Wisata Rizki Internasional Indonesia.
7. Pimpinan Rombongan Rintisan Kerjasama Perguruan Tinggi Fakultas Tarbiyah dan keguruan IAIN Imam Bonjol Padang ke Negara Cambodia, Vietnam, Malaysia, Singapore, 25-30 Desember 2013.
8. Pembimbing Haji , September 2015.
9. Penerima Satya Lencana 20 Tahun dari Presiden RI 2015.

Padang, 20 Maret 2017

Prof.Dr.H.Duski Samad, M.Ag